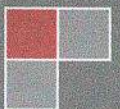


2019 - 2023

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019-2023



www.dinkes.sumutprov.go.id
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
2019 - 2023



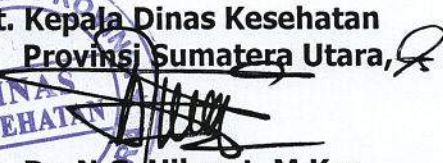
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas izin dan kehendak-Nya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 selesai disusun. Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebagai bagian dari RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan lima tahun yang dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan dengan mengembangkan kreativitas, inovasi dan kemampuan Provinsi Sumatera Utara.

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan lima tahun ke depan tidak saja diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan, tetapi juga diharapkan dapat berjalan dengan baik karena didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel.

Oleh karena itu, besar harapan saya bahwa strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan dalam Ranwal Renstra ini dapat menjadi acuan sekaligus sebagai tolok ukur kinerja bagi semua pihak, sehingga Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara kurun waktu lima tahun dalam rangka mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki kesehatan yang prima dapat terealisasi.

Kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan membantu penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, kami ucapkan terima kasih. Semoga seluruh daya upaya yang kita lakukan selalu mendapatkan rahmat dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Medan, 2019
**Pt. Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Utara,**

Dr. N.G. Hikmet, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19631016 200212 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA.....	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.....	9
2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	40
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	42
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	42
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	44
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	46
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	50
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	54
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	61
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	61
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	63

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.... 65

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 68

BAB VIII PENUTUP..... 75

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi dan UPT Tahun 2018
Tabel 2.2	Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan UPT Tahun 2018
Tabel 2.3	Proporsi Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan UPT Berdasarkan Kepangkatan Tahun 2018
Tabel 2.4	Distribusi Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018
Tabel 2.5	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Tabel 3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
Tabel 3.3	Telaahan Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan RI Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
Tabel 3.4	Telaahan KLHS Terhadap Kebutuhan dan Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Tabel 3.5	Kriteria Penilaian Isu-isu Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023
Tabel 3.6	Nilai Skala Prioritas Untuk Setiap Isu Strategis
Tabel 3.7	Perkalian Isu Strategis Terhadap Skala Prioritas
Tabel 3.8	Prioritas Isu Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Tabel 3.9	Matriks Tujuan, Target, dan Indikator TPG/SDGs yang Relevan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Tabel 6.1	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakan hak fundamental setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan menjadi sebuah upaya bersama seluruh potensi bangsa Indonesia, yakni pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan dimotori dan dikoordinasikan oleh pemerintah. Pembangunan kesehatan disusun, direncanakan, dan dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa Indonesia sebagai upaya mencapai derajat kesehatan yang baik, yang selanjutnya menjadi ukuran keberhasilan pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan kesehatan nasional periode 2015-2019 menitikberatkan pada Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. Pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat. Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis risiko kesehatan. Jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.

Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan kepada Organisasi Perangkat



Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Dokumen Renstra berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dokumen Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara disusun untuk periode tahun 2019-2023. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara merupakan dokumen yang berisikan hasil pemikiran dan komitmen bersama Dinas Kesehatan yang didasarkan pada data, asumsi-asumsi, analisis serta pendekatan metodologi yang tepat. Keseluruhan proses tersebut menghasilkan dokumen Renstra yang memuat visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran. Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023 disusun dengan memperhatikan beberapa pendekatan sebagai berikut:

- a. Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
- b. Responsif, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi.
- c. Efisien, yaitu pencapaian keluaran maksimal dengan masukan terendah.
- d. Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara yang paling optimal.



- e. Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari Renstra dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Partisipatif, yaitu melibatkan seluruh bidang dalam setiap proses tahapan.
- g. Terukur, yaitu ditetapkannya target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

1.2 Landasan Hukum

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Landasan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara secara spesifik adalah :

1.2.1 Landasan Ideal

Pancasila, sebagai landasan ideal bagi masyarakat, menyebutkan adanya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, interaksi dengan masyarakat, interaksi dengan alam, interaksi dengan negara dan bangsa lain. Dinas Kesehatan pada hakikatnya melakukan upaya pembangunan untuk mewujudkan kesehatan manusia.

1.2.2 Landasan Konstitusional

Undang Undang Dasar Tahun 1945 menjadi dasar bagi pelaksanaan kehidupan bernegara dan berbangsa, termasuk implementasi hukum, peraturan, kebijakan dan nilai. Dinas Kesehatan bertujuan mendukung pencapaian program pembangunan kesehatan.

1.2.3 Landasan Operasional

- 1.2.3.1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- 1.2.3.2 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 1.2.3.3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 1.2.3.4 Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 1.2.3.5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 1.2.3.6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 1.2.3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 1.2.3.8 Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 1.2.3.9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 1.2.3.10 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 1.2.3.11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

- 1.2.3.12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 1.2.3.13 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005- 2025;
- 1.2.3.14 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/422/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015–2019;
- 1.2.3.15 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
- 1.2.3.16 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2019 - 2023;
- 1.2.3.17 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39);
- 1.2.3.18 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 berfungsi sebagai pedoman resmi bagi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun Renja PD dan berbagai kebijakan pembangunan kesehatan di wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara juga berfungsi sebagai acuan sektor kesehatan di Provinsi Sumatera Utara serta berbagai lembaga pemerintah dan swasta di sektor lainnya.



Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menjadi acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah, serta dalam menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas Dinas Kesehatan dalam perencanaan jangka menengah. Penentuan maksud dan tujuan ini juga dengan memperhatikan banyak aspek dan hal terkait, termasuk Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara, yaitu Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki kesehatan yang prima.

1.3.1 Maksud

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menyediakan acuan resmi bagi pembuat kebijakan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan yang akan didanai dari berbagai sumber pendanaan.
2. Menyediakan tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara saat ini sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- 1.3.3 Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2023;
- 1.3.4 Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- 1.3.5 Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- 1.3.6 Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergisme antar pelaku pembangunan bidang kesehatan.



1.4 Sistematika

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023 terdiri 8 (delapan) Bab, dan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang memuat *Latar Belakang* yang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Kesehatan, fungsi Renstra Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja OPD, *Landasan Hukum* yang memuat penjelasan tentang undang undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Kesehatan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan, *Maksud dan Tujuan* yang memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, serta *Sistematika Penulisan* yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II adalah Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang memuat informasi tentang tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumberdaya yang dimiliki Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Kesehatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, serta menganalisa hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan perlu diatasi melalui Renstra Dinas Kesehatan ini.

Bab III adalah Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah yang memuat *Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah* yang mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan beserta faktor faktor yang memengaruhinya, *Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih* yang mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kesehatan yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut yang selanjutnya menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Kesehatan, *Telaahan Renstra K/L dan Renstra* yang mengemukakan apa saja faktor faktor penghambat ataupun faktor faktor pendorong dari pelayanan Dinas Kesehatan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun renstra Dinas Kesehatan Provinsi/kabupaten/kota, *Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis* yang mengemukakan apa saja faktor faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Kesehatan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS, serta *Penentuan Isu-Isu Strategis* yang mereviu kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Kesehatan yang memengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan ditinjau dari (1) Gambaran pelayanan OPD; (2) sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; (3) sasaran jangka menengah dari Renstra OPD Provinsi/kabupaten/kota; (4) implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; dan (5) Implikasi KLHS bagi pelayanan OPD.

Bab IV adalah Tujuan dan Sasaran, yang memuat rumusan *Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah*.

Bab V adalah Strategi dan Arah Kebijakan, yang memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VI adalah Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, yang memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII adalah Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, yang mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII adalah Penutup, yang berisi harapan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara terhadap Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan kesehatan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- (a) menyelenggarakan perumusan kebijakan upaya-upaya pembangunan kesehatan di bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan sesuai dengan lingkupnya;
- (b) menyelenggarakan kebijakan upaya-upaya pembangunan kesehatan di bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan sesuai dengan lingkupnya;
- (c) menyelenggarakan monitoring evaluasi dan pelaporan upaya-upaya pembangunan kesehatan di bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan sesuai dengan lingkupnya;
- (d) menyelenggarakan administrasi upaya-upaya pembangunan kesehatan di bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan sesuai dengan lingkupnya;
- (e) menyelenggarakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dilengkapi dengan struktur organisasi yang terdiri dari :



a. Kepala Dinas Kesehatan

b. Sekretariat,

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi, keuangan dan program. Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian, yaitu :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
- Sub Bagian Keuangan,
- Sub Bagian Program, Akuntabilitas, dan Informasi Publik

c. Bidang Kesehatan Masyarakat

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menangani urusan peningkatan dan pencegahan (promotif dan preventif) kesehatan masyarakat meliputi kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga tingkat Provinsi. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:

- Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi,
- Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat,
- Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menangani urusan yang meliputi urusan penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit, surveilans epidemiologi, kekarantinaan kesehatan, kesehatan matra dan haji, penanggulangan dan/atau penyelidikan kejadian luar biasa (KLB), wabah dan bencana, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit menular vektor, penyakit zoonotik, penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat tingkat Provinsi. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:

- Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.



e. Bidang Pelayanan Kesehatan

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menangani urusan yang meliputi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:

- Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
- Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- Seksi Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan.

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menangani urusan yang meliputi kefarmasian (obat, obat tradisional, bahan baku obat, industri kosmetika), makanan dan minuman, sarana produksi sediaan farmasi berupa industri farmasi, usaha kecil/mikro obat tradisional, industri bahan baku obat, industri kosmetika, bahan obat narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), makanan dan minuman, sarana distribusi obat (pedagang besar farmasi pusat dan cabang), melaksanakan penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat provinsi, reagensia, vaksin dan ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP), melaksanakan penanganan urusan pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan produksi, distribusi, peredaran pre-market dan post-market Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) di pasaran dan di fasilitas pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Provinsi.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahi 3 seksi, yaitu:

- Seksi Kefarmasian;
- Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
- Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari:



4. UPT. Laboratorium Kesehatan

Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan urusan pelayanan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan yang memenuhi standar yang ditetapkan dan peningkatan kesehatan masyarakat berbasis pembinaan, pengendalian, pencegahan dan promosi kesehatan masyarakat tingkat Provinsi.

Kepala UPT. Laboratorium Kesehatan membawahi 3 sub bagian/seksi, yaitu:

- Sub Bagian Tata Usaha;
- Seksi Laboratorium Klinik;
- Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

5. UPT. Pelatihan Kesehatan

Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam urusan teknis, pelatihan, kajian dan penelitian kesehatan tingkat Provinsi, serta mendukung bidang terkait pada kabupaten/kota terhadap penyelenggaraan teknis, pelatihan, kajian dan penelitian kesehatan yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Kepala UPT. Laboratorium Kesehatan membawahi 3 sub bagian/seksi, yaitu:

- Sub Bagian Tata Usaha;
- Seksi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi;
- Seksi Pengajaran.

6. UPT. Rumah Sakit Indrapura

Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam pelayanan pengobatan, perawatan, rehabilitasi dan pemulihan kesehatan masyarakat sesuai standar yang ditentukan, pemenuhan standar mutu fasilitas penunjang medik dan keperawatan rumah sakit.

Kepala UPT. Rumah Sakit Indrapura membawahi 3 sub bagian/seksi, yaitu:

- Sub Bagian Tata Usaha;
- Seksi Pelayanan Medik;
- Seksi Penunjang Medik.

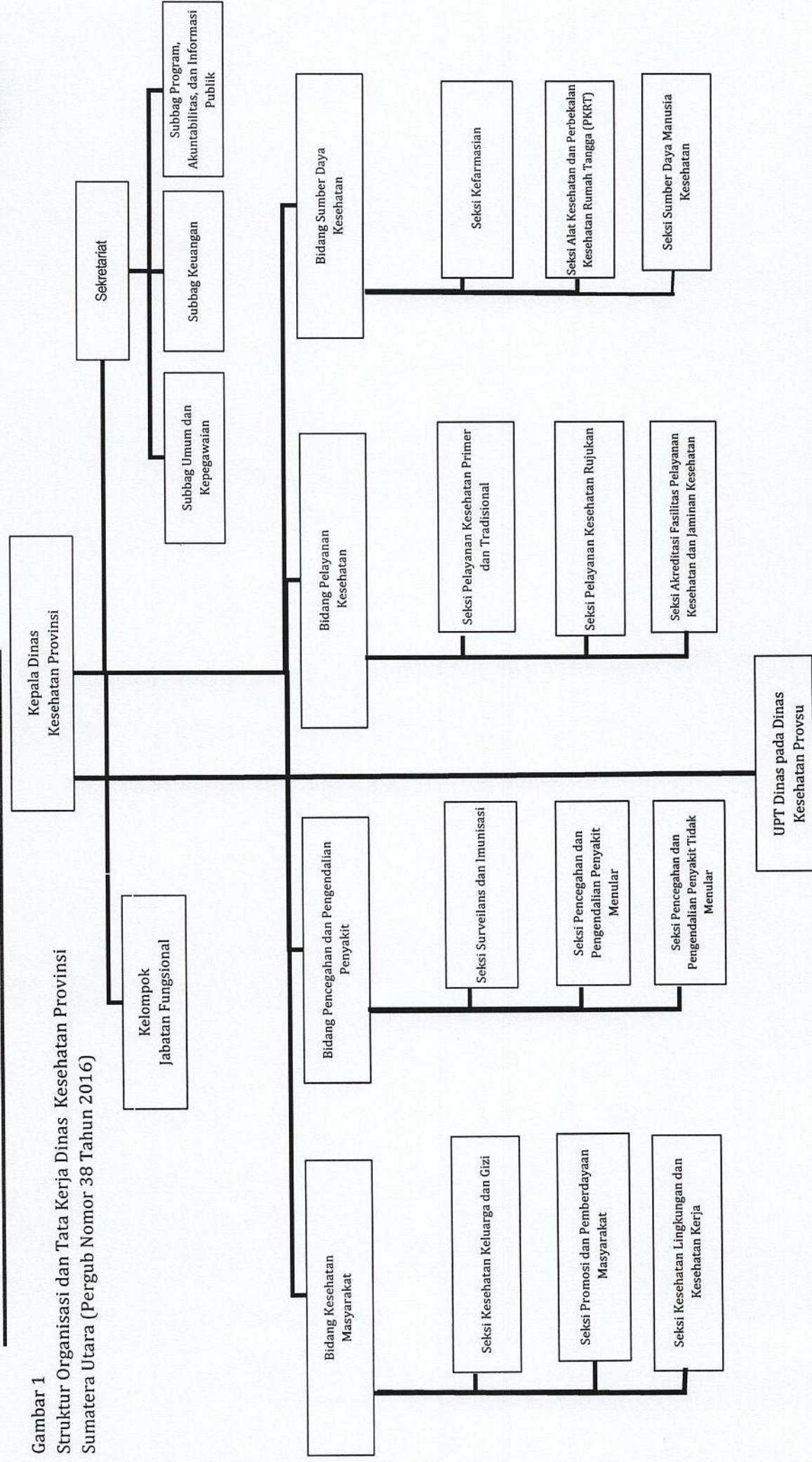
Di samping UPT, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara juga dibantu dengan Kelompok Jabatan Fungsional:

- 1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian masing-masing;



- 2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Gambar 1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Utara (Pergub Nomor 38 Tahun 2016)



2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu komponen penting dalam menjalankan fungsi dan tugas suatu Perangkat Daerah. Sampai dengan Tahun 2018, SDM yang bekerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara termasuk UPT berjumlah 860 orang, terdiri dari 276 orang laki-laki (32.1%) dan 584 orang perempuan (67.9%).

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi dan UPT Tahun 2018

No	Unit Kerja/UPT	Jumlah	Jenis Kelamin				Ket
			L	%	P	%	
1.	Dinas Kesehatan Provinsi	418	150	17.4	268	31.16	
2.	UPT. RS Khusus Mata	94	17	1.98	77	8.95	
3.	UPT. RS Khusus Paru	97	19	2.21	78	9.07	
4.	UPT RS Kusta Lausimomo	64	21	2.44	43	5.00	
5.	UPT. RSU Indrapura	23	6	0.70	17	1.98	
6.	UPT. Laboratorium Kesehatan	71	21	2.44	50	5.81	
7.	UPT. Pelatihan Kesehatan	62	27	3.14	35	4.07	
8.	Dipekerjakan diluar Dinkes	9	3	0.35	6	0.70	
	Jumlah	860	276	32.1	584	67.9	

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan urusan kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menitikberatkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan sebagai pelaksana pelayanan kesehatan. Salah satu fokusnya adalah menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan yang diberikan SDM Kesehatan kepada masyarakat. Berdasarkan tingkat pendidikan, ASN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan UPT didominasi oleh tiga kelompok berpendidikan Sarjana (Strata 1) sebesar 38,60%, SMA sebesar 26,97%, dan Sarjana Muda/Diploma (D3) sebesar 19,65%. SDM kesehatan dengan jenjang pendidikan magister kesehatan (S2 Kesehatan) juga ditemukan meningkat setiap tahunnya (Tabel 2).

Tabel 2.2.
Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan UPT
Tahun 2018

INSTANSI	LAKI-LAKI							PEREMPUAN						
	S2	S1	D3	D1	SMA	SMP	SD	S2	S1	D3	D1	SMA	SMP	SD
Dinas Kesehatan	22	70	13	-	36	7	2	31	136	37	2	56	4	2
UPT. RSK Mata	1	6	8	-	3	-	-	6	21	31	3	18	1	-
UPT. RSK Paru	7	4	6	-	6	-	-	1	19	27	1	28	1	1
UPT. RSK Lau simomo	-	4	5	-	12	-	1	1	11	16	2	15	1	-
UPT. RSU Indrapura	1	3	3	-	2	-	-	-	6	6	-	6	-	-
UPT. Labkes	3	5	1	-	9	-	5	2	16	9	1	23	1	-
UPT. Pelkes	8	9	-	-	11	-	-	5	18	6	-	7	-	-
Di luar Dinkes	1	1	1	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-
JUMLAH :	43	102	37	-	79	7	8	48	231	132	9	153	8	3

Tabel 2.3.
Proporsi Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan UPT
Berdasarkan Kepangkatan Tahun 2018

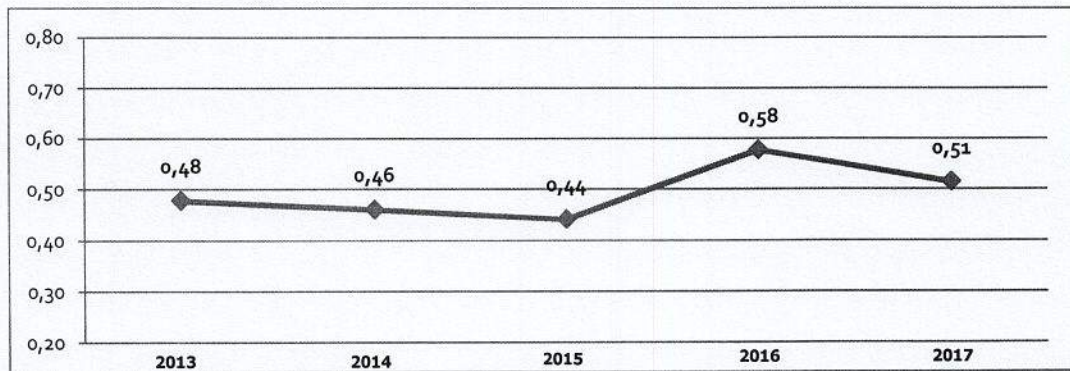
Golongan dan Kepangkatan (Dinkes Provsu dan UPT)	Jumlah	Jenis Kelamin			
		Pria	%	Wanita	%
Golongan I	8	6	0.70	2	0.23
Golongan II	168	71	8	97	11.28
Golongan III	573	171	20	402	46.74
Golongan IV	111	31	4	80	9.30
Total	860	279	32.44	581	67.56

Dari Tabel 3 terlihat bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2018 didominasi oleh pangkat Golongan III sebanyak 573 Orang atau 66,63%.

Salah satu yang menjadi tolok ukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat adalah ketersediaan tenaga medis, yang dilihat dari rasio tenaga medis per satuan penduduk.

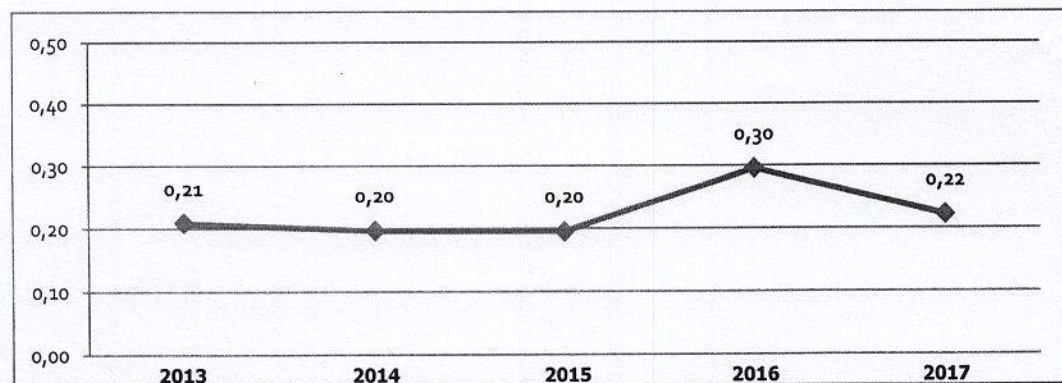


Grafik 2.1
Rasio Tenaga Medis per 1.000 Penduduk
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017



Sumber : BPS, Sumatera Utara Dalam Angka 2013-2017

Grafik 2.2
Rasio Tenaga Dokter per 1.000 Penduduk
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017



Sumber : BPS, Sumatera Utara Dalam Angka 2013-2017

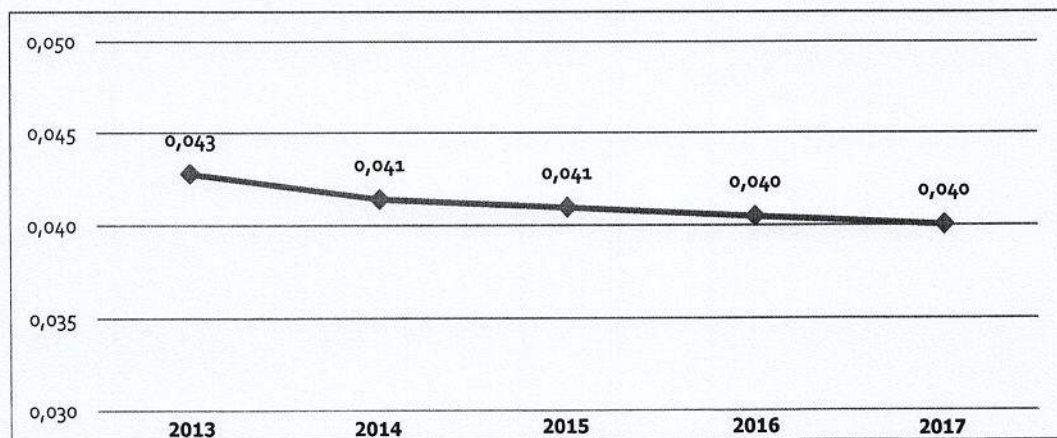
Rasio tenaga medis tahun 2013-2017 hanya mengalami sedikit kenaikan, yaitu dari 0.48 per 1.000 penduduk pada tahun 2013 menjadi 0.51 per 1.000 penduduk pada tahun 2017. Begitu juga halnya dengan rasio tenaga dokter per satuan penduduk, dari 0.21 per 1.000 penduduk pada tahun 2013 menjadi 0.22 per 1.000 penduduk pada tahun 2017.

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan merupakan salah satu tolok ukur kinerja Pemerintah terhadap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakatnya. Rasio fasilitas pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk menggambarkan daya keterjangkauan pelayanan kesehatan di suatu daerah terhadap penduduknya.

Fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara relatif cukup banyak baik dari segi jumlah maupun jenisnya. Fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah (Puskesmas) telah menjangkau seluruh kecamatan yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Sampai dengan tahun 2018, terdapat 581 unit Puskesmas di Provinsi Sumatera Utara, dimana 166 diantaranya memiliki instalasi rawat inap. Puskesmas telah dilengkapi dengan jaringan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan memiliki jaringan kemitraan dengan Desa Siaga di beberapa wilayah.

Grafik 2.3
Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk (1.000 penduduk)
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017



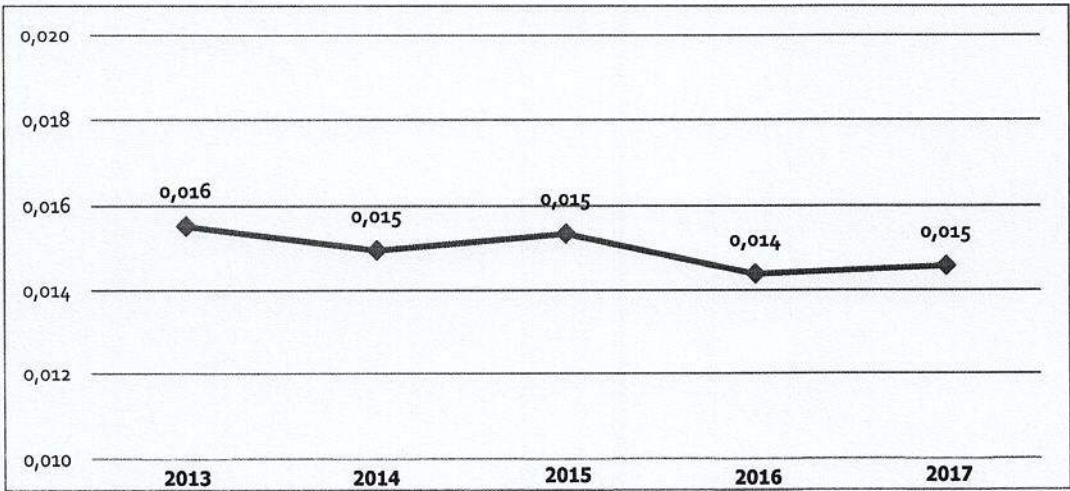
Sumber : BPS, Sumatera Utara Dalam Angka 2013-2017

Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di Provinsi Sumatera Utara juga relatif telah memadai dengan berbagai jenis pelayanannya. Dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, 31 kabupaten/kota diantaranya telah memiliki Rumah Sakit Pemerintah dan telah operasional, termasuk RS Pratama di Kab. Nias Utara yang diresmikan pada tanggal 5 Maret 2019. RS Pratama direncanakan juga dibangun di Kab. Nias Barat pada tahun 2019 menggunakan DAK Fisik Afirmasi. Dengan demikian, hanya Kota Gunungsitoli satu-satunya daerah yang belum memiliki Rumah Sakit Pemerintah.

Terdapat 213 Rumah Sakit Pemerintah dan swasta di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018. Rasio tempat tidur (TT) RS di Provinsi Sumatera Utara sebesar 1,50 TT per 1.000 penduduk. Rasio tersebut sudah mencukupi bila dibandingkan dengan standar nasional dan *World Health Organization* (WHO), yaitu 1 TT per

1.000 penduduk. Namun demikian, persebaran TT RS belum merata, dimana sebagian besar TT RS terkonsentrasi di wilayah kota Medan dan Deli Serdang. Hal ini berimplikasi pada akses masyarakat terhadap TT RS di kabupaten/kota. Dampak yang jelas terlihat pada penduduk di Kota Gunungsitoli, dimana 1 TT RS melayani 2.078 penduduk, dibandingkan 1 TT RS di kota Medan yang melayani 254 penduduk.

Grafik 2.4
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk (1.000 penduduk)
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017



Sumber : BPS, Sumatera Utara Dalam Angka 2013-2017

Fasilitas pelayanan kesehatan pendukung lainnya seperti klinik kesehatan dan apotek juga berkembang dengan baik seiring dengan semakin besarnya peran swasta dalam pembangunan kesehatan. Sampai dengan tahun 2018, terdapat 1.052 klinik dan 740 apotek. Distribusi fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara per kabupaten/kota tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.4.
Distribusi Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Jumlah			
	Rumah Sakit	Puskesmas	Klinik	Apotek
Nias	1	10	17	0
Mandailing Natal	3	26	32	9
Tapanuli Selatan	1	16	31	5
Tapanuli Tengah	1	23	31	15
Tapanuli Utara	1	20	25	25
Toba Samosir	2	19	27	13
Labuhanbatu	7	13	24	27
Asahan	15	25	41	38
Simalungun	8	38	50	51
Dairi	1	18	20	11
Karo	6	19	45	18
Deli Serdang	22	34	76	102
Langkat	10	30	43	45
Nias Selatan	2	35	51	3
Humbang Hasundutan	1	12	20	9
Pakpak Bharat	1	8	9	2
Samosir	1	12	8	2
Serdang Bedagai	6	20	33	40
Batu Bara	3	15	24	28
Padang Lawas	2	16	28	10
Padang Lawas Utara	2	17	22	7
Labuhanbatu Selatan	3	17	27	22
Labuhanbatu Utara	6	17	23	19
Nias Utara	0	11	11	1
Nias Barat	0	8	10	1
Sibolga	2	5	29	7
Tanjung Balai	2	8	23	14
Pematangsiantar	8	19	29	26
Tebing Tinggi	8	9	20	17
Medan	76	41	119	128
Binjai	9	8	37	21
Padangsidempuan	4	10	24	18
Gunungsitoli	1	6	25	6
Jumlah	213	581	1.052	740

Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) merupakan salah satu instrumen dalam menilai kepatuhan Fasyankes terhadap standar. Dari 581 Puskesmas yang ada di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018, 408 Puskesmas diantaranya telah terakreditasi (70.22%). Dari 213 RS yang ada, sebanyak 145 diantaranya telah terakreditasi (68,08%).



Untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkelanjutan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara membutuhkan aset sebagai salah satu sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi serta merupakan suatu bentuk investasi. Aset tanah yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2018 adalah 1.124.539 m² dengan rincian kantor Dinas Kesehatan Provinsi seluas 7.956 m², UPT. RS Khusus Mata seluas 4.999 m², UPT. RSU Kusta Lausimomo seluas 1.068.499 m², UPT. RS Indrapura seluas 5.207 m², UPT. Laboratorium Kesehatan seluas 10.002 m², UPT. Pelatihan Kesehatan seluas 14.668 m² dan sisanya berupa lahan untuk gudang, Instalasi Farmasi Provinsi, dan mess.

Di samping aset tanah, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan UPT juga didukung dengan aset kendaraan roda 4 roda 2. Barang inventaris lain yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara antara lain meliputi alat kantor dan rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, alat-alat keamanan, instalasi, jaringan, dan lainnya keseluruhan.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Capaian Indikator Kinerja

Analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dilakukan untuk melihat seberapa besar peran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan urusan kesehatan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara, seberapa kuat daya dukung sumber dayanya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, tingkat ketercapaian kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, perbandingan capaian kinerja antara Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, serta hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi dalam pencapaian tujuan pembangunan bidang kesehatan.



Tabel 2.5 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada tahun					
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I	SPM Kesehatan (Permenkes No. 741/ Menkes/Per/ VII/ 2008) Tahun 2010 - 2015																		
A.	Pelayanan Kesehatan Dasar																		
1.	Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (%)				90%	91%	92%	93%	86%	84.1%	75.5%	89%	89%	86%	0.93	0.83	0.97	0.96	1.00
2.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani				75%	76%	77%	78%	79%	-	30.85%	66.97%	73.17%	66%	-	0.40	0.87	0.94	0.83
3.	Cakupan persalinan yang ditolong oleh Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan (%)				86%	87%	88%	89%	85%	86%	76.2%	89.50%	90.3%	85%	1.00	0.87	1.02	1.01	1.00
4.	Cakupan pelayanan nifas (%)				86%	87%	88%	89%	83%	-	-	84%	87.7%	82%	-	-	0.95	0.98	0.99
5.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Cakupan kunjungan bayi (%)				88%	89%	90%	91%	80%	90.70%	81.5%	83.80%	88.60%	92%	1.03	0.91	0.93	0.97	1.15
7.	Cakupan desa UCI (%)				80%	85%	90%	95%	80%	74.7%	75.4%	72.8%	74.5%	81.7%	0.93	0.89	0.81	0.78	1.02
8.	Cakupan pelayanan balita (%)				85%	86%	87%	88%	78%	70.82%	-	82%	88.2%	85%	0.83	-	0.94	1.00	1.09
9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada 6-24 bulan keluarga miskin (%)				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
11.	Cakupan penjarangan siswa SD dan setingkat (%)				84%	86%	87%	88%	65%	-	-	83.7%	88.2%	79%	-	-	0.96	1.00	1.21
12.	Cakupan peserta KB aktif (%)				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit (%)																			
13.	AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun (%)				>2	>2	>2	>2	>2	2.26	2.18	2.11	2.2	1.8	1.00	1.00	1.00	1.00	0.9
14.	Penemuan penderita pneumonia balita (%)				20%	25%	30%	35%	40%	24%	41.66%	18.86%	11.7%		1.20	1.67	0.63	0.33	
15.	Penemuan pasien baru TB BTA positif (%)				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Penderita DBD yang ditangani (%)				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Penemuan penderita Diare (%)				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
B. Pelayanan Kesehatan Rujukan																			
1.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
2.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan di kab/kota (%)				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
C. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB																			
	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.7%	100%	100%	1.00	1.00	0.91	1.00	1.00



No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
D. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat																			
	Cakupan desa siaga aktif (%)				22%	25%	30%	35%	40%	26%	28.7%	30.01%	36.64%	37.5%	1.18	1.15	1.00	1.05	0.94
II Standar IKK (PP No. 6 Tahun 2008)																			
A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat																			
1. Kesejahteraan sosial																			
1.	Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB)				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Angka usia harapan hidup (tahun)				71.7	71.8	71.9	71.10	72	68.04	68.21	68.29	68.37	68.45	0.95	0.95	0.95	0.96	0.95
3.	Persentase balita gizi buruk				22%	21.5%	21%	20.5%	20%	21.05%	21.30%	11.40%	18.20%	19.7%	0.96	0.99	0.54	0.89	1.01
B. Aspek Pelayanan Umum																			
1. Pelayanan Dasar																			
1.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu, per satuan penduduk				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.25	0.26	0.32	0.28	-	-	-	-	-	-
2.	Rasio dokter per satuan penduduk				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III Renstra Dinkes Provsu																			
1.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin				90%	91%	92%	80%	82%	72.07%	79.43%	78.59%	85.17%	93.35%	0.80	0.87	0.85	1.06	1.14
2.	Jumlah RSU dan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar				12 RSU & 6 Pusk.	14 RSU & 12 Pusk.	16 RSU & 18 Pusk.	18 RSU & 24 Pusk.	20 RSU & 30 Pusk.	12 RSU & 6 Pusk.	9 RSU & 12 Pusk.	13 RSU & 18 Pusk.	18 RSU & 28 Pusk.	18 RSU & 41 Pusk.	1.00	0.80	0.91	1.09	1.15
3.	Persentase penggunaan obat rasional (POR) di sarana pelayanan kesehatan dasar				36%	38%	40%	42%	44%	37%	-	39.81%	52.39%	44.63%	1.02	0.99	1.24	1.01	1.01

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada tahun					
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4.	Persentase sarana sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan GMP dan GDP				62%	64%	66%	68%	70%	83.5%	65%	66.66%	67.13%	70%	1.34	1.01	1.01	0.99	1.00
5.	Persentase IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) yang bersertifikat				15%	20%	25%	30%	35%	20.02%	25%	27.72%		40%	1.33	1.25	1.11		1.14
6.	Persentase sarana produk alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi persyaratan GMP dan GDP				62%	64%	66%	68%	70%	75%	65.22%	74%	69.86%	68%	1.21	1.02	1.12	1.03	0.97
7.	Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan				86%	87%	88%	89%	85%	86%	76.2%	89.5%	90.3%	85%	1.00	0.87	1.02	1.01	1.00
8.	Cakupan pelayanan antenatal K4				90%	91%	92%	93%	86%	84.1%	75.5%	89%	89%	86%	0.93	0.83	0.97	0.96	1.00
9.	Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani				75%	76%	77%	78%	79%	-	30.85%	66.97%	73.17%	66%	-	0.40	0.87	0.94	0.83
10.	Cakupan pelayanan ibu nifas				86%	87%	88%	89%	83%	-	-	84%	87.7%	82%	-	-	0.95	0.98	0.99
11.	Jumlah Pusk. RI yang mampu PONEC				140	143	146	149	152	147	153	156	156	161	1.05	1.07	1.07	1.05	1.06
12.	Cakupan kunjungan neonatus (KN Lengkap)				86%	87%	88%	89%	80%	86.90%	73.60%	83.80%	89%	85%	1.01	0.84	0.95	1.00	1.06
13.	Cakupan kunjungan bayi				88%	89%	90%	91%	80%	90.70%	81.5%	83.80%	88.6%	92%	1.03	0.91	0.93	0.97	1.15
14.	Cakupan pelayanan anak balita				85%	86%	87%	88%	78%	70.82%	-	82%	88.2%	85%	0.83	-	0.94	1.00	1.09
15.	Cakupan penjangkaran siswa SD dan setingkat				84%	86%	87%	88%	65%	-	-	83.7%	88.2%	79%	-	-	0.96	1.00	1.21
16.	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi terhadap wanita dan remaja				161 Pusk.	166 Pusk.	171 Pusk.	176 Pusk.	181 Pusk.	74 Pusk.	171 Pusk.	-	185 Pusk.	190 Pusk.	0.46	1.03	-	1.05	1.05

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada tahun					
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
17.	Jumlah Puskesmas santun usia yang terbentuk di kab/kota				70 Pusk.	75 Pusk.	80 Pusk.	85 Pusk.	90 Pusk.	70 Pusk.	97 Pusk.	112 Pusk.	136 Pusk.	176 Pusk.	1.00	1.49	1.40	1.60	1.95
18.	Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut				62%	64%	66%	68%	70%	62.08%	63.76%	68.45%	68.93%	95%	1.00	0.99	1.04	1.01	1.36
19.	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar				347 Pusk.	380 Pusk.	413 Pusk.	446 Pusk.	479 Pusk.	370 Pusk.	456 Pusk.	496 Pusk.	-	543 Pusk.	1.07	1.20	1.20	-	1.13
20.	Jumlah Puskesmas DTPK/DBK yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar				40 Pusk.	42 Pusk.	44 Pusk.	46 Pusk.	48 Pusk.	-	-	43 Pusk.	47 Pusk.	49 Pusk.	-	-	0.98	1.02	1.02
21.	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi				15 Pusk.	20 Pusk.	30 Pusk.	40 Pusk.	50 Pusk.	0 Pusk.	0 Pusk.	20 Pusk.	153 Pusk.	408 Pusk.	0	0	0.67	3.82	8.16
22.	Jumlah Puskesmas yang menerapkan manajemen Puskesmas sesuai standar				33 Pusk.	66 Pusk.	99 Pusk.	132 Pusk.	165 Pusk.	33 Pusk.	78 Pusk.	98 Pusk.	245 Pusk.	278 Pusk.	1.00	1.18	0.99	1.86	1.68
23.	Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan kesehatan dasar sesuai standar				33 Pusk.	66 Pusk.	99 Pusk.	132 Pusk.	165 Pusk.	36 Pusk.	49 Pusk.	-	108 Pusk.	165 Pusk.	1.09	0.74	-	0.82	1.00
24.	Persentase kab/kota yang minimal memiliki 4 Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional				30%	35%	40%	45%	50%	24.25%	54%	54%	60.60%	100%	0.81	1.54	1.35	1.35	2.00
25.	Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja				17 kab/kota	21 kab/kota	24 kab/kota	28 kab/kota	33 kab/kota	6 kab/kota	-	20 kab/kota	28 kab/kota	33 kab/kota	0.35	-	0.83	1.00	1.00

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
26.	Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 3 Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olah raga				4 kab/kota	8 kab/kota	12 kab/kota	14 kab/kota	18 kab/kota	8 kab/kota	12 kab/kota	12 kab/kota	14 kab/kota	32 kab/kota	2.00	1.50	1.00	1.00	1.78
27.	Jumlah pesantren yang memiliki poskestren				55	60	65	70	80	78	-	68	70	70	1.42	-	1.05	1.00	0.87
28.	Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 3 Puskesmas yang menyelenggarakan program pengembangan (jiwa, indera, dan gigi mulut)				20 kab/kota	24 kab/kota	28 kab/kota	30 kab/kota	33 kab/kota	16 kab/kota	24 kab/kota	24 kab/kota	30 kab/kota	33 kab/kota	0.80	1.00	0.86	1.00	1.00
29.	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)				n/a	n/a	n/a	n/a	83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat				55%	57%	59%	61%	65%	60.3%	62.23%	62.81%	63.55%	66.13%	1.09	1.09	1.06	1.04	1.02
31.	Jumlah Poskesdes di desa/ kelurahan siaga				2.770 unit	2.800 unit	2.850 unit	2.900 unit	2.950 unit	-	-	-	2.810 unit	3.290 unit	-	-	-	0.97	1.11
32.	Persentase SD yang mempromosikan kesehatan				25%	28%	31%	34%	36%	29.6%	30.6%	32%	39.3%	42.25%	1.18	1.09	1.03	1.15	1.17
33.	Persentase Posyandu purnama dan mandiri				35%	38%	41%	43%	45%	40.07%	-	42.65%	50.85%	51.26%	1.14	-	1.04	1.18	1.14
34.	Persentase desa siaga aktif				22%	25%	30%	35%	40%	26%	28.7%	30.01%	36.64%	37.5%	1.18	1.15	1.00	1.05	0.94
35.	Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 2 desa yang mengembangkan-kan TOGA				20 Kab/Kota	22 Kab/Kota	24 Kab/kota	26 kab/kota	28 kab/kota	22 kab/kota	24 kab/kota	28 kab/kota	30 kab/kota	33 kab/kota	1.10	1.09	1.17	1.15	1.18
36.	Persentase gizi buruk yang mendapatkan perawatan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
37.	Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI eksklusif				40%	40%	50%	50%	55%	35.80%	36.10%	42.89%	45.92%	49.66%	0.89	0.90	0.86	0.92	0.90

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	Target NSPK (3)	Target IKK (4)	Target indikator lainnya (5)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
38.	Cakupan rumah tangga yang mengonsumsi garam beryodium				85%	85%	85%	87%	90%	-	-	99.99%	98.08%	100%	-	-	1.18	1.13	1.11
39.	Persentase Anak 6-59 bulan mendapat Vitamin A				80%	80%	81%	82%	83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	Persentase Ibu hamil mendapat tablet Fe				70%	71%	74%	78%	80%	-	-	-	76.46%	79.18%	-	-	-	0.98	0.99
41.	Persentase Kab/kota yang melaksanakan surveilans gizi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	100%
42.	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)				70%	70%	70%	75%	80%	78%	80%	69%	85.47%	87.68%	1.11	1.14	0.98	1.14	1.09
43.	Persentase Penyediaan Buffer Stock MP-ASI untuk bencana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
44	Persentase Ibu hamil KEK dan Anemia mendapatkan PMT				40%	45%	48%	50%	55%	38%	54.67%	-	89.08%	90.48%	0.95	1.21	-	1.78	1.65
45	Prevalensi Stunting pada balita				n/a	n/a	n/a	28%	26%	-	-	-	28.4	32.3%	-	-	-	1.01	1.24
46	Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan				72%	73%	74%	75%	78%	62.4%	70%	70%	75%	78.37%	0.87	0.96	0.94	1.00	1.00
47	Persentase keluarga menggunakan air bersih				60%	62%	64%	66%	68%	60%	60%	-	69%		1.00	0.97	-	1.04	
48	Persentase Keluarga menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan				66%	67%	68%	69%	70%	65.1%	66%	-	72%	71.38%	0.99	0.98	-	1.04	1.02
49	Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan				75%	76%	77%	78%	79%	-	-	75%	78%	79.97%	-	-	0.97	1.00	1.01

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
50	Jumlah kab/kota Sehat				7 K/K	8 K/K	9 K/K	10 K/K	11 K/K	4 K/K	7 K/K	7 K/K	10 K/K	10 K/K	0.80	0.87	0.78	1.00	0.91		
51	Jumlah Puskesmas yang memiliki klinik sanitasi				297 Pusk.	300 Pusk.	303 Pusk.	306 Pusk.	310 Pusk.	-	-	116 Pusk.	306 Pusk.	315 Pusk.	-	-	0.39	1.00	1.02		
52	Persentase air minum yang diperiksa yang memenuhi syarat kesehatan				45%	48%	51%	54%	57%	-	46%	-	61%	72.09%	-	0.96	-	1.13	1.26		
53	Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan				75%	77%	78%	79%	80%	-	-	72%	79%	80%	-	-	0.92	1.00	1.00		
54	Jumlah RS yang melakukan pengolahan limbah medis RS				0 RS	28 RS	38 RS	48 RS	58 RS	0 RS	12 RS	20 RS	48 RS	57 RS	-	0.43	0.53	1.00	0.98		
55	Persentase kab/kota yang menyelenggarakan program penyehatan lingkungan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
56	Angka case detection rate penyakit TB				83%	84%	85%	86%	87%	78.3%	83.4%	77.8%	61.5%	61,20	0.94	0.99	0.91	0.71	0.70		
57	Angka keberhasilan pengobatan TB				≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥90%	94%	93.2%	92.3%	93.1%	92.50%	0.99	0.98	0.97	0.98	1.03		
58	Angka CNR (case notification rate) program TB per 100.000 penduduk				170	170	170	170	170	165	172	174	166	186	0.97	1.01	1.02	0.98	1.09		
59	Cakupan penemuan dan tatalaksana kasus pneumonia pada balita				20%	25%	30%	35%	40%	24%	41.66%	18.86%	11.71%		1.20	1.67	0.63	0.33			
60	Angka penemuan kasus baru Kusta per 100.000 penduduk				<5	<5	<5	<5	<5	1.34	1.43	1.27	1.03	<5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
61	Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan sosialisasi hepatitis B				5 kab/kota	10 kab/kota	15 kab/kota	20 kab/kota	25 kab/kota	-	10 kab/kota	15 kab/kota	18 kab/kota	32 kab/kota	-	1.00	1.00	0.90	1.28		

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
62	CFR diare pada saat kejadian luar biasa (KLB)				<1,2%	<1,2%	<1%	<1%	<1%		1,86%	2,73%	2,27%	0%	<1,2%		0,64	0,44	0,44	1,00	1,00
63	Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sosialisasi demam thypoid				10 kab/kota	20 kab/kota	30 kab/kota	33 kab/kota	33 kab/kota		-	6 kab/kota	18 kab/kota	21 kab/kota	32 kab/kota		-	0,30	0,60	0,64	0,97
64	Prevalensi kecacingan pada anak sekolah				<20%	<20%	<20%	<20%	<20%		29%	25,7%	22,5%	14,60%	14,60%		0,69	0,78	0,89	1,00	1,00
65	Angka kecacatan tingkat 2 kusta				<10%	<10%	<10%	<10%	<10%		11%	22%	18%	15%	14%		0,91	0,45	0,55	0,67	0,71
66	Jumlah penduduk kelompok usia >15 tahun yang mengikuti tes HIV				12.000 orang	13.000 orang	14.000 orang	15.000 orang	16.000 orang		36.330 orang	42.258 orang	73.090 orang	81.551 orang	77.433 orang		3,02	3,25	5,22	5,44	4,84
67	Persentase ibu hamil HIV positif mendapatkan ARV				50%	60%	70%	75%	80%		72%	78,3%	78,6%	97,9%	98%		1,44	1,30	1,12	1,30	1,23
68	Persentase kasus IMS yang diperiksa dan diobati				40%	55%	70%	75%	80%		90%	-	98,5%	99,38%	99,60		2,25	-	1,40	1,32	1,25
69	Persentase ODHA (orang dengan HIV/ AIDS) mendapatkan pengobatan ART				80%	82%	83%	84%	85%		79%	80%	85,4%	86%	88,8%		0,99	0,97	0,96	1,02	1,04
70	Angka kematian Jemaah haji kurang dari 2 per 1.000 jemaah haji				<2 / 1.000 jemaah	<2 / 1.000 jemaah	<2 / 1.000 jemaah	<2 / 1.000 jemaah	<2 / 1.000 jemaah		2,1/ 1.000 jemaah	-	-	3,9/ 1.000 jemaah	2,5/1,0 000 jemaah						0,84
71	Angka penemuan kasus baru Frambusia per 100.000 penduduk				<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6		<0,008	-	<0,02	0	0		1	-	1	1	1
72	Angka kesakitan DBD per 1.000 penduduk				49	48	47	46	45		21,2	24,1	59,2	38,9	40,06		2,31	1,91	0,81	1,21	1,12
73	Angka zoonosis lainnya (flu burung, rabies, anthrax, leptospirosis) yang ditangani sesuai standar				90%	92%	94%	95%	>95%		74,58%	72,67%	78%	72,34%	72,36		0,83	0,79	0,83	0,76	0,76

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada tahun					
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
74.	Cakupan penduduk di daerah endemis mendapatkan pengobatan massal filariasis				65%	68%	70%	72%	75%	73.2%	85%	85%	86.33%	86,33%	1.13	1.25	1.21	1.20	1,15
75.	Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk (API)				1	1	1	1	1	1	0.4	0.25	0.15	0.09	1.00	2.5	4.00	6.67	11,11
76.	Persentase desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI)				80%	85%	90%	95%	80%	74.7%	75.4%	72.8%	74.5%	81,7%	0.93	0.89	0.81	0.78	1,02
77.	Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap				85%	88%	90%	92%	95%	61.20%	80%	77.4%	82.1%	82,1%	0.72	0.91	0.86	0.89	0.86
78.	Persentase anak usia sekolah dasar (BIAS) yang mendapatkan imunisasi				92%	93%	94%	95%	96%	-	88.5%	96.8%	95.7%	90.2%		0.95	1.03	1.01	0.94
79.	Angka non acute flaccid (AFP) pada anak usia <15 tahun per 100.000 penduduk				>2	>2	>2	>2	>2	2.26	2.18	2.11	2.2	1.8	1.00	1.00	1.00	1.00	0,90
80.	Persentase penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB <24 jam pada desa/kei yang terjadi KLB				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.7%	100%	100%	1.00	1.00	0.92	1.00	1.00
81.	Persentase kab/kota yang melakukan penanganan dan penanggulangan wabah dan bencana				33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
82.	Persentase kab/kota yang melaksanakan surveillans deteksi dini dan KIE penyakit tidak menular				33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	30 K/K	-	33 K/K	33 K/K	33 K/K	0.91	-	1.00	1.00	1.00
83.	Jumlah kab/kota melaksanakan mapping vector penyakit				30%	40%	50%	60%	70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
84.	Jumlah kab/kota yang melaksanakan surveilans dan KIE kesehatan mitra	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
85.	Jumlah RSUD yang menyelenggarakan PONEK	21 RSUD	24 RSUD	27 RSUD	30 RSUD	34 RSUD	34 RSUD	34 RSUD	34 RSUD	20 RSUD	24 RSUD	27 RSUD	28 RSUD		0.95	1.00	1.00	0.93	
86.	Jumlah RSUD yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar	21 RSUD	24 RSUD	27 RSUD	30 RSUD	34 RSUD	34 RSUD	30 RSUD	34 RSUD	19 RSUD	24 RSUD	27 RSUD	28 RSUD		0.90	1.00	1.00	0.93	
87.	Jumlah RSUD yang menerapkan PPK-BLUD	8 RSUD	11 RSUD	13 RSUD	15 RSUD	17 RSUD	17 RSUD	15 RSUD	17 RSUD	9 RSUD	12 RSUD	15 RSUD	18 RSUD		1.12	1.09	1.15	1.00	
88.	Jumlah RSUD yang menerapkan SPM rumah sakit	21 RSUD	23 RSUD	25 RSUD	29 RSUD	24 RSUD	24 RSUD	29 RSUD	24 RSUD	20 RSUD	23 RSUD	25 RSUD	30 RSUD		0.95	1.00	1.00	1.03	
89.	Jumlah RSUD yang menerapkan program keselamatan pasien	6 RSUD	10 RSUD	14 RSUD	18 RSUD	20 RSUD	20 RSUD	18 RSUD	20 RSUD	-	-	14 RSUD	22 RSUD		-	-	1.00	1.22	
90.	Jumlah RS yang terakreditasi	78 RS	82 RS	86 RS	90 RS	94 RS	94 RS	90 RS	94 RS	74 RS	80 RS	94 RS	126 RS		0.95	0.97	1.09	1.40	
91.	Jumlah RS yang mendapatkan penetapan kelas	135 RS	155 RS	175 RS	195 RS	205 RS	205 RS	195 RS	205 RS	99 RS	120 RS	168 RS	201 RS		0.73	0.77	0.96	1.03	
92.	Jumlah RS yang menerapkan standar sarana dan prasarana	92 RS	102 RS	112 RS	122 RS	132 RS	132 RS	122 RS	132 RS	89 RS	102 RS	110 RS	116 RS		0.97	1.00	0.98	0.95	
93.	Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	64.9%	100%	95%	95%	98%	0.72	1.05	1.00	1.00	1.03
94.	Persentase penetapan angka kredit jabatan fungsional	20%	30%	70%	80%	100%	100%	80%	100%	20%	30%	45%	80%	85%	1.00	1.00	0.64	1.00	0.85
95.	Jumlah pelatihan kesehatan aparatur dan non aparatur yang diakreditasi	20 plthn	25 plthn	30 plthn	35 plthn	40 plthn	40 plthn	35 plthn	40 plthn	20 plthn	20 plthn	40 plthn	32 plthn	38 plthn	1.00	0.80	1.33	0.91	0.95

No.	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	Target NSPK (3)	Target IKK (4)	Target indikator lainnya (5)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada tahun				
					2014 (6)	2015 (7)	2016 (8)	2017 (9)	2018 (10)	2014 (11)	2015 (12)	2016 (13)	2017 (14)	2018 (15)	2014 (16)	2015 (17)	2016 (18)	2017 (19)	2018 (20)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
96.	Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan saka bakti husada (SBH)				14 K/K	20 K/K	24 K/K	29 K/K	33 K/Ka	-	14 K/K	14 K/K	28 K/K	28 K/K	-	0.70	0.58	0.96	0.85
97.	Persentase RSUD yang memenuhi standar ketenagaan dokter spesialis penunjang				50%	60%	70%	80%	100%	-	-	3%	78.98%	81.8%	-	-	0.04	0.99	0.82
98.	Rasio tenaga medis per Puskesmas				Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	0.92	0.92	0.95	1	1	0.92	0.92	0.95	1.00	1.00
99.	Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan				75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%		1.33	1.25	1.18	1.11	
100	Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan				60%	70%	82%	90%	85%	49.61%	58.82%	61.86%	68.63%		0.83	0.84	0.75	0.76	
101	Jumlah kab/ kota yang bekerja sama dengan BPJS				5 K/K	11 K/K	17 K/K	24 K/K	30 K/K	-	-	30 K/K	33 K/K		-	-	1.76	1.37	
102	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran kesehatan yang dihasilkan per tahun				3 dok.	5 dok.	5 dok.	5 dok.	5 dok.	5 dok.	5 dok.	5 dok.	5 dok.		1.67	1.00	1.00	1.00	
103	Jumlah dokumen monitoring, pengendalian dan evaluasi yang dihasilkan per tahun				7 dok.	7 dok.	7 dok.	7 dok.	7 dok.	7 Dok.	9 Dok.	7 Dok.	9 Dok.		1.00	1.28	1.00	1.28	
104	Persentase kab/kota memiliki profil kesehatan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		1.00	1.00	1.00	1.00	
105	Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan				33	33	33	33	33	33	33	33	33		1.00	1.00	1.00	1.00	
106	Jumlah penelitian dan pengembangan kesehatan yang dilaksanakan				3 pnltn	6 pnltn	9 pnltn	12 pnltn	3 pnltn	-	-	-	-						

Tidak semua indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 berhasil dicapai oleh Provinsi Sumatera Utara. Di samping itu, dari total 106 indikator kegiatan pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, beberapa diantaranya belum mencapai target sebagaimana ditetapkan.

Tidak tercapainya target Umur Harapan Hidup (UHH) disebabkan oleh berbagai permasalahan pada setiap tahapan upaya kesehatan, terutama terkait kesehatan ibu dan anak. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan para ibu akan pentingnya melakukan kontrol rutin sejak masa kehamilan sampai nifas serta terbatasnya akses dan mutu kepada pelayanan kesehatan maternal dan neonatal yang berkualitas berkontribusi terhadap tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Situasi pengendalian penyakit belum menunjukkan kondisi yang optimal. Target indikator "Persentase desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI)" dan "Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap" belum tercapai. Pengendalian penyakit Tuberkulosis (TBC) juga belum memadai, terlihat dari capaian indikator "Angka *case detection rate* penyakit TB" dan "Angka keberhasilan pengobatan TB" yang masih di bawah target yang telah ditetapkan. Namun demikian, upaya pengendalian penyakit HIV/AIDS dan infeksi menular seksual (IMS) menunjukkan kinerja yang menggembirakan, terutama pada pencapaian indikator penyediaan ARV bagi ibu hamil dengan status HIV positif, pengobatan ART bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), serta pemeriksaan dan pengobatan kasus-kasus IMS.

Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) di Provinsi Sumatera Utara diselenggarakan melalui surveilans deteksi dini serta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) PTM di seluruh kabupaten/kota. Dalam rangka peningkatan pengendalian PTM, telah dibentuk Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) sebagai salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Sampai dengan tahun 2017, terdapat 1.839 Posbindu di Provinsi Sumatera Utara.

Pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan terhadap Tempat-Tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) sebagai bagian upaya penyehatan lingkungan sudah cukup baik. Sanitasi Total Berbasis



Masyarakat (STBM) telah diimplementasikan di 1.942 desa/kelurahan (31.77%), dimana 677 desa/kelurahan (34.86%) telah ditetapkan sebagai desa STBM dan 508 desa/kelurahan (26.16%) telah dinyatakan sebagai desa SBS/Stop BABS (Stop Buang Air Besar Sembarangan). Masih dibutuhkan kerja sama dan upaya bersama lintas sektor dalam mewujudkan seluruh desa/kelurahan sebagai desa STBM.

Kerja sama dan upaya bersama lintas sektor juga dibutuhkan dalam upaya pengendalian masalah gizi masyarakat. Permasalahan gizi dapat terjadi pada semua kelompok umur, namun ketidakcukupan gizi pada periode emas (*golden period*), yaitu pada usia 0-2 tahun termasuk saat janin, perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Permasalahan gizi pada kelompok bayi dan balita akan berpengaruh pada semua aspek kualitas kehidupannya pada tingkatan usia berikutnya bila tidak ditangani dengan adekuat. Permasalahan gizi buruk dan *stunting* (pendek dan sangat pendek) membutuhkan intervensi spesifik di bidang kesehatan dan intervensi sensitif yang memerlukan sinergisme lintas sektor dalam hal penanganan kesehatan lingkungan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Prevalensi *stunting* pada balita di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan dari 42.5% (Riskesdas, 2013) menjadi 32.3% (Riskesdas, 2018). Namun demikian, prevalensi *stunting* pada balita masih di atas prevalensi *stunting* nasional, yaitu 30.8%, dan masih lebih tinggi dari yang disarankan Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) sebesar 20.0%.

2.3.2. Kinerja Anggaran

Urusan kesehatan merupakan urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan agar Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD di luar gaji. Selain APBD Provinsi Sumatera Utara, sumber daya keuangan untuk pembiayaan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan jajarannya juga berasal sumber dana APBN Dekonsentrasi, dana transfer daerah, serta pembiayaan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Utara

Uraian***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendapatan Daerah	1.654.734.640	3.769.502.250	5.246.480.600	5.249.664.600	5.249.664.600	2.963.094.649	4.997.156.559	5.202.725.971	6.183.497.900	8.110.176.108	1.79	1.32	0.99	1.18	1.54		
Pendapatan Asli Daerah	1.654.734.640	3.769.502.250	5.246.480.600	5.249.664.600	5.249.664.600	2.963.094.649	4.997.156.559	5.202.725.971	6.183.497.900	8.110.176.108	1.79	1.32	0.99	1.18	1.54		
Hasil Retribusi Daerah	1.654.734.640	3.769.502.250	5.246.480.600	5.249.664.600	5.249.664.600	2.963.094.649	4.997.156.559	5.202.725.971	6.183.497.900	8.110.176.108	1.79	1.32	0.99	1.18	1.54		

Uraian***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Daerah	291.175.574.750	223.633.669.000	301.266.614.936	352.451.168.069	431.786.511.011	236.819.637.844	193.421.222.272	253.989.176.838	320.278.722.637	400.537.224.432	0.81	0.86	0.84	0.91	0.93		
Belanja Tidak Langsung	98.579.398.000	95.139.982.000	109.991.920.000	107.537.668.000	125.948.879.000	82.634.106.156	84.929.982.000	90.417.312.137	104.520.820.384	121.752.163.617	0.84	0.89	0.82	0.97	0.97		
Belanja Pegawai	98.579.398.000	95.139.982.000	107.537.668.000	107.537.668.000	125.948.879.000	82.634.106.156	84.929.982.000	90.417.312.137	104.520.820.384	121.752.163.617	0.84	0.89	0.82	0.97	0.97		

Uraian***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Langsung	192.596.176.750	128.493.687.000	191.274.694.936	244.913.500.069	305.837.632.011	154.185.531.688	108.491.240.272	163.571.864.701	215.757.902.253	278.785.060.815	0.80	0.84	0.85	0.88	0.91		
Belanja Pegawai	3.755.240.000	7.797.665.000	4.718.444.000	2.461.710.000	2.160.720.000	3.253.075.000	5.279.047.200	3.899.769.112	2.086.020.000	2.019.420.000	0.87	0.68	0.83	0.85	0.93		
Belanja Barang dan Jasa	178.199.975.650	115.841.435.400	159.435.589.996	199.456.270.208	264.114.642.523,81	142.430.497.346	99.291.436.247	141.449.069.494	182.351.467.983	253.205.472.669	0.80	0.86	0.89	0.91	0.96		
Belanja Modal	10.640.761.100	4.854.586.600	27.120.660.940	42.995.519.861	39.562.269.487,19	8.501.959.342	3.761.536.800	18.222.126.095	31.320.414.270	23.560.168.146	0.80	0.77	0.97	0.73	0.59		

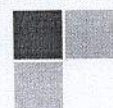
Realisasi pendanaan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara baik dari sisi pendapatan maupun belanja menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari rasio antara realisasi terhadap anggaran dari tahun ke tahun.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan UPT pada tahun 2013-2018 secara umum dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sulitnya mendapatkan gambaran yang tepat mengenai sasaran pelaksanaan kebijakan pembangunan, masih kurang selarasnya intervensi terhadap permasalahan kesehatan, dan kekurangmampuan dalam melakukan pemetaan rencana tindak lanjut yang bersifat holistik dan berkesinambungan. Dari setiap permasalahan, dilakukan identifikasi terhadap tantangan dan peluang bagi pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara beserta jajarannya.

Identifikasi terhadap tantangan merupakan identifikasi terhadap kendala yang bersifat negatif yang akan dihadapi oleh suatu organisasi yang apabila berhasil diatasi akan memberikan peran yang besar dalam mencapai tujuan organisasi. Peluang merupakan suatu keadaan positif, yang apabila dimanfaatkan oleh suatu organisasi, dapat memberikan dampak yang besar terhadap tujuan organisasi. Analisa terhadap kedua faktor tersebut bermanfaat untuk melakukan perencanaan dalam upaya mengantisipasi masa depan, dengan melakukan pengkajian berdasarkan pengalaman masa lampau dan didukung dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki saat ini, yang selanjutnya diproyeksikan ke pengembangan pelayanan yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan jajarannya di masa mendatang.

Tantangan yang dijumpai dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara antara lain tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan di fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin meningkat, fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terakreditasi, jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang masih terbatas, sistem informasi kesehatan yang belum terintegrasi, intervensi permasalahan dan perencanaan kesehatan yang belum didasarkan pada data yang akurat, dukungan dan komitmen lintas



sektor yang masih kurang, kesadaran masyarakat mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang masih rendah, serta penolakan/stigma yang masih ditemukan di masyarakat akibat informasi kesehatan yang belum adekuat.

Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dapat dikembangkan dengan memanfaatkan peluang yang ada, seperti adanya instruksi Gubernur terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), komisi pendukung program kesehatan (Join Health Council/JHC), regulasi mengenai penanggulangan masalah kesehatan (Kawasan Tanpa Rokok), regulasi terkait pelayanan kesehatan rujukan regional, kemudahan akses internet dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, serta meningkatnya ketersediaan obat dan alat kesehatan di e-catalog.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisa hasil capaian kinerja selama tahun 2013-2018 serta identifikasi terhadap tantangan dan peluang yang ada, permasalahan utama yang dihadapi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah terdapatnya kesenjangan antara capaian berbagai indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan serta tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut. Kesenjangan capaian kinerja secara umum terlihat dari indikator Umur Harapan Hidup (UHH) yang merupakan salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang dipengaruhi oleh upaya-upaya kesehatan ibu dan anak yang diukur melalui Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta status gizi (*stunting*). Pencapaian AKI, AKB, *stunting* (pendek dan sangat pendek) dan beberapa indikator pembangunan Kesehatan yang belum mencapai target masih menjadi permasalahan di Provinsi Sumatera Utara.

Permasalahan utama tersebut menjadi dasar bagi penyusunan strategi dan kebijakan pengembangan pelayanan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada periode tahun 2019-2023.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

No.	Isu Strategis	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat	1. Masih rendahnya kualitas kesehatan ibu dan anak	1.1. Masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan 1.2. Belum optimalnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) 1.3. Belum optimalnya perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi 1.4. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dengan pendekatan <i>continuum of care</i>	• Masih rendahnya kapasitas petugas dalam tatalaksana kesehatan ibu dan anak • Belum optimalnya pemanfaatan buku kesehatan ibu dan anak (KIA) • Belum optimalnya pelaksanaan Pemantauan Wilayah Setempat kesehatan ibu dan anak (PWS-KIA) • Belum optimalnya Audit Maternal dan Perinatal (AMP) • Belum optimalnya program perencanaan persalinan

				dan pencegahan komplikasi (P4K) • Masih rendahnya cakupan Puskesmas PONE (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) • Belum optimalnya upaya kesehatan anak usia sekolah • Belum optimalnya upaya kesehatan reproduksi pada wanita dan remaja
		2. Masih rendahnya status gizi masyarakat	2.1. Tingginya kasus gizi buruk, gizi kurang, <i>wasting</i> (kurus), dan <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) 2.2. Terbatasnya kapasitas petugas gizi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 2.3. Belum optimalnya koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam penanggulangan masalah gizi	• Masih rendahnya upaya suplementasi gizi • Masih rendahnya kapasitas petugas gizi • Belum optimalnya surveilans gizi dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) • Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam penanggulangan masalah gizi • Belum optimalnya Pemantauan Status Gizi (PSG) masyarakat
		3. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit	3.1. Tingginya kejadian penyakit menular dan tidak menular 3.2. Rendahnya cakupan dan mutu imunisasi 3.3. Belum optimalnya surveilans dan deteksi dini penyakit 3.4. Tingginya kejadian bencana dan/atau kegawatdaruratan kesehatan 3.5. Masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan 3.6. Masih terbatasnya tenaga kesehatan promotif dan preventif di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 3.7. Masih terbatasnya penggunaan obat rasional (POR) 3.8. Belum optimalnya pemenuhan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) di fasilitas pelayanan kesehatan 3.9. Masih rendahnya mutu sarana pelayanan kesehatan 3.10. Masih rendahnya peran serta masyarakat dan swasta dalam bidang kesehatan 3.11. Masih rendahnya kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan	• Belum optimalnya penemuan dan deteksi dini penyakit menular dan tidak menular, termasuk faktor risiko • Masih rendahnya kapasitas petugas dalam tatalaksana penyakit menular dan tidak menular, imunisasi, serta surveilans penyakit • Belum optimalnya kerja sama lintas sektor dan lintas program dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, imunisasi, serta surveilans penyakit • Belum optimalnya kinerja pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana serta situasi KLB Provinsi • Masih rendahnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) • Masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan pada Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), dan pesantren. • Belum optimalnya pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan • Belum optimalnya perencanaan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan • Masih rendahnya kapasitas teknis dan fungsional tenaga kesehatan • Belum optimalnya upaya kesehatan usia lanjut



				• Belum optimalnya upaya kesehatan kerja dan olahraga • Masih rendahnya mutu intitusi penyelenggara pelatihan kesehatan • Belum optimalnya kinerja pelayanan kefarmasian • Masih terbatasnya ketersediaan dan keterjangkauan sediaan farmasi • Masih terbatasnya Sarana, Prasarana, dan Alat kesehatan (SPA) di fasilitas pelayanan kesehatan • Masih adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terakreditasi • Masih terbatasnya kapasitas petugas dalam pelaksanaan akreditasi • Belum optimalnya promosi kesehatan dan kampanye hidup sehat • Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan • Belum optimalnya kemitraan dan kerja sama bidang kesehatan dengan lintas sektor dan dunia usaha • Belum optimalnya pengelolaan Saka Bakti Husada (SBH) • Masih terbatasnya anggaran penyediaan premi jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu • Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan
--	--	--	--	--

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dituntut untuk mampu dan cakap dalam menjawab setiap tantangan dan mengadaptasi peluang yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi terhadap permasalahan pada pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, termasuk faktor-faktor penghambat dan pendorongnya, agar setiap program yang dilaksanakan mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.



- Visi** : Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat
- Misi** :
 1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;
 2. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi social yang kuat serta harmonis;
 3. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri;
 4. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia;
 5. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab.

Dari kelima misi tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melakukan telaah terhadap Misi pertama untuk dapat mendukung pencapaian-pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Tabel 3.2
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi : Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat				
No.	Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;			
1.1	Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas	• Belum seluruh masyarakat memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan	• Belum semua pemberi kerja menyediakan jaminan pemeliharaan kesehatan melalui BPJS. • Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam BPJS Kesehatan	• Adanya regulasi yang mengatur pemanfaatan DBH-CHT untuk penyediaan JKN dan SE Gubernur ke pelaku usaha
		• Fasilitas pelayanan kesehatan, laboratorium kesehatan, dan fasilitas pelatihan kesehatan belum memenuhi standar.	• Keterbatasan lahan serta bangunan UPT. RS/RSK • Sarana, prasarana dan Alkes (SPA) pada fasilitas kesehatan dan labkes belum memenuhi standar. • Sarana dan prasarana pada fasilitas pelatihan kesehatan belum adekuat	• Upaya penyediaan SPA yang mutakhir tercantum dalam strategi peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas pada RPJMD Provsu 2019-2023

		Masih terbatasnya penggunaan teknologi dan sistem informasi	Sistem informasi yang ada belum terintegrasi	Penguatan implementasi <i>e-government</i> di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
		Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata serta penggunaan analisa jabatan dan Analisa Beban Kerja (ABK) yang belum maksimal dalam pengelolaan sumber daya manusia	- Letak geografis yang sulit dijangkau dan jauh dari ibukota Provinsi. - Rendahnya retensi dan tingginya <i>turn over</i> pegawai - Analisa jabatan dan Analisa Beban Kerja (ABK) belum disusun secara cermat dan belum digunakan dengan maksimal	Rekrutmen tenaga CPNS berdasarkan jabatan fungsional
		Masih lemahnya praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta lingkungan kantor dan fasilitas kesehatan yang belum bebas dari asap rokok (Kawasan Tanpa Rokok)	Masih rendahnya kesadaran dalam praktik PHBS	- Peraturan Gubernur terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) - Peraturan/Instruksi Gubernur tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) - Mitra Germas
		Manajemen aset dan persediaan yang belum optimal	Banyak aset yang tersebar di kabupaten/kota belum dilakukan proses hibah, dan banyak asset yang telah berpindah tangan	Efisiensi penggunaan anggaran
		Manajemen perkantoran di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang belum terselenggara dengan optimal	- Luas ruangan yang ada tidak sebanding dengan jumlah pegawai. - Bangunan kantor belum mendukung praktik manajemen perkantoran yang baik	Tersedianya <i>Detailed Engineering Design</i> (DED) pembangunan gedung kantor.

3.3. Telaahan Renstra K/L

Dalam menyusun Rencana Strategis tahun 2018-2023, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melakukan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Kesehatan RI tahun 2015-2019 dalam rangka menjamin keselarasan pembangunan kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan arah pembangunan kesehatan di tingkat nasional. Berikut disajikan hasil telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI dengan kondisi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.



Tabel 3.3
Telaahan Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan RI Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Kementerian Kesehatan	Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kesehatan masyarakat			
a.	Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 85%	Capaian Persalinan di fasilitas kesehatan di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup baik. Namun demikian, perlu perhatian terhadap persalinan berisiko tinggi yang memerlukan penanganan di rumah sakit	Beberapa kehamilan berisiko tinggi teridentifikasi pada saat proses persalinan, sehingga membutuhkan waktu untuk koordinasi dan pengelolaan rujukannya	Dukungan anggaran Jaminan persalinan (Jampersal), Rumah Sakit rujukan regional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2017 serta ketersediaan jaminan akses dan kualitas pelayanan melalui JKN.
b.	Menurunnya persentase ibu hamil kurang energi kronik sebesar 18,2%	Identifikasi dan kontinuitas perawatan bagi sasaran masih menemukan kendala	Sistem pengawasan yang belum optimal oleh unsur non kesehatan di masyarakat terhadap perkembangan dan kemajuan perawatan dari ibu hamil KEK	Tersedianya suplementasi Bumil, implementasi <i>e-ppbgm</i> ,
c.	Meningkatnya persentase kabupaten dan kota yang memiliki kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar 80%	Implementasi kebijakan PHBS yang masih menjadi tanggung jawab unsur kesehatan	Komitmen dan kemitraan lintas sektor yang belum diatur dalam regulasi tingkat Provinsi dan kab/kota	Dana Desa serta komitmen dan kemitraan lintas sektor sebagai mitra Germas
2.	Meningkatnya pengendalian penyakit			
a.	Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan sebesar 40%	Kemitraan berkelanjutan yang masih sulit dijalin dengan lintas program dan lintas sektor dalam pengendalian kesehatan lingkungan	Perangkat daerah menggunakan analisa dan pendekatan yang berbeda dalam prioritisasi intervensi, sehingga menimbulkan ketidakselarasan pada lokus dan <i>timeline</i>	Regulasi teknis terkait pengendalian kesehatan lingkungan
b.	Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) tertentu sebesar 40%	Rendahnya cakupan imunisasi	Tingginya mobilitas penduduk dan keengganan terhadap layanan imunisasi	Akses yang mudah terhadap layanan imunisasi
c.	Kab/kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kegawatdaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100%	Data bersumber dari Fasilitas kesehatan tingkat pertama swasta sulit diperoleh dan diidentifikasi	Belum tersedia mekanisme pelaporan secara <i>real-time</i> untuk kasus berpotensi wabah dari FKTP milik swasta	Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) untuk surveilans penyakit menular sampai level desa/ kelurahan

No.	Sasaran Jangka Menengah Kementerian Kesehatan	Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
d.	Menurunnya prevalensi merokok pada usia ≤18 tahun sebesar 5.4%	Survei perilaku merokok pada penduduk usia ≤18 tahun tidak dilakukan secara rutin	Skrining kesehatan hanya dilakukan bagi peserta didik usia sekolah kelas 1, 7, dan 10. Sedangkan bagi penduduk usia ≤18 tahun non peserta didik tidak dilakukan skrining.	Kebijakan skrining kesehatan bagi usia sekolah kelas 1, 7, dan 10
3.	Meningkatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan			
a.	Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi sebanyak 5.600	Pemenuhan terhadap standar untuk memenuhi kriteria siap melakukan akreditasi Puskesmas	Terbatasnya jumlah pendamping akreditasi, masih banyaknya jumlah Puskesmas yang akan diakreditasi, serta tingginya jadwal akreditasi.	Mekanisme pembinaan dan pendampingan teknis akreditasi
b.	Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi sebanyak 481 kab/kota	Belum semua RSUD terakreditasi	Terbatasnya jumlah SDM di RSUD	Mekanisme pembinaan teknis akreditasi
4.	Meningkatnya pengendalian penyakit			
a.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 90%	Tidak semua obat yang dibutuhkan dapat terpenuhi melalui proses pengadaan obat	Kapasitas produksi obat pada produsen obat belum dapat mengimbangi tingginya permintaan obat	Dukungan anggaran penyediaan obat buffer stock, vaksin, dan BMHP
b.	Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat kesehatan yang diproduksi dalam negeri sebanyak 35 jenis	Tidak relevan dan tidak menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara		
c.	Persentase produk alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) di peredaran yang memenuhi syarat sebesar 83%	Pengawasan yang belum maksimal terhadap produk PKRT, mengingat perizinan PKRT diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam perizinan	Sulit dalam melakukan <i>updating</i> data PKRT yang sudah memperoleh perizinan	Pelibatan Dinas Kesehatan oleh Perangkat Daerah terkait perizinan dalam pemeriksaan teknis
5.	Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan			
a.	Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan sebanyak 5.600 Puskesmas	Distribusi tenaga kesehatan belum merata, sehingga masih ada Puskesmas yang belum memenuhi 5 jenis tenaga	Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas, mengakibatkan timbulnya <i>over-burdened</i> karena mendapatkan tugas tambahan di luar tugas pokok dan fungsi	
b.	Persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar 60%	Belum semua RSUD kelas C memenuhi minimal ketersediaan dimaksud		

No.	Sasaran Jangka Menengah Kementerian Kesehatan	Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
6.	Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga			
a.	Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung pembangunan kesehatan	Tidak relevan dan tidak menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara		
b.	Meningkatnya persentase kab/kota yang mendapat predikat baik dalam pelaksanaan SPM sebesar 80%	SPM Kesehatan sesuai PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM baru mulai berlaku per 1 Januari 2019. Dengan demikian, belum dilakukan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan SPM		Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan amanat Permendagri terkait pengalokasian anggaran pemenuhan SPM pada APBD
7.	Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri			
a.	Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk program kesehatan sebesar 20%	Tidak relevan dan tidak menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara		
b.	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan sebanyak 15	Tidak relevan dan tidak menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara		
8.	Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan evaluasi			
a.	Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber sebanyak 34 Provinsi	Belum maksimalnya sinkronisasi sumber pembiayaan bersumber APBN	Waktu penyusunan APBN belum selaras dengan penyusunan APBD	Dokumen penganggaran bersumber APBN terbit tepat waktu
b.	Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu sebanyak 100 rekomendasi	Tidak relevan dan tidak menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara		
9.	Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan			
a.	Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI sebanyak 35 buah	Tidak relevan dan tidak menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara		
b.	Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola program kesehatan dan atau pemangku kepentingan sebanyak 120 rekomendasi	Hasil penelitian belum dijadikan rujukan dalam menyusun rekomendasi dan kebijakan kesehatan		
c.	Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) bidang kesehatan dan gizi masyarakat sebanyak 5 laporan	Tidak relevan dan tidak menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara		
a.	Persentase satuan kerja yang dilakukan audit memiliki temuan kerugian Negara ≤1% sebesar 100%	Tidak relevan dan tidak menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara		
b.	Meningkatnya persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik sebesar 94%	Tidak relevan dan tidak menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara		



No.	Sasaran Jangka Menengah Kementerian Kesehatan	Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
12.	Meningkatkan system informasi kesehatan integrasi			
a.	Meningkatnya persentase kab/kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu sebesar 80%	Masih ditemukan perbedaan data antara masing-masing pengelola program dengan data pada pengelola data dan informasi	Sistem informasi yang terintegrasi belum berjalan	
b.	Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk akses pelayanan e-health sebesar 50%	Data pelayanan bersumber fasilitas pelayanan kesehatan swasta belum terintegrasi		

Dari tabel 3.3 di atas terlihat bahwa tidak semua indikator pada Renstra Kementerian Kesehatan RI menjadi indikator Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Perkembangan yang sangat dinamis dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik berimplikasi terhadap perubahan pemanfaatan dan penggunaan ruang, dan Provinsi Sumatera Utara memerlukan penyesuaian terhadap perkembangan struktur dan pola ruang tersebut. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mengamanatkan penggunaan instrument Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Penelaahan terhadap dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu dilakukan untuk dapat menghitung implikasinya terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.



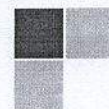
3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Perumusan substansi RTRW Provinsi Sumatera Utara dimaksudkan untuk menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penataan ruang Provinsi Sumatera Utara adalah **"Mewujudkan Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang Sejahtera, Merata, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan"** dengan substansi meliputi antara lain (a) Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi, (b) Rencana struktur ruang wilayah Provinsi yang meliputi rencana sistem perkotaan, rencana sistem jaringan transportasi, rencana sistem jaringan energi, rencana sistem jaringan telekomunikasi, rencana sistem jaringan sumber daya air, serta rencana sistem jaringan prasarana lingkungan, (c) Rencana pola ruang wilayah Provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya, (d) Penetapan kawasan strategis Provinsi, (e) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, dan (f) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi system Provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah serangkaian analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan program (RKP).



Tabel 3.4
Telaahan KLHS Terhadap Kebutuhan dan Pengembangan Pelayanan
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

No.	Isu Strategis	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
1.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanggulangan bencana	Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Beberapa fasilitas pelayanan kesehatan berada pada daerah rawan bencana.	Dinas Kesehatan perlu meningkatkan optimalisasi dan penguatan pelayanan kesehatan serta pengendalian vektor dan penyakit pada kejadian bencana, krisis kesehatan, Kejadian Luar Biasa (KLB) serta masalah kesehatan lain yang berpotensi menjadi wabah.	Penguatan dan optimalisasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) yang menggunakan system pelacakan berbasis lokasi secara <i>real time</i> yang didukung dengan surveilans laboratorium kesehatan masyarakat. Pengembangan pelayanan pra Rumah Sakit melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) serta penyediaan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang komprehensif dan terintegrasi dengan akses kepada lokasi kawasan evakuasi bencana.
2.	Peningkatan ketahanan pangan, air, dan energi	Aktivitas pelayanan kesehatan oleh institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah dan swasta menghasilkan limbah medis dan non medis, baik dalam bentuk cair maupun padat. Limbah medis yang tidak diolah sesuai standar secara tidak langsung akan memberikan dampak yang signifikan pada kualitas air.	Rendahnya ketersediaan air bersih bagi masyarakat akan berdampak pada rendahnya higienitas dan kesehatan lingkungan, yang selanjutnya dapat menjadi sumber masalah kesehatan terutama bagi penularan penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah.	Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Provinsi Sumatera Utara harus semakin ditingkatkan, dengan pelibatan lintas sektor dan implementasi rencana aksi. Fasilitas kesehatan juga harus dilakukan pembinaan dan pengawasan secara ketat, utamanya pada aspek pengolahan limbahnya.
3.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan kesempatan berusaha		Rendahnya mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan berimplikasi pada kualitas penyelenggaraan sistem kesehatan dan rendahnya mutu pelayanan kesehatan yang disediakan di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan. Di sisi lain, pertumbuhan sarana pelayanan kesehatan perlu didorong dalam rangka meningkatkan rasio pelayanan kesehatan (Puskesmas/ Pustu/ Klinik/ RS) terhadap penduduk.	Kompetensi dan kapasitas tenaga kesehatan harus senantiasa ditingkatkan dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang sesuai standar dan kebutuhan.



No.	Isu Strategis	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
4.	Peningkatan kualitas dan gaya hidup sehat, sejahtera, serta bebas dari kecacatan		Tren penyakit tidak menular (degeneratif) yang disebabkan oleh perilaku/gaya hidup yang tidak sehat semakin meningkat setiap tahunnya. Di sisi lain, kasus-kasus penyakit menular seperti Tuberkulosis, HIV/AIDS, Malaria, dlsb.) juga masih menghantui masyarakat Provinsi Sumatera Utara, ditambah lagi dengan munculnya penyakit-penyakit baru (<i>new emerging diseases</i>) seperti ZICA, MersCoV, Flu Burung, dll. Beberapa penyakit dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), dan cakupan imunisasi yang rendah akan berdampak pada hilangnya kesempatan untuk memperoleh kekebalan kolektif (<i>herd immunity</i>) terhadap suatu penyakit. Status gizi masyarakat juga berkontribusi terhadap perjalanan penyakit. Ketidacukupan gizi pada masa <i>golden period</i> (usia 0-2 tahun, termasuk saat janin) berkontribusi pada kejadian <i>stunting</i>. Tahun yang hilang (<i>Year Life Lost/YLL</i>) akibat kematian dini ataupun tahun kehidupan yang dijalani dalam kecacatan dan disabilitas (<i>Years Lived with Disability/YLD</i>) merupakan beban yang ditimbulkan oleh penyakit (menular dan tidak menular), disamping biaya yang tinggi (<i>high cost</i>) bagi upaya pengobatan dan penyembuhan penyakit.	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) harus senantiasa digaungkan melalui peningkatan kampanye hidup sehat dan praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di semua tatanan serta pelibatan lintas sektor dan mitra strategis dalam pelaksanaannya. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) harus dilaksanakan secara penuh, sehingga rencana intervensi kesehatan masyarakat dapat diselenggarakan berbasis data dan status kesehatan keluarga. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan harus dilaksanakan secara komprehensif bagi setiap penduduk semua usia dalam rangka menjamin terpenuhinya hak dasar warga negara. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta perbaikan gizi masyarakat perlu ditingkatkan. Akses kepada Sarana, Prasarana, dan Alat kesehatan (SPA) serta obat dan perbekalan kesehatan perlu ditingkatkan. Begitu juga halnya dengan pelaksanaan registrasi, akreditasi dan sertifikasi fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka menjamin mutu pelayanan kesehatan. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga perlu ditingkatkan dalam rangka terwujudnya <i>Universal Health Coverage</i> penduduk Provinsi Sumatera Utara.
5.	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Pengembangan fisik layanan kesehatan secara langsung ataupun tidak langsung akan berdampak pada keberlangsungan Sumber Daya Alam (SDA), terutama pada penggunaan daya listrik dan air tanah.	Rancangan pengembangan fisik layanan kesehatan harus dapat mempertimbangkan penggunaan daya listrik dan air tanah secara efisien. Penggunaan lahan juga harus memperhatikan AMDAL, Rencana Kota, dan kerentanan terhadap banjir.	Konsep <i>green building</i> dapat menjadi solusi dalam pemanfaatan SDA secara efisien dalam rangka pengembangan fisik layanan kesehatan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang yang berorientasi pada masa depan. Isu strategis selain sebagai suatu kondisi yang belum menjadi masalah saat ini tetapi berpotensi untuk menjadi masalah di masa depan, juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola yang mana jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Perangkat Daerah harus memperhatikan dan mengedepankan isu strategis dalam perencanaan pembangunan mengingat dampaknya yang signifikan di masa datang.

Memperhatikan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Kesehatan yang ditinjau terhadap capaian Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara periode sebelumnya, Renstra Kementerian Kesehatan, serta implikasi RTRW dan implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Kesehatan, maka diperoleh isu-isu kesehatan strategis di Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut: (a) kesehatan ibu, bayi, dan balita, mencakup di dalamnya penerapan prinsip pelayanan kesehatan sepanjang usia (*continuum of care*); (b) status gizi, mencakup di dalamnya beban ganda permasalahan gizi masyarakat; (c) kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; (d) kesakitan dan endemisitas penyakit menular, mencakup di dalamnya isu terkait kualitas kesehatan lingkungan dan kesehatan matra; (e) mutu dan akses pelayanan kesehatan, mencakup di dalamnya kesehatan tradisional, standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan, penguatan *Public Safety Center* (PSC), serta pemenuhan SPA di fasilitas pelayanan kesehatan; (f) mutu tenaga kesehatan, mencakup di dalamnya perencanaan, pendayagunaan dan pengembangan SDM kesehatan; (g) jaminan pembiayaan kesehatan; serta (h) bencana, wabah, dan kecelakaan, mencakup di dalamnya Kejadian Luar Biasa (KLB) dan krisis kesehatan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023 selanjutnya dititikberatkan terhadap isu-isu strategis tersebut yang diprioritaskan berdasarkan 6 (enam) kriteria penilaian dengan nilai bobot tertentu.



Tabel 3.5
Kriteria Penilaian Isu-isu Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2018-2023

No.	Kriteria Penilaian	Bobot (%)
1	2	3
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	15
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	20
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	10
Total		100

Isu strategis yang telah diidentifikasi selanjutnya dilakukan penilaian dengan menggunakan skala Linkert sebagai parameternya sebagai berikut:

- 1. Nilai 5 untuk skala sangat prioritas,
- 2. Nilai 4 untuk skala prioritas,
- 3. Nilai 3 untuk skala cukup prioritas,
- 4. Nilai 2 untuk skala kurang prioritas, dan
- 5. Nilai 1 untuk skala tidak prioritas

Berikut adalah skala prioritas untuk setiap isu strategis:

Tabel 3.6
Nilai Skala Prioritas Untuk Setiap Isu Strategis

No.	Isu Strategis/ Program Prioritas	Nilai Skala Terhadap Kriteria Ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Kesehatan ibu, bayi, dan balita	5	5	5	5	5	5	30
2.	Status gizi	5	4	5	5	5	5	29
3.	Kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular	4	4	4	4	4	4	24
4.	Kesakitan dan endemisitas penyakit menular	5	5	5	4	4	5	28
5.	Mutu dan akses pelayanan kesehatan	4	4	4	4	3	4	23
6.	Mutu tenaga kesehatan	4	4	4	3	3	3	21
7.	Jaminan pembiayaan kesehatan	4	3	3	3	4	3	20
8.	Bencana, wabah, dan kecelakaan	5	4	5	4	3	3	24

Untuk mendapatkan bobot setiap isu strategis, maka dilakukan perkalian nilai skala dengan bobot setiap isu strategis (tabel 3.5) dalam rangka menetapkan isu strategis yang paling prioritas dan menjadi dasar bagi penyusunan program dan kegiatan. Total bobot masing-masing isu strategis didapat dengan melakukan penjumlahan terhadap hasil perkalian seluruh skala kriteria pada isu strategis dengan bobot masing-masing kriteria seperti berikut:

Tabel 3.7
Perkalian Isu Strategis Terhadap Skala Prioritas

No.	Isu Strategis/ Program Prioritas	Nilai Skala Terhadap Kriteria Ke-						Total Skor	Rata-rata Skor
		1	2	3	4	5	6		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Kesehatan ibu, bayi, dan balita	125	75	100	50	100	50	500	83.33
2.	Status gizi	125	60	100	50	100	50	485	80.83
3.	Kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular	100	60	80	40	80	40	400	66.67
4.	Kesakitan dan endemisitas penyakit menular	125	75	100	40	80	50	470	78.33
5.	Mutu dan akses pelayanan kesehatan	100	60	80	40	60	40	380	63.33
6.	Mutu tenaga kesehatan	100	60	80	30	60	30	360	60.00
7.	Jaminan pembiayaan kesehatan	100	45	60	30	80	30	345	57.50
8.	Bencana, wabah, dan kecelakaan	125	60	100	40	60	30	415	69.17

Dari perhitungan di atas, maka dilakukan perbandingan terhadap total skor masing-masing isu strategis dimana isu strategis dengan skor terbesar menjadi prioritas utama. Adapun yang menjadi program prioritas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Prioritas Isu Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023

No.	Isu Strategis	Total Skor
1	2	3
1	Kesehatan ibu, bayi, dan balita	83.33
2	Status gizi	80.83
3	Kesakitan dan endemisitas penyakit menular	78.33
4	Bencana, wabah, dan kecelakaan	69.17
5	Kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular	66.67
6	Mutu dan akses pelayanan kesehatan	63.33
7	Mutu tenaga kesehatan	60.00
8	Jaminan pembiayaan kesehatan	57.50



Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara perlu melakukan langkah-langkah responsif terhadap seluruh isu-isu strategis tersebut dengan memerhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Di samping itu, isu kesehatan strategis di Provinsi Sumatera Utara adalah yang berkaitan dengan komitmen global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Terdapat 17 tujuan dan 169 target pada TPB/SDGs, dimana tujuan dan target tersebut menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global di tahun 2030. Sebagai bagian dari entitas global dan nasional, Provinsi Sumatera Utara, termasuk Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, harus memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi nafas dari seluruh rangkaian proses pembangunan di wilayahnya.

Gambar 3.1
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)



Dari 17 tujuan yang terdapat pada TPB/SDGs, terdapat beberapa tujuan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:



- Tujuan ke-1 : **Tanpa Kemiskinan**
Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
- Tujuan ke-2 : **Tanpa Kelaparan**
Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan;
- Tujuan ke-3 : **Kehidupan Sehat dan Sejahtera**
Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup bagi semua orang di segala usia;
- Tujuan ke-4 : **Air Bersih dan Sanitasi Layak**
Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang

Dari keempat tujuan tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menjadi *leading sector* dalam pencapaian indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 3.9
Matriks Tujuan, Target, dan Indikator TPB/SDGs yang Relevan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Target		Indikator	
1		2	
Tujuan ke-1 : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun			
1.3	Menerapkan secara nasional system dan upaya perlindungan social yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan control atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
		1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap
Tujuan ke-2 : Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian yang berkelanjutan			
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta	2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita
		2.2.1.(a)	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta

manula	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe
	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil
	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif
Tujuan ke-3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia		
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	
	3.1.1*	Angka kematian ibu (AKI)
	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
3.2	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup
	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup
	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup
	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberculosi, malaria, da penyakit tropis terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	
	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa
	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITb) per 100.000 penduduk
	3.3.3*	Kejadian malaria per 1.000 orang
	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria
	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk hepatitis B
	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (filariasis dan kusta)
	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta
3.4	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I)
	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	
	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun
	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi
	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun
	3.4.2*	Angka kematian (<i>incidence rate</i>) akibat bunuh diri
	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa

3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan
		3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau system kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk
		3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional
3.9	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan
3.a	Memperkuat pelaksanaan <i>The Framework Convention on Tobacco Control</i> WHO di seluruh Negara sebagai langkah yang tepat	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap Negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai The Doha Declaration tentang TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak Negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam kesepakatan atas aspek-aspek perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya menyediakan akses obat bagi semua	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di Negara berkembang, khususnya Negara kurang berkembang, dan Negara berkembang pulau kecil	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan
Tujuan ke-6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua			
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air
		6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
		6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan jangka menengah adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dan sasaran jangka menengah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dengan mengoperasionalkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Dalam Visi "**Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat**", terkandung makna :

Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama, dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

Maju, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta berpikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera;

Aman, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara merasa bebas dari bahaya gangguan dan terlindungi dari berbagai macam marabahaya dalam melaksanakan aktivitas keseharian;

Bermartabat, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek.

Gubernur dan Wakil Gubernur menitikberatkan cita-cita kesejahteraan sosial, termasuk urusan kesehatan, pada Misi ke-1 "**Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan**" karena memiliki iman dan takwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak,



pendidikan yang baik, **kesehatan yang prima**, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau”.

Misi tersebut diterjemahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ke dalam tujuan yang konsisten dengan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan dalam Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Sasaran dari Tujuan Misi ke-1 “Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat” yaitu “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” dijabarkan menjadi tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 4.1
Hubungan Tujuan dan Sasaran pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Umur Harapan Hidup (UHH)	68.54	68.72	68.89	69.07	70.00	70,00
2		Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	80,1	75,1	70,2	68,1	64,3	64,3
3			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,7
4		Meningkatnya status gizi masyarakat	Persentase balita <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek)	31,50	30,50	29,50	28,50	27,50	27,50
5		Menurunnya angka kesakitan	Angka kesakitan (morbiditas)	11,01	10,99	10,97	10,95	10,93	10,93

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan urusan kesehatan yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 menjadi dasar untuk penetapan pernyataan strategi dan arah kebijakan yang lebih khusus agar dapat menjawab semua permasalahan dan isu-isu strategis terkait urusan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara.

Berikut ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	: Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat		
Misi (1)	: Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan takwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	1.1. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu	• Peningkatan kapasitas petugas dalam tatalaksana kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas
			• Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi pada calon pengantin (Catin) dan pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR)
			• Peningkatan kemitraan dan kolaborasi lintas program/ lintas sektor dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas
		1.2. Meningkatkan pelayanan kesehatan anak	• Peningkatan kapasitas petugas dalam tatalaksana kesehatan bayi baru lahir (neonatal), bayi, balita, dan anak
			• Peningkatan tata kelola pelayanan kesehatan bayi baru lahir (neonatal), bayi, balita, dan anak
			• Peningkatan kemitraan dan kolaborasi lintas program/ lintas sektor dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir (neonatal), bayi, balita, dan anak
	2. Meningkatnya status gizi masyarakat	2.1. Meningkatkan upaya perbaikan gizi masyarakat	• Peningkatan cakupan dan mutu imunisasi serta penguatan PD3I (penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi)
			• Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam perbaikan gizi masyarakat
			• Peningkatan pendidikan gizi
			• Peningkatan surveilans gizi
			• Peningkatan suplementasi gizi



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	3. Menurunnya angka kesakitan	3.1. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit	• Penguatan surveilans dan karantina kesehatan serta penanggulangan wabah dan bencana • Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan vektor penyakit • Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
		3.2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan	• Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan pada Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), dan fasilitas pelayanan kesehatan • Implementasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di seluruh desa/kelurahan
		3.3. Meningkatkan perilaku hidup sehat	• Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di semua tatanan • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam pembangunan kesehatan
		3.4. Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan	• Peningkatan pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan
		3.5. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	• Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan laboratorium kesehatan • Peningkatan pelayanan kegawatdaruratan pra rumah sakit dan penguatan <i>Public Safety Center</i> (PSC) • Pemenuhan Sarana, Prasarana, dan Alat kesehatan (SPA) sesuai standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan • Penyediaan dukungan layanan medis bergerak (dokter terbang, bis medis) • Peningkatan pelayanan kesehatan usia lanjut • Peningkatan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga
		3.6. Meningkatkan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	• Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan mutu kefarmasian, alat kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) • Optimalisasi Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO)
		3.7. Meningkatkan mutu tenaga kesehatan	• Perencanaan, pendayagunaan, dan pengembangan SDM Kesehatan • Peningkatan kualitas institusi penyelenggara pelatihan kesehatan
		3.8. Meningkatkan kebijakan dan manajemen kesehatan	• Penguatan perencanaan, monitoring evaluasi, dan pengendalian • Peningkatan tata kelola Sistem Informasi Kesehatan dan informasi publik, serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) • Peningkatan humas dan hukum kesehatan • Peningkatan kemitraan dan kolaborasi lintas program/lintas sektor dalam pembangunan kesehatan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 disusun dengan menerjemahkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang tertuang dalam dokumen Ranwal RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Pelaksanaan setiap program akan dinilai secara terukur terhadap 1 (satu) atau lebih indikator kinerja program (*outcome*) dan pendanaan indikatif setiap tahunnya.

Penjabaran Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara ke dalam Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara kurun waktu 5 (lima) tahun. Program dan Kegiatan yang dirumuskan terdiri dari program generik dan program prioritas yang menggambarkan upaya Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara yang telah diselaraskan dengan Prioritas Nasional. Adapun program generik dan program prioritas yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

Program Generik

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

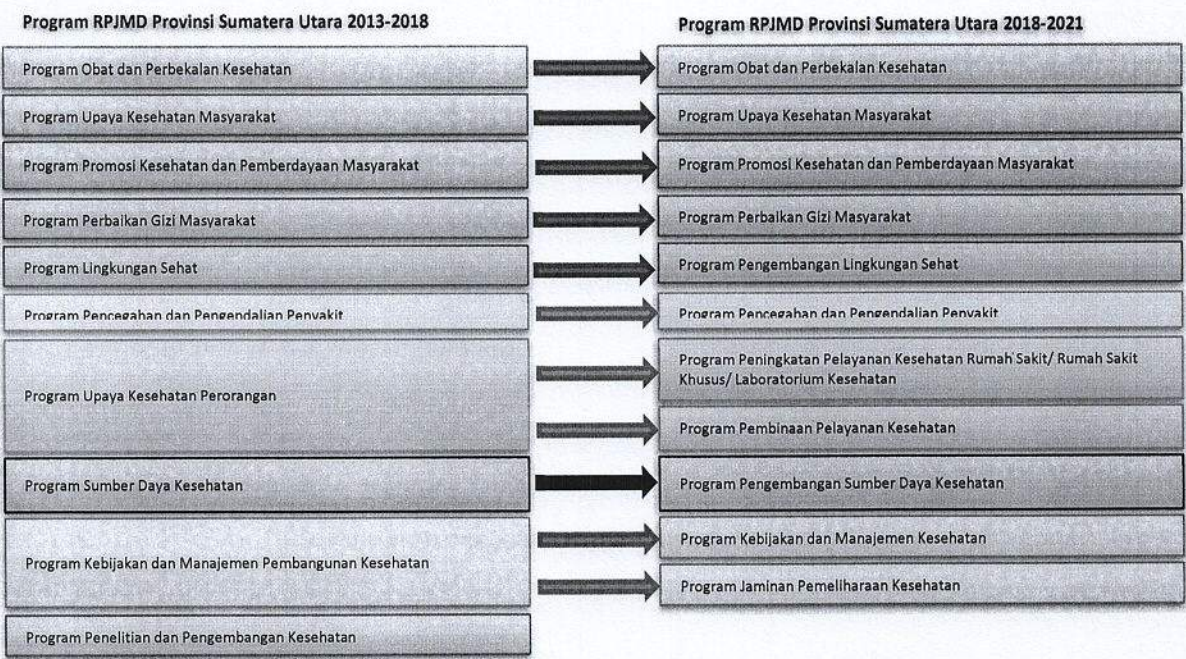
Program Prioritas

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
6. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- 7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit/ Rumah Sakit Khusus/ Laboratorium Kesehatan
- 8. Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
- 9. Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
- 10. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
- 11. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pada periode tahun 2018-2023, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melakukan transformasi program urusan kesehatan dengan melakukan reorganisasi program dan penyesuaian *nomenklatur* program. *Program Lingkungan Sehat* menjadi *Program Pengembangan Lingkungan Sehat*, *Program Upaya Kesehatan Perorangan* menjadi *Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit/ Rumah Sakit Khusus/ Laboratorium Kesehatan* dan *Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan*, *Program Sumber Daya Kesehatan* menjadi *Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan*, dan *Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan* menjadi *Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan*. Di samping itu, terdapat penambahan program baru, yaitu *Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan*.

Gambar 6.1
Transformasi Program Urusan Kesehatan Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023



Lima program generik dan 11 (sebelas) program prioritas yang dirumuskan pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 kemudian dijabarkan menjadi kegiatan beserta masing-masing indikator kinerja keluaran (*output*) dan pendanaannya sebagaimana terdapat pada lampiran Renstra.



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 ditampilkan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0 [2018]	Tahun 1 [2019]	Tahun 2 [2020]	Tahun 3 [2021]	Tahun 4 [2022]	Tahun 5 [2023]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan							
1.1	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	85,17%	90%	92%	94%	95%	96%	96%
1.2	Persentase Penggunaan Obat Rasional (POR) di Puskesmas	44,63%	49%	55%	60%	65%	70%	70%
1.3	Persentase sarana pelayanan kesehatan Pemerintah yang melaksanakan pelayanan kefarmasian	n/a	37%	40%	43%	46%	49%	49%
1.4	Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian serta makanan minuman yang dibina agar memenuhi standar GDP dan GMP	55%	60%	65%	70%	75%	80%	80%
1.5	Persentase sarana produksi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang menerapkan CPAKB, CPPKRTB, dan CDAKB	69%	74%	80%	84%	87%	90%	90%

2.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							
2.1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	86,3%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	85,4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.3	Cakupan pelayanan nifas	81,7%	84%	86%	88%	90%	92%	92%
2.4	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	88,6%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.5	Cakupan pelayanan balita sesuai standar	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.6	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.7	Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.8	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pembinaan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	40%	50%	55%	60%	65%	70%	70%
2.9	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	n/a	60%	65%	70%	75%	80%	80%
2.10	Persentase Fasyankes yang menyelenggarakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sesuai standar	n/a	40%	60%	70%	80%	90%	90%
3.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat							
3.1	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	63,55%	67%	69%	70%	72%	75%	75%
3.2	Persentase kab/kota yang melaksanakan Germas	25%	30%	40%	50%	60%	75%	75%
3.3	Persentase desa/ kelurahan siaga aktif	37,4%	40%	45%	50%	55%	60%	60%
3.4	Persentase Posyandu aktif	n/a	55%	65%	75%	85%	90%	90%
4.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat							
4.1	Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.2	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	87,31%	90%	93%	96%	98%	100%	100%
4.3	Persentase bayi kurang 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	50%	53%	56%	59%	62%	65%	65%
4.4	Persentase kabupaten/ kota melakukan surveilans gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.5	Persentase rumah tangga yang mengonsumsi garam beryodium	99,33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.6	Persentase ibu hamil mendapatkan tablet Fe minimal 90 tablet	77,25%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
4.7	Persentase remaja putri (Rematri) yang memperoleh Tablet Tambah Darah	n/a	30%	35%	40%	45%	50%	50%
4.8	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) dan balita kurus (<i>wasting</i>) mendapat pemberian makanan tambahan (PMT)	83,61%	95%	96%	97%	98%	99%	99%
4.9	Persentase anak sekolah mendapat pemberian makanan tambahan (PMT)	n/a	91%	92%	94%	96%	98%	98%
4.10	Persentase balita mendapat Vitamin A	92%	92%	94%	96%	98%	100%	100%
5.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat							
5.1	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	n/a	50%	65%	75%	85%	100%	100%
5.2	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	9,21%	25%	50%	75%	80%	100%	100%
5.3	Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan	79,87%	84%	88%	92%	96%	100%	100%
5.4	Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang dilakukan pengawasan	80,01%	85%	90%	92%	97%	100%	100%
5.5	Persentase Fasyankes melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar	n/a	70%	75%	80%	85%	90%	90%
5.6	Persentase kab/kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	58% (19 kab/ kota)	65% (21 kab/ kota)	75% (25 kab/ kota)	85% (28 kab/ kota)	91% (30 kab/ kota)	100% (33 kab/ kota)	100% (33 kab/ kota)
6.	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit							
6.1	Angka kesembuhan penyakit TB (<i>success rate</i>)	92,5%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6.2	Prevalensi HIV/AIDS	0,33%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%
6.3	Cakupan desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	81,7%	83%	86%	89%	92%	95%	95%
6.4	Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	90%	93%	93,5%	94%	95%	96%	96%
6.5	Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT, HB, Hib lanjutan	n/a	90%	92%	93%	94%	95%	95%
6.6	Persentase anak sekolah dasar yang mendapat imunisasi tambahan pada bulan imunisasi anak sekolah	93,6%	94%	95%	96%	97%	98%	98%

6.7	Angka Non Polio Acute Flaccyd Paralysis (AFP) per 100.000 anak usia <15 tahun	n/a	≥2	≥2	≥2	≥2	≥2	≥2
6.8	Persentase penurunan jumlah kasus PD3I dibandingkan baseline data	n/a	5%	10%	15%	20%	25%	25%
6.9	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.10	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak penyakit infeksi emerging	80%	82%	84%	86%	90%	95%	95%
6.11	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.12	Persentase Jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.13	Cakupan penduduk di daerah endemis mendapatkan pengobatan massal filariasis	93%	95%	96%	97%	98%	100%	100%
6.14	Persentase Puskesmas melaksanakan pencegahan dan pengendalian Hepatitis B	n/a	70%	80%	95%	98%	100%	100%
6.15	CFR diare pada saat KLB	0%	< 1.2%	< 1.2%	< 1.2%	< 1.2%	< 1.2%	< 1.2%
6.16	Prevalensi kecacangan pada anak sekolah	13,6%	< 20%	< 20%	< 20%	< 20%	< 20%	< 20%
6.17	Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk	40,2	49	49	49	49	49	49
6.18	Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk (API)	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04
6.19	Angka Case Detection Rate penyakit TB	61,20%	65%	70%	76%	85%	90%	90%
6.20	Prevalensi HIV/AIDS	0,33%	<0.5%	<0.5%	<0.5%	<0.5%	<0.5%	<0.5%
6.21	Angka zoonosis lainnya (flu burung, rabies, antraks, leptospirosis) yang ditangani sesuai standar	72,44%	78%	83%	87%	90%	95%	95%
6.22	Cakupan penemuan dan tata laksana kasus pneumonia pada balita	14,85%	25%	30%	35%	40%	45%	45%
6.23	Angka penemuan kasus baru frambusia per 100.000 penduduk	0	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
6.24	Angka penemuan kasus baru kusta per 100.000 penduduk	1,24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24
6.25	Persentase cacat tingkat 2 Kusta	<10%	<10%	<10%	<10%	<10%	<10%	<10%
6.26	Persentase kab/kota melaksanakan mapping vector penyakit	15%	30%	45%	60%	75%	100%	100%



6.27	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.28	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.29	Jumlah kabupaten/kota dengan paling kurang 40% Puskesmas yang menyelenggarakan upaya berhenti merokok (UBM)	n/a	5	12	19	26	33	33
6.30	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki paling kurang 80% Puskesmas melakukan pelayanan terpadu PTM sesuai standar	n/a	5	10	18	26	33	33
6.31	Jumlah kab/kota yang memiliki cakupan deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular paling kurang 80%	n/a	5	12	20	28	33	33
6.32	Jumlah kab/kota yang memiliki paling kurang 80% Puskesmas melakukan deteksi dini penyakit kanker	n/a	14	19	24	29	33	33
6.33	Jumlah kab/kota yang memiliki paling kurang 40% Puskesmas melaksanakan deteksi dini gangguan indera	n/a	16	20	25	30	33	33
6.34	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.35	Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA/ sederajat	n/a	7	14	21	28	33	33
6.36	Jumlah kab/kota yang memiliki 30% Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa sesuai standar	n/a	7	14	21	28	33	33
6.37	Persentase penyalahguna NAPZA yang menjalani program rehabilitasi di Fasyankes	n/a	1%	3%	6%	9%	11%	11%
7.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit/ Rumah Sakit Khusus/ Laboratorium Kesehatan							
7.1	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Mata	n/a	80%	90%	100%	100%	100%	100%
7.2	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Paru	n/a	60%	70%	80%	90%	100%	100%
7.3	Persentase kesembuhan pasien reaksi kusta di UPT. RS Kusta Lausimomo	n/a	25%	30%	30%	30%	30%	30%

7.4	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Indrapura	n/a	20%	50%	70%	90%	100%	100%
7.5	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. Laboratorium Kesehatan	n/a	82,5%	83%	83,5%	84%	84,5%	84,5%
8.	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan							
8.1	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 (lima) jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif	n/a	30%	40%	50%	60%	74%	74%
8.2	Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	n/a	50%	60%	70%	80%	90%	90%
8.3	Persentase tenaga kesehatan yang telah didata berdasarkan pemetaan di rumah sakit dan Puskesmas	n/a	40%	50%	60%	70%	80%	80%
8.4	Persentase tenaga kesehatan yang dilatih pada pelatihan kesehatan yang terakreditasi	n/a	3%	3%	4%	5%	6%	6%
9.	Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan							
9.1	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi pembangunan kesehatan yang berkualitas	13	14	13	13	13	13	66
9.2	Persentase kab/kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.3	Jumlah dokumen kerja sama program, lintas sector, dan antar daerah dalam bidang kesehatan	n/a	7	7	7	7	7	35
10.	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan							
10.1	Persentase FKTP yang terakreditasi	71,5%	78,8%	87,4%	96%	98,1%	100%	100%
10.2	Persentase RS Pemerintah (Non BUMN/TNI/Polri yang terakreditasi)	76,2%	88,1%	95,2%	100%	100%	100%	100%
10.3	Persentase laboratorium kesehatan yang terakreditasi	n/a	9,5%	19%	38,01%	57,14%	76,19%	76,19%
10.4	Persentase RSUD yang menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 jam	91,67%	92,5%	94%	96%	98%	100%	100%
10.5	Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%

10.6	Persentase RSUD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)	63%	73%	78%	85%	92%	100%	100%
10.7	Cakupan pelayanan gawat darurat di RSUD sesuai standar	87%	90%	93%	95%	98%	100%	100%
10.8	Cakupan pelaksanaan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di kab/kota	n/a	24%	36%	48%	61%	73%	73%
10.9	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	n/a	35%	45%	55%	65%	75%	75%
10.10	Persentase Puskesmas yang menerapkan keperawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas) dengan pendekatan keluarga	n/a	25%	30%	40%	50%	60%	60%
10.11	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	n/a	30%	35%	40%	45%	50%	50%
10.12	Persentase Puskesmas yang melakukan Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK)	n/a	30%	40%	50%	55%	60%	60%
10.13	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang menerapkan pelayanan kegawatdaruratan	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.14	Persentase rumah sakit yang menerapkan standarisasi klasifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku	n/a	61,03%	75,12%	84,51%	91,55%	100%	100%
11.	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan							
11.1	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	72,2%	75%	80%	85%	90%	95%	95%

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 merupakan dokumen yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang strategis kurun waktu 2019-2023. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 dan Rancangan Teknokratik Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, serta memperhatikan dokumen perencanaan lain yang terkait.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam upaya menghasilkan program dan kegiatan pembangunan kesehatan yang strategis di Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, dan selanjutnya menjadi subjek perbaikan dan penyempurnaan khususnya terkait penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Sumatera Utara yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Medan, 2019

**Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Utara,**



**Dr. N.G. Hikmet, M.Kes
Pembina Tk. I**

NIP. 19631016 200212 1 002

Tabel 7.3.
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2019-2023

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RP JMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	
							2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RP JMD			
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		Target
Tepenuhnya dukungan manajemen perkantoran	Meningkatnya penyelenggaraan manajemen perkantoran yang bersih, transparan, dan akuntabel	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		1.02 01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	95	96	24.728,0	97	25.207,0	98	25.207,0	99	25.327,0	100	25.707,9	100	126.177	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 01	01 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah unit kantor yang dipenuhi kebutuhan surat menyurat	unit		7	57,3	7	58,7	7	58,7	7	59,0	7	59,9	7	293,7	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 01	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah unit kantor yang dipenuhi kebutuhan komunikasi, sumber daya air, dan listrik	unit		7	3.375,0	7	3.459,4	7	3.459,4	7	3.476,7	7	3.528,8	7	17.299,2	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 01	03 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah unit kantor yang dipenuhi kebutuhan administrasi keuangan	unit		7	4.170,6	7	4.274,9	7	4.274,9	7	4.296,2	7	4.360,7	7	21.377,3	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 01	04 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah unit kantor yang mendapat manfaat jasa kebersihan	unit		7	3.289,0	7	3.289,0	7	3.289,0	7	3.305,4	7	3.356,0	7	16.527,5	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 01	05 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah unit kantor yang dipenuhi kebutuhan ATK	unit		7	733,2	7	751,5	7	751,5	7	755,3	7	766,6	7	3.758,2	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 01	06 Penyediaan barang osakan dan penggandaan	Jumlah unit kantor yang dipenuhi kebutuhan osakan dan penggandaan	unit		7	1.199,9	7	1.229,9	7	1.229,9	7	1.236,0	7	1.254,6	7	6.150,3	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 01	07 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah unit kantor yang dipenuhi kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	unit		7	499,9	7	512,4	7	512,4	7	515,0	7	522,7	7	2.502,3	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 01	08 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah unit kantor yang dipenuhi kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	unit		7	143,6	7	147,2	7	147,2	7	147,9	7	150,1	7	736,1	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 01	09 Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah unit kantor yang dipenuhi kebutuhan makanan dan minuman rapat/lamu	unit		7	449,9	7	461,1	7	461,1	7	463,5	7	470,4	7	2.306,1	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 01	10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah unit kantor yang dipenuhi kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	unit		7	1.462,7	7	1.517,9	7	1.517,9	7	1.525,5	7	1.549,4	7	7.573,4	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 01	11 Pengembalian jasa medik	Jumlah unit kantor yang mendapat pengembalian jasa medik	unit		4	4.999,8	4	5.124,8	4	5.124,8	4	5.150,4	4	5.227,7	4	25.627,5	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 01	12 Penyediaan jasa keamanan	Jumlah unit kantor yang mendapat manfaat jasa keamanan	unit		7	3.001,2	7	3.001,2	7	3.001,2	7	3.016,2	7	3.061,4	7	15.081,3	Dnas Kesehatan	
		1.02 01 01	13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah unit kantor yang dipenuhi kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	unit		7	1.345,3	7	1.378,9	7	1.378,9	7	1.379,8	7	1.400,5	7	6.883,5	Dnas Kesehatan	
		1.02 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	80	82	25.763,1	84	23.812,0	86	23.812,0	88	21.052,0	90	75.287,0	90	169.726	Dnas Kesehatan	
		1.02 01 02	01 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	unit			1.951,1	-	-		-		-		5.600,0		7.551,1	Dnas Kesehatan	
		1.02 01 02	02 Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah unit kantor yang dipenuhi kebutuhan peralatan gedung kantor	unit		7	3.877,4	7	3.877,6	7	3.877,6	7	3.974,5	7	4.173,3	7	19.780,4	Dnas Kesehatan	
		1.02 01 02	03 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah unit kantor yang dipenuhi kebutuhan perlengkapan gedung kantor	unit		7	4.701,7	7	4.701,7	7	4.701,7	7	4.819,2	7	5.060,2	7	23.984,5	Dnas Kesehatan	
		1.02 01 02	04 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit kantor yang dilakukan pemeliharaan gedung kantor	unit		7	12.026,6	7	12.026,6	7	12.026,6	7	8.972,0	7	7.003,0	7	52.064,8	Dnas Kesehatan	
		1.02 01 02	05 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah unit kantor yang dipenuhi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	unit		7	1.706,2	7	1.706,2	7	1.706,2	7	1.748,9	7	1.836,3	7	8.703,8	Dnas Kesehatan	
		1.02 01 02	06 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah unit kantor yang dipenuhi kebutuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor	unit		7	1.499,9	7	1.499,9	7	1.499,9	7	1.537,4	7	1.614,3	7	7.651,4	Dnas Kesehatan	
		1.02 01 02	xx Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	unit			-	-	-		-		-	1	50.000,0	1	50.000,0	Dnas Kesehatan	
1.02 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	Persen	95	96	1.497,2	97	1.497,2	98	1.497,2	99	1.647,2	100	1.997,2	100	8.136	Dnas Kesehatan			
1.02 01 03	01 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	stel			697,5	945	952,9		-	950	1.000,5	950	1.024,8	2845	3.675,7	Dnas Kesehatan			

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB		
							2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		Target	Rp (juta)
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	1.02 01 03	02 Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	buah				223,7	-	945	330,7	-	-	-	945	554,4	Dinas Kesehatan			
		1.02 01 03	03 Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	buah				495,0	-	945	926,1	-	-	-	950	2.393,5	Dinas Kesehatan			
		1.02 01 03	04 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu tertentu yang diadakan	buah				81,0	544,3	750	200	240,4	950	646,7	-	1900	1.512,4	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen	95		96	4.661,1	4.661,1	97	98	4.661,1	99	4.951,1	100	5.857,3	100	24.792	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 05	01 Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah petugas yang mengikuti diklat formal	orang				4.217,8				3.458,6				4.484,8		19.388,4	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 05	02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah petugas yang mendapat sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang				116,4	-			-				-		116,4	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 05	03 Peningkatan pengelolaan manajemen kepegawain	Jumlah dokumen pengelolaan manajemen kepegawain	dokumen			1	326,8	-			-				-		326,8	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 05	xx Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan ASN berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja yang ditetapkan	dokumen					120,0	1	140,0	1	160,0	1	180,0	4	600,0	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 05	xx Tata Kelola Pangkat, Jabatan, karir, dan kompetensi	Presentase penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP) dengan hasil minimal baik sesuai dengan SOP yang ditetapkan	Persen					60	472,5	70	482,5	80	492,5	90	502,5	300	1.950,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 05	xx Tata Kelola Penilaian Kinerja dan Penilaku Kerja ASN	Presentase pelayanan pangkat, jabatan, karir, dan kompetensi yang dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ditetapkan	Persen					60	160,0	70	190,0	80	240,0	90	240,0	300	830,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 05	xx Tata Kelola Penghargaan, Pemberhentian, Jaminan Pensiun/Hari Tua dan Perlindungan	Presentase pelayanan penghargaan, pemberhentian, jaminan pensiun/hari tua dan perlindungan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ditetapkan	Persen					50	150,0	60	180,0	70	240,0	80	240,0	260	810,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 05	xx Tata Kelola Pelayanan Administrasi Kepegawain dan SIMPEG Online	Presentase pelayanan administrasi Kepegawain dan SIMPEG Online yang di layani tepat waktu, mudah dan transparan sesuai dengan SOP yang ditetapkan	Persen					40	160,0	50	210,0	60	210,0	70	210,0	220	790,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase dokumen laporan keuangan dan kinerja yang disusun tepat waktu dan sesuai pedoman	Persen			100	499,8	100	499,8	100		100	619,8	100	999,8	100	3.119,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 06	01 Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan CALK	dokumen			3	499,8	3	399,8	3	399,8	3	509,8	3	878,8	15	2.688,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 06	xx Penyusunan Laporan Kinerja (LK), LKPI, LPPD, dan Perjanjian Kinerja (PK)	Jumlah dokumen laporan kinerja	dokumen				-	50,0	4	50,0	4	55,0	4	60,5	16	215,5	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 06	xx Sosialisasi Laporan Kinerja	Jumlah orang yang paham hasil laporan kinerja	Orang				-	50,0	50	50	50,0	50	55,0	50	60,5	200	215,5	Dinas Kesehatan	
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	1.02 01 16	Program Kesehatan Masyarakat	Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	90,00		100,00	8.889,1	7.389,1	100,00	100,00	7.389,1	100,00	7.729,1	100,00	12.389,1	100,00	43.785,5	Dinas Kesehatan	
				Presentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	86,30		100,00			100,00	100,00		100,00		100,00		100,00			
		1.02 01 16	xx Evaluasi terpadu pelayanan antenatal care (ANC)	Jumlah dokumen evaluasi dan rencana tindak lanjut pelayanan ANC	dokumen			1	425,0	-			-		-	-	-	-	425,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Penatalaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi wanita dan remaja	Jumlah dokumen rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan reproduksi wanita dan remaja	dokumen			1	210,0	-			-		-	-	-	-	210,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Supervisi program kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil supervisi program KIA	dokumen			1	138,0	-			-		-	-	-	-	138,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Pemutakhiran dan sinkronisasi data kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen laporan KIA yang sinkron	dokumen			1	223,8	-			-		-	-	-	-	223,8	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Peningkatan kapasitas petugas dalam pelaksanaan ANC terpadu	Jumlah petugas (bidan) yang paham dalam pelaksanaan ANC terpadu	Orang			-	-	420,0	160	160	462,0	160	508,2	160	559	660	1.949,2	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Workshop fasilitator pencegahan penularan HIV, Sifilis dan Hepatitis B dari ibu ke anak (PPIA)	Jumlah petugas yang mampu menjadi fasilitator pencegahan penularan HIV, Sifilis dan Hepatitis B dari ibu ke anak (PPIA)	Orang			-	-	150,0	20	20	165,0	20	181,5	20	199,6	80	686,1	Dinas Kesehatan	
1.02 01 16	xx Rapat koordinasi lintas program/linis sektor dalam pelaksanaan Antenatal (ANC) terpadu	Jumlah dokumen kesepakatan LPLS dalam pelaksanaan ANC terpadu	dokumen			-	-	180,0	1	1	198,0	1	217,8	1	239,5	4	835,3	Dinas Kesehatan			
1.02 01 16	xx Evaluasi pelayanan Antenatal (ANC) terpadu	Jumlah dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) pelayanan ANC terpadu	dokumen			-	-	230,0	1	1	253,0	1	278,3	1	306,1	4	1.067,4	Dinas Kesehatan			

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB		
							2019		2020		2021		2022		2023			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		Target	Rp (juta)
		1.02 01 16	xx Bimbingan Teknis Pelayanan Antenatal (ANC) terpadu	Jumlah petugas yang paham pelaksanaan pelayanan ANC terpadu di fasilitas kesehatan	Orang		-	33	160,0	33	176,0	33	193,6	33	212,9	132	742,5	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Workshop fasilitator kelas ibu	Jumlah petugas yang terampil menjadi fasilitator kelas ibu	Orang		-	20	150,0	20	165,0	20	181,5	20	199,6	80	696,1	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Penilaian pelaksanaan kelas ibu	Jumlah dokumen hasil penilaian pelaksanaan kelas ibu di kabupaten/ kota	dokumen		-	1	160,0	1	176,0	1	193,6	1	212,9	4	742,5	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Bimbingan teknis pelaksanaan kelas ibu	Jumlah petugas yang paham pelaksanaan kelas ibu	Orang		-	33	95,0	33	104,5	33	114,9	33	126,4	132	440,8	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Penyediaan lembar balik kelas ibu (ibu hamil dan balita)	Jumlah lembar balik kelas ibu yang disediakan	Buah		-	340	170,0	340	187,0	-	-	-	680	357,0	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 16	xx Evaluasi pelaksanaan kelas ibu	Jumlah dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) pelayanan kelas ibu	dokumen		-	1	210,0	1	231,0	1	254,1	1	279,5	4	974,6	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Pembinaan dalam deteksi kasus risiko tinggi pada ibu hamil dalam rangka penogegahan stunting	Jumlah petugas yang mampu mendeteksi kasus risiko tinggi dan pencegahan stunting	Orang		-	24	155,0	21	170,5	24	187,5	24	206,3	93	719,3	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Rapat koordinasi teknis dalam upaya pencapaian penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)	Jumlah dokumen kesepakatan dan/atau Rencana Tindak Lanjut (RTL) upaya pencapaian penurunan AKI dan AKB	dokumen		-	1	220,0	1	242,0	1	266,2	1	292,8	4	1.021,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Pertemuan Peningkatan Pemanfaatan Buku KIA	Jumlah petugas yang paham dalam pemanfaatan buku KIA	Orang		-	36	175,0	44	193,6	48	212,9	66	234,2	194	816,7	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Pendampingan ibu hamil dalam pemanfaatan buku KIA oleh mahasiswa (Peguruan Tinggi)	Jumlah ibu hamil yang dilakukan pendampingan pemanfaatan buku KIA oleh mahasiswa	Orang		-	40	180,0	40	198,0	40	217,8	40	239,5	160	835,3	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Penilaian pemanfaatan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Jumlah kabupaten/kota yang dinilai dalam pemanfaatan buku KIA	Kab/Kota		-	11	80,0	11	88,0	11	96,8	11	106,4	44	371,2	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Studi komparatif Pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Jumlah petugas yang mengikuti studi komparatif pemanfaatan buku KIA ke Provinsi percontohan	Orang		-	40	45,0	-	-	-	-	-	40	45,0	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 16	xx Peningkatan kapasitas petugas dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu (PKRT)	Jumlah petugas yang paham pelaksanaan PKRT	Orang		-	30	160,0	30	176	30	193,6	30	212,9	120	742,5	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Workshop Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Jumlah petugas yang paham PUG dan ARG Bidang Kesehatan	Orang		-	33	165,0	33	181,5	33	199,6	20	219,6	119	765,7	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Peningkatan Kemampuan Petugas dalam Penanganan Kekeraan terhadap perempuan dan anak	Jumlah petugas yang paham penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Orang		-	40	175,0	40	192,5	40	211,7	45	232,9	165	812,1	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Workshop Peningkatan Peran Lintas Sektor dalam KIE Kesehatan Reproduksi dan seksual bagi Calon Pengantin	Jumlah petugas yang paham KIE kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin	Orang		-	32	160,0	32	176,0	32	193,6	36	212,9	132	742,5	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Workshop peningkatan peran lintas sektor dan lintas program dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR)	Jumlah petugas yang paham dalam pelaksanaan pelayanan PKPR	Orang		-	32	160,0	32	176,0	32	193,6	36	212,9	132	742,5	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Evaluasi pelaksanaan program kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) program kesehatan reproduksi	dokumen		-	1	220,0	1	242	1	266,2	1	292,8	4	1.021,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Provinsi	Jumlah dokumen pengelolaan BOK Provinsi	dokumen		1	5.135,2	-	-	-	-	-	-	1	5.135,2	Dinas Kesehatan		
				Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Persen	85,40	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-		
		1.02 01 16	xx Evaluasi pelaksanaan persalinan sesuai standar	Jumlah dokumen evaluasi dan rencana tindak lanjut persalinan sesuai standar	dokumen		1	315,0	-	-	-	-	-	-	-	-	315	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Orientasi pelayanan persalinan sesuai standar	Jumlah petugas yang paham pelayanan persalinan sesuai standar	Orang		-	24	155,0	21	170,5	24	187,5	30	206,3	99	719,3	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Pertemuan lintas program/linas sektor dalam pemanfaatan rumah tunggu kelahiran (RTK)	Jumlah dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) pemanfaatan RTK	dokumen		-	1	155,0	1	170,5	1	187,5	1	206,3	4	719,3	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Kemitraan Bidan dan dukun	Jumlah dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) peningkatan kemitraan bidan dan dukun	dokumen		-	1	155,0	1	170,5	1	187,5	1	206,3	4	719,3	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Bimbingan teknis pelayanan persalinan	Jumlah petugas yang paham dalam pelayanan persalinan	Orang		-	33	95,0	33	104,5	33	114,9	33	126,4	132	440,8	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Evaluasi capaian indikator kesehatan keluarga	Jumlah dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) peningkatan capaian indikator kesehatan keluarga	dokumen		-	1	160,0	1	176,0	1	193,6	1	212,9	4	742,5	Dinas Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RP-JMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB		
							2019		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RP-JMD
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target
		1.02 01 16	xx Pertemuan lintas program/linfas sektor dalam pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)	Jumlah dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) linfas program/linfas sektor dalam pemanfaatan RTK	dokumen		-	1	155,0	1	170,5	1	187,5	1	206,3	4	719,3	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Evaluasi Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)	Jumlah dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) pelaksanaan P4K	dokumen		-	1	401,5	1	441,6	1	485,8	1	534,3	4	1.863,2	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Rapat Koordinasi Lintas Program/Linfas Sektor dalam Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)	Jumlah dokumen kesepakatan dan rencana kerja linfas program/linfas sektor pelaksanaan P4K	dokumen		-	1	429,0	1	471,9	1	519,0	1	570,9	4	1.990,8	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Supervisi Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)	Jumlah kab/kota yang dilakukan supervisi P4K	Kab/Kota		-	33	132,0	33	145,2	33	159,7	33	175,6	132	612,5	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Penilaian Model Dukungan Peran Serta Lintas Sektor dalam Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)	Jumlah kab/kota yang dilakukan penilaian model dukungan peran serta LS dalam P4K	Kab/Kota		-	33	418,0	33	459,8	33	505,7	33	556,3	132	1.939,8	Dinas Kesehatan	
				Cakupan Pelayanan Nifas sesuai Standar	Persen	81,7	84,00	86,00		88,00		90,00		92,00		100,00			Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Orientasi KB pasca persalinan	Jumlah petugas yang paham KB pasca persalinan	Orang		33	196,2	-	-	-	-	-	-	-	-	196		Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Orientasi petugas dalam pelayanan nifas sesuai standar	Jumlah petugas yang paham dalam pelayanan nifas sesuai standar	Orang		-	76	341,0	64	375,1	68	412,6	86	453,8	294	1.582,5		Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Bimbingan teknis evaluasi kunjungan Nifas	Jumlah kabupaten/kota yang dievaluasi pelaksanaan kunjungan nifas	Kab/Kota		-	12	88,0	11	96,8	12	106,4	33	117,1	33	408,3		Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Orientasi Pencatatan Pelaporan Pemanulaan Wilayah	Jumlah petugas yang paham pencatatan dan pelaporan PWS-KIA	Orang		-	66	209,0	66	229,9	66	252,8	66	278,1	264	969,8		Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Pelatihan KBPP/PPA bagi tenaga kesehatan di Fasyankes Primer	Jumlah petugas Fasyankes primer yang paham tentang KBPP/PPA	Orang		-	35	210,0	35	231,0	35	254,1	35	279,5	140	974,6		Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Pembinaan layanan Keluarga Berencana (KB) Pasca salin	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembinaan KB pasca salin	Puskesmas		-	48	180,0	48	198,0	48	217,8	48	239,5	192	835,3		Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Pertemuan Evaluasi Model Layanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Salin	Jumlah dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) model KB Pasca salin	dokumen		-	1	150,0	1	165,0	1	181,5	1	199,6	4	696,1		Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Orientasi pencatatan dan pelaporan layanan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah petugas yang paham pencatatan dan pelaporan layanan KB	Orang		-	66	230,0	66	253,0	66	278,3	66	306,1	264	1.067,4		Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Dukungan Kegiatan Bulan Bakti Keluarga Berencana (KB) - Kesehatan	Jumlah frekuensi pelaksanaan Bulan Bakti KB - Kesehatan	kali		-	3	35,0	3	38,5	3	42,3	3	46,5	12	162,3		Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Bimbingan teknis Layanan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah Puskesmas yang dilakukan bintek layanan KB	Puskesmas		-	16	45,0	16	49,5	16	54,4	16	59,8	64	208,7		Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Orientasi pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan ASI Eksklusif	Jumlah petugas (bidan) yang paham pelaksanaan IMD dan ASI eksklusif	Orang		-	45	195,0	40	214,5	40	235,9	40	259,5	165	904,9		Dinas Kesehatan
				Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	88,60	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Orientasi pelayanan maternal dan neonatal terstandar	Jumlah petugas yang paham pelayanan maternal dan neonatal terstandar	Orang		33	132,5	-	-	-	-	-	-	-	-	132,5		Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Rapat Koordinasi Lintas Program/Linfas Sektor dan Organisasi Profesi dalam peningkatan pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini (IMD)	Jumlah dokumen kesepakatan dan rencana kerja linfas program/linfas sektor pelaksanaan IMD	dokumen		-	1	220,0	1	242,0	1	266,2	1	292,8	4	1.021,0		Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Bimbingan teknis peningkatan cakupan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan ASI Eksklusif	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan bintek IMD dan ASI eksklusif	Kab/Kota		-	33	90,0	33	99,0	33	108,9	33	119,7	33	417,6		Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Evaluasi dan monitoring pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini (IMD)	Jumlah dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) pelaksanaan IMD	dokumen		-	1	165,0	1	181,5	1	199,6	1	219,6	4	765,7		Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Pertemuan Lintas Program/Linfas Sektor dalam pemberian Makanan Pendamping (MP-ASI)	Jumlah dokumen kesepakatan dan rencana kerja linfas program/linfas sektor pemberian MP-ASI	dokumen		-	1	157,0	1	172,7	1	188,9	1	208,9	4	728,5		Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Orientasi pelayanan kesehatan neonatal esensial	Jumlah petugas yang paham pelayanan kesehatan neonatal esensial	Orang		-	33	180,0	-	-	-	-	-	-	33	180,0		Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Peningkatan kapasitas petugas dalam pelayanan kesehatan neonatal esensial	Jumlah petugas yang paham pelayanan kesehatan neonatal esensial	Orang		-	33	160,0	33	176	33	193,6	33	212,9	132	742,5		Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan neonatal esensial	Jumlah dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) pelaksanaan pelayanan kesehatan neonatal esensial	dokumen		-	1	215,0	1	236,5	1	260,1	1	286,1	4	997,7		Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Bimbingan teknis pelayanan kesehatan neonatal esensial	Jumlah Puskesmas yang mendapat bintek pelayanan kesehatan neonatal esensial	Puskesmas		-	66	120,0	66	132	66	145,2	66	159,7	264	556,9		Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB		
							2019		2020		2021		2022		2023			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			Target
		1.02 01 16	xx Pelatihan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal	Jumlah petugas (dokter/ perawat/ bidan) Fasyankes primer yang terlatih penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal	Orang		-	30	407,0	30	447,7	30	492,4	30	541,7	120	1.888,8	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Pembinaan penanganan kegawatdaruratan kesehatan maternal dan neonatal	Jumlah kabkota yang dilakukan pembinaan penanganan kegawatdaruratan kesehatan maternal dan neonatal	Kab/Kota		-	4	8,8	4	9,6	4	10,6	4	11,7	16	40,7	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Pertemuan Lintas Program/Lintas Sektor untuk meningkatkan sistem rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal	Jumlah dokumen kesepakatan dan rencana kerja lintas program/linas sektor dalam sistem rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal	dokumen		-	1	308,0	1	338,8	1	372,6	1	409,9	4	1.429,3	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Rapat evaluasi pelaksanaan program kesehatan keluarga melalui pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan program kesehatan keluarga	dokumen		-	1	284,0	1	290,4	1	319,4	1	351,3	4	1.225,1	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Workshop pencatatan pelaporan kematian dengan sistem elektronik	Jumlah petugas yang paham pencatatan dan pelaporan kematian dengan sistem elektronik	Orang		-	40	95,0	40	105,0	40	115,0	40	126,5	160	441,5	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Pertemuan pembelajaran/pengkajian Audit Maternal Perinatal (AMP)	Jumlah kabkota yang memperoleh dukungan pembelajaran/pengkajian AMP	Kab/Kota		-	6	165,0	6	181,5	6	200,0	6	219,6	24	766,1	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Pelatihan tatalaksana bayi baru lahir	Jumlah petugas yang terlatih dalam tatalaksana bayi baru lahir	Orang		-	30	154,0	30	169,5	30	186,3	30	210,0	120	719,8	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Evaluasi tatalaksana bayi baru lahir	Jumlah kabkota yang dilakukan evaluasi tatalaksana bayi baru lahir	Kab/Kota		-	4	66,0	4	72,6	4	80,0	4	87,8	16	306,4	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Orientasi pelayanan kesehatan bayi	Jumlah petugas yang paham pelayanan kesehatan bayi	Orang		-	99	190,0	99	209,0	99	230,0	99	252,8	396	881,8	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Evaluasi pelayanan kesehatan bayi	Jumlah dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) pelayanan kesehatan bayi	dokumen		-	1	120,0	1	132,0	1	145,2	1	159,7	4	556,9	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Bimbingan teknis pelayanan kesehatan bayi	Jumlah Puskesmas yang dilakukan bimtek pelayanan kesehatan bayi	Puskesmas		-	99	120,0	99	132,0	99	145,2	99	159,7	396	556,9	Dinas Kesehatan	
				Capaian Pelayanan Balita sesuai Standar	Persen	85,00	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00		100,00			Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Pelatihan pelayanan balita dan anak pra sekolah terstandar	Jumlah petugas yang terampil dalam pelayanan balita dan anak pra sekolah terstandar			33	296,1	-	-	-	-	-	-	-	33	296,1	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Orientasi Manajemen Terpadu Balita Sakt (MTBS)	Jumlah petugas yang paham dalam MTBS	Orang		-	99	120,0	99	132,0	99	145,2	99	159,7	396	556,9	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Sosialisasi Manajemen Terpadu Balita Sakt (MTBS) bagi Lintas Program	Jumlah petugas (Lintas Program) yang mengetahui MTBS	Orang		-	99	120,0	99	132,0	99	145,2	99	159,7	396	556,9	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Evaluasi Program Manajemen Terpadu Balita Sakt (MTBS)	Jumlah dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) program MTBS	dokumen		-	1	120,0	1	132,0	1	145,2	1	159,7	4	556,9	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Bimbingan teknis Manajemen Terpadu Balita Sakt (MTBS)	Jumlah Puskesmas yang mendapat bimtek MTBS	Puskesmas		-	99	130,0	99	143,0	99	157,3	99	173,0	396	603,3	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Orientasi Pelayanan Kesehatan Balita dan anak pra sekolah	Jumlah petugas yang paham pelayanan kesehatan balita dan anak pra sekolah	Orang		-	33	120,0	33	132,0	33	145,2	33	159,7	132	556,9	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Orientasi Stimulasi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)	Jumlah petugas yang paham SDIDTK	Orang		-	33	180,0	33	198,0	33	217,8	33	239,5	132	835,3	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Evaluasi Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) pelayanan kesehatan balita	dokumen		-	1	190,0	1	209,0	1	230,0	1	252,8	4	881,8	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Bimbingan teknis pelayanan kesehatan balita	Jumlah kabkota yang mendapat bimtek pelayanan kesehatan balita	Kab/Kota		-	33	120,0	33	132,0	33	145,2	33	159,7	132	556,9	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Training of Trainers (ToT) Stimulasi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)	Jumlah petugas yang terampil menjadi pelatih (trainer) SDIDTK	Orang		-	33	195,0	33	214,5	33	236,0	33	260,0	132	905,5	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Pertemuan koordinasi lintas program/linas sektor pelayanan kesehatan balita dan anak pra sekolah	Jumlah dokumen kesepakatan dan Rencana Kerja pelayanan kesehatan balita dan anak pra sekolah	dokumen		-	1	210,0	1	231,0	1	254,0	1	279,5	4	974,5	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Penyediaan buku pedoman dan skrinig kit Stimulasi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) serta kohort balita dan anak pra sekolah	Jumlah buku pedoman dan skrinig kit SDIDTK, serta kohort balita dan anak pra sekolah yang disediakan	Buah		-	-	-	1981	250,0	-	-	-	1981	250	Dinas Kesehatan		
				Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00		100,00			Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Inisiasi pembentukan sekolah sehat	Jumlah sekolah yang dinitiasi sekolah sehat	unit		2	275,2	2	302,7	2	333,0	2	366,3	2	402,9	10	1.680,1	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB		
							2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		Target	Rp (juta)
		1.02 01 16	xx Orientasi pelaksanaan sekolah sehat	Jumlah sekolah yang diorientasi sekolah sehat	unit			2	127,7	2	140,5	2	154,5	2	170,0	2	187,0	10	779,6	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Koordinasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar	dokumen															Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	Jumlah kabkota yang dilakukan pembinaan dan money pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar	KabKota			33	96,7	33	106,4	33	117,0	33	128,7	33	141,6	165	590,4	Dinas Kesehatan	
				Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skining kesehatan sesuai standar	Persen	70,00		100,00				100,00			100,00			100,00			
		1.02 01 16	xx Penatalaksanaan pelayanan kesehatan terstandar pada usia lanjut	Jumlah dokumen rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan terstandar pada usia lanjut	dokumen			1	649,9		-		-		-		-	1	649,9	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Lokakarya Penyusunan Rancangan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesehatan Lanjut Usia Provinsi Sumatera Utara	Jumlah dokumen rancangan RAD kesehatan lanjut usia Provinsi Sumatera Utara	dokumen			-	-	1	300,0	1	300,0	-	-	-	-	2	600,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Lokakarya Finalisasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesehatan Lanjut Usia Provinsi Sumatera Utara	Jumlah dokumen RAD kesehatan lanjut usia Provinsi Sumatera Utara	dokumen			-	-	-	-	1	300,0	-	-	-	-	1	300,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesehatan Lanjut Usia Provinsi Sumatera Utara	Jumlah kabkota yang disosialisasi RAD kesehatan lanjut usia Provinsi Sumatera Utara	dokumen			-	-	11	130,0	11	150,0	11	200,0	-	-	33	480,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 tahun 2014 kepada Lintas Program/Lintas Sektor dan Organisasi Profesi	Jumlah RS yang disosialisasi Permenkes Nomor 79 tahun 2014	RS			-	-	10	150,0	10	150,0	10	150,0	-	-	30	450,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2015 kepada Lintas Program/Lintas Sektor dan Kabupaten/Kota	Jumlah kabkota yang disosialisasi Permenkes Nomor 67 tahun 2015	Kabkota			-	-	11	400,0	11	400,0	11	400,0	-	-	33	1.200,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Advokasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesehatan Lanjut Usia kepada Lintas Program/Lintas Sektor dan Kabupaten/Kota	Jumlah instansi/organisasi yang mendapat advokasi terkait RAD kesehatan lanjut usia				-	-	36	400,0	36	450,0	36	500,0	36	550,0	144	1.900,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Orientasi Klinis Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia dan Geriatri	Jumlah petugas yang paham klinis pelayanan kesehatan lanjut usia dan geriatri	Orang			-	-	33	185,0	33	185,0	33	190,0	33	190,0	132	750,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Pembinaan pelayanan konseling kesehatan lanjut usia	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan konseling kesehatan lanjut usia	Puskesmas			-	-	33	185,0	33	185,0	33	190,0	33	190,0	132	750,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia dan Geriatri	Jumlah Puskesmas/RS yang mendapat dukungan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan lanjut usia dan geriatri	Faskes			-	-	39	500,0	40	500,0	40	500,0	40	500,0	159	2.000,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Pertemuan koordinasi pelayanan kesehatan lanjut usia	Jumlah dokumen rencana kerja/ Rencana Tindak Lanjut (RTL) pelayanan kesehatan lansia	dokumen			-	-	1	350,0	1	350,0	1	350,0	1	350,0	4	1.400,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Penjangkasan sasaran lanjut usia	Jumlah kabkota yang dilakukan penjangkasan sasaran lanjut usia	Kabkota			-	-	33	185,0	33	185,0	33	185,0	33	185,0	132	740,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Evaluasi Pelayanan Geriatri Komprehensif menggunakan Buku Kesehatan Lansia	Jumlah dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) pelayanan geriatri komprehensif	dokumen			-	-	1	185,0	1	185,0	1	185,0	1	185,0	4	740,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Monitoring evaluasi Pengembangan dan Pembinaan Poli Geriatri Terpadu	Jumlah RS yang dilakukan money pelayanan geriatri komprehensif	RS			-	-	33	220,0	33	220,0	33	220,0	33	220,0	132	880,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Lokakarya Pelayanan Home Care Lanjut Usia	Jumlah petugas yang paham pelayanan home care lanjut usia	Orang			-	-	33	185,0	33	185,0	33	185,0	33	185,0	132	740,0	Dinas Kesehatan	
				Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pembinaan Kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	Persen	40,00		50,00				60,00			65,00		70,00	60,00			
		1.02 01 16	xx Orientasi pelayanan kesehatan olahraga	Jumlah orang yang paham pelayanan kesehatan olahraga	Kabkota					-	-	33	203,5			33	223,9	66	427,4	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 16	xx Monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan olahraga	Jumlah dokumen hasil monitoring evaluasi pelayanan kesehatan olahraga	dokumen			-	-	1	188,5	1	188,5	1	185,4	1	203,9	4	726,2	Dinas Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT-COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB			
							2019		2020		2021		2022		2023			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status gizi masyarakat	1.02 01 16	xx	Supervisi penyelenggaraan kesehatan olahraga	Kab/kota			33	131,7	-	-	-	-	-	-	33	131,7	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 16	xx	Sosialisasi peregiatan di tempat kerja	instansi				-	10	25,0	10	25,0	10	25,0	40	100,0	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 16	xx	Workshop kebugaran jasmani calon jemaah haji bagi petugas kebugaran jasmani calon jemaah haji	Orang			33	104,6											
		1.02 01 16	xx	Pengukuran kebugaran jasmani pada kelompok masyarakat	Orang			150	113,6	300	150,0	400	165,0	500	181,5	2.000	809,8	Dinas Kesehatan		
				Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar	Persen	n/a		60,00		65,00		70,00		75,00		60,00				
		1.02 01 16	xx	Koordinasi/Orientasi Pembentukan Pos UKK	Orang				135,7	38	150,0	38	165,0	38	181,5	152	831,9	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 16	xx	Koordinasi Penyelenggaraan Kesehatan Kerja dan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GPZSP)	Dokumen			1	181,4	1	199,5	1	209,5	1	215,0	1	225,0	5	1.030,4	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx	Orientasi Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Orang					33	140,0	33	154,0	33	169,4	33	186,3	132	649,7	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx	Monitoring dan Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar	Dokumen				-	1	130,0	1	143,0	1	157,3	1	173,0	4	603,3	Dinas Kesehatan
				Persentase Fasilitas yang Menyelenggarakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sesuai Standar	Persen	n/a		40,00		60,00		70,00		80,00		90,00	90,00			
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status gizi masyarakat	1.02 01 16	xx	Sosialisasi K3 Rumah Sakit	Orang				-	39	150,0		-	-	-	39	150	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 16	xx	Orientasi K3 Fasilitas	Orang				-	72	250,0	38	150,0	33	150,0	177	700,0	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 16	xx	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan K3 di Fasilitas	Kab/kota				-	1	130,0	1	143,0	1	157,3	1	173,0	4	603,3	Dinas Kesehatan
		1.02 01 20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat (Bawah Lima Tahun)	Persen	33,00	31,50	5.226,3	30,50	5.187,1	29,50	5.167,1	28,50	5.507,1	27,50	12.167,1	27,50	33.235	Dinas Kesehatan	
				Persentase balita ditimbang berat badannya (DB)	Persen	79,00	80,00		82,00		84,00		86,00		90,00	90,00				
		1.02 01 20	xx	Pendampingan kasus gizi buruk	kasus			279,9		307,9		307,9		323,3		355,6	1.574,6	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 20	xx	Rapat Koordinasi Teknis Lintas Sektor dan Lintas Program Dalam Peningkatan DB	Dokumen			-	1	273,0	1	273,0	1	286,7	1	322,0	4	1.154,7	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 20	xx	Rapat Evaluasi Lintas Sektor dan Lintas Program Dalam Peningkatan DB	Dokumen			-	1	210,0	1	210,0	1	220,5	1	267,1	4	907,6	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 20	xx	Pertemuan Koordinasi Pembiayaan Pelaksanaan Posyandu dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota.	Dokumen			-	1	217,6	1	217,6	1	228,5	1	289,2	4	952,9	Dinas Kesehatan	
				Persentase bayi kurang 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	Persen	50,00	53,00		56,00		59,00		62,00		65,00	65,00				
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status gizi masyarakat	1.02 01 20	xx	Workshop ASI Eksklusif bagi organisasi kesehatan/Profesi	Orang			-	45	183,2	50	183,2	55	192,4	60	259,0	210	817,8	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 20	xx	Monitoring dan evaluasi Program Gizi di Kab/ Kota	Dokumen			-	33	175,0	33	175,0	33	183,8	33	243,7	132	777,5	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 20	xx	Orientasi Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT)	Orang			-	116	272,0	116	272,0	116	285,6	117	299,2	465	1.128,8	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 20	xx	Pelatihan Pemberian Makanan bagi Bayi dan Anak (PMBBA)	Orang			-	96	255,7	96	255,7	96	268,5	96	295,7	384	1.075,6	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 20	xx	Peningkatan Kapasitas Tenaga Konselor ASI	Orang			-	120	179,5	120	179,5	122	188,5	124	256,0	486	803,5	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 20	xx	Evaluasi Pasca Orientasi PAGT, PMBA dan Konselor ASI	Orang			-	116	150,0	116	150,0	116	157,5	117	300,0	465	757,5	Dinas Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT-COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB		
							2019		2020		2021		2022		2023			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERODE RPJMD	
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		Target	Rp (juta)
				Persentase kabupaten/ kota melakukan surveilans gizi	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
		1.02 01 20	xx	Koordinasi manajemen program gizi	Dokumen		166,8	33	165,8	33		174,1	33	259,0	132	931,5	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 20	xx	Supervisi pelaksanaan surveilans gizi	Kab/kota	33			-	-	-	-	-	0	118,5	Dinas Kesehatan			
		1.02 01 20	xx	Koordinasi kewaspadaan pangan dan gizi	dokumen	1	469,5	-	-	-	-	-	-	0	469,5	Dinas Kesehatan			
		1.02 01 20	xx	Orientasi pencatalan dan pelaporan e-PPGBM	Orang	33	207,1	-	-	-	-	-	-	0	207,1	Dinas Kesehatan			
		1.02 01 20	xx	Bimbingan teknis program gizi	Dokumen	-	-	33	150,0	33	150,0	33	157,5	33	185,0	642,5	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 20	xx	Orientasi Surveilans Gizi Melalui e-PPGBM (elektronik pencatalan & pelaporan gizi berbasis masyarakat)	Orang	-	-	116	185,0	116	185,0	116	194,3	117	195,1	799,4	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 20	xx	Supervisi dalam rangka verifikasi data balita stunting hasil e-PPGBM	Dokumen	-	-	1	150,0	1	150,0	1	157,5	1	145,0	4	602,5	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 20	xx	Pertemuan Evaluasi Capaian Indikator Program Gizi	Dokumen	-	-	1	175,2	1	175,2	1	184,0	1	206,0	4	740,4	Dinas Kesehatan	
				Persentase rumah tangga yang mengonsumsi garam beryodium	Persen	99,98	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
		1.02 01 20	xx	Pemantauan konsumsi garam beryodium di kabupaten/kota	RT	-	-	120	135,0	140	135,0	160	141,8	180	160,0	600	571,8	Dinas Kesehatan	
				Persentase ibu hamil mendapatkan tablet Fe minimal 90 tablet	Persen	77,25	98,00		98,00		99,00		100,00		100,00				
		1.02 01 20	xx	Sosialisasi pencegahan stunting melalui pemberian tablet tambah darah (Fe) pada ibu hamil dan remaja putri (Remati)	Orang	33	125,3	-	-	-	-	-	-	-	33	125,3	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 20	xx	Workshop Suplementasi gizi dalam rangka peningkatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Orang	-	-	33	254,0	33	254,0	33	266,7	33	289,0	132	1.063,7	Dinas Kesehatan	
				Persentase remaja putri (Remati) yang memperoleh Tablet Tambah Darah	Persen	19,96	30,00		35,00		40,00		45,00		50,00				
		1.02 01 20	xx	Rapat koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri	Dokumen	-	-	1	208,9	1	208,9	1	219,3	1	265,4	4	902,5	Dinas Kesehatan	
				Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) mendapat pemberian makanan tambahan (PMT)	Persen	83,61	95,00		96,00		97,00		98,00		99,00				
		1.02 01 20	xx	Monitoring ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	Kab/kota	33	155,6		-	-	-	-	-	-	33	155,6	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 20	xx	Penyediaan paket Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil (PMT Bumil) dalam rangka penurunan stunting	Paket	1	2.059,2		-	-	-	-	-	-	1	2.059,2	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 20	xx	Penyediaan dan distribusi PMT ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan Balita Kurus	Paket	-	-	1	815,6	1	815,6	1	938,0	1	6.753,6	4	9.322,8	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 20	xx	Monitoring evaluasi intervensi suplementasi gizi ibu hamil dalam rangka peningkatan 1000 HPK	Dokumen	-	-	1	185,0	1	185,0	1	194,3	1	227,5	4	791,8	Dinas Kesehatan	
				Persentase balita kurus (wasting) mendapat pemberian makanan tambahan (PMT)	Persen	90,91	91,00		92,00		94,00		96,00		98,00				
		1.02 01 20	xx	Penyediaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Suplemen gizi				1.644,0							98,00		Dinas Kesehatan		
		1.02 01 20	xx	Pertemuan koordinasi pelaksanaan pendistribusian PMT ibu hamil KEK dan balita kurus	Orang	-	-	33	253,0	33	253,0	33	265,7	33	289,0	132	1.060,7	Dinas Kesehatan	
				Persentase balita mendapat Vitamin A	Persen	92,00	93,00		94,00		96,00		98,00		100,00				

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT-COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	
							2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERODE RPJMD			
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat	Menurunnya angka kesakitan	1.02 01 20	xx	Perluasan koordinasi penguatan pelaksanaan suplementasi vitamin A balita dan ibu nifas	Jumlah peserta yang mengetahui pelaksanaan suplementasi vitamin A balita dan ibu nifas	Orang			-	33	265,7	33	265,7	33	279,0	33	305,0	1.115,4	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Persen	25,00	30,00	4.090,3	40,00	8.061	50,00	7.416	60,00	7.575	75,00	8.983	35.907	Dinas Kesehatan	
					Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	Persen	66,13	67,00		69,00		70,00		72,00		75,00				
		1.02 01 19	xx	Workshop pendataan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Jumlah petugas yang mampu melakukan pendataan PHBS	Orang		22	321,5		-		-		-	22	321,5		Dinas Kesehatan	
		1.02 01 19	xx	Supervisi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Jumlah kab/kota yang disupervisi PHBS	Kab/kota		33	192,0		-		-		-		192,0		Dinas Kesehatan	
		1.02 01 19	xx	Workshop Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Jumlah petugas yang mampu melakukan pendataan PHBS	Orang			-	33	250,0	33	250,0	33	250,0	33	250,0	1.000,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 19	xx	Reportase dan peliputan Bidang Kesehatan	Jumlah kegiatan reportase dan peliputan bidang kesehatan	kali		21	46,2	24	50,0	25	65,0	26	57,0	27	75,0	123	293,2	Dinas Kesehatan
		1.02 01 19	xx	Perluasan Sosialisasi SDM Promosi Kesehatan	Jumlah tenaga kab/kota dan Provinsi yang terampil dalam Promosi kesehatan	Orang			-	33	150,0		-		-		33	150,0		Dinas Kesehatan
		1.02 01 19	xx	Workshop Komunikasi Perubahan Perilaku	Jumlah petugas yang paham komunikasi perubahan perilaku	Orang			-	33	250,0	33	250,0	33	250,0	33	250,0	1.000,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 19	xx	Perluasan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)	Jumlah RS yang menerapkan PKRS	RS			-	30	200,0	42	250,0	56	300,0	60	350,0	188	1.100,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 19	xx	Perluasan Penguatan Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Jumlah dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) penguatan program PHBS di rumah tangga dan PHBS di satuan sekolah	dokumen			-	2	550,0		-	2	550,0	2	700,0	6	1.800,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 19	xx	Perluasan penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Tatanan Rumah Tangga, Sekolah, dan Puskesmas	Jumlah dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) penguatan PHBS di tatanan RT, sekolah, dan Puskesmas	Dokumen			-	1	350,0		-		-		1	350,0		Dinas Kesehatan
		1.02 01 19	xx	Kampanye hidup sehat melalui berbagai media	Jumlah kampanye hidup sehat yang dilaksanakan	kali			1.228,9	65	1.290,3	65	1.290,3	65	1.290,3	65	1.290,3	250	6.390,1	Dinas Kesehatan
		1.02 01 19	xx	Pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional (HKN)	Jumlah dokumen laporan peringatan HKN	dokumen		1	444,6	1	450,0	1	450,0	1	450,0	1	450,0	5	2.244,6	Dinas Kesehatan
		1.02 01 19	xx	Pameran kesehatan	Jumlah frekuensi pelaksanaan pameran kesehatan	kali			-	5	661,5	5	661,5	5	661,5	5	661,5	20	2.646,0	Dinas Kesehatan
					Persentase Kab/Kota yg melaksanakan GERMAS	Persen	25,00	30,00		40,00		50,00		60,00		75,00				
		1.02 01 19	xx	Forum Koordinasi Pelaksanaan GERMAS	Jumlah LS yang mendukung GERMAS	institusi			-	30	105,0	32	145,0	34	150,0	36	150,0	36	550,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 19	xx	Rapat Koordinasi dengan LPLS yg mendukung GERMAS	Jumlah LPLS yang telah berkoordinasi terkait GERMAS	institusi			-	18	25,0	20	27,5	22	30,2	25	33,2	33	115,9	Dinas Kesehatan
		1.02 01 19	xx	Penggerakan Masyarakat dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kampanye GERMAS	Kab/kota			-		-		-		10	850,0	10	850,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 19	xx	Perluasan Evaluasi Pelaksanaan GERMAS	Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan GERMAS	dokumen			-	1	250,0	1	150,0		-		1	400,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 19	xx	Lomba dokter kecil	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan lomba dokter kecil	Dokumen		1	217,1											
		1.02 01 19	xx	Lomba duta GERMAS	Jumlah duta GERMAS	Orang			-	33	275,0	33	150,0	33	150,0	33	150,0	33	725,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 19	xx	Rapat koordinasi dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang mendukung kesehatan	Jumlah Ormas yang berkoordinasi	institusi/ lembaga			-	7	35,0	8	275,0	8	280,0	10	360,0	33	950,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 19	xx	Rapat Koordinasi dengan dunia usaha yg mendukung kesehatan	Jumlah Dunia usaha yang berkoordinasi	institusi/ lembaga			-	7	35,0	1	150,0	1	150,0	1	175,0	10	510,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 19	xx	Koordinasi Pengelolaan Saka Bakti Husada (SBH)	Jumlah dokumen SK terkait SBH yang diterbitkan	dokumen		1	198,9	6	125,0	7	135,0	7	135,0	8	140,0	29	733,9	Dinas Kesehatan
		1.02 01 19	xx	Perluasan Penguatan Saka Bakti Husada (SBH) dalam mendukung GERMAS	Jumlah kab/kota dengan SBH aktif	Kab/kota			-	7	125,0	7	125,0	7	125,0	8	150,0	29	525,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 19	xx	Orientasi Krida bagi anggota Saka Bakti Husada (SBH)	Ulh anggota SBH yg memahami Krida SBH	Orang			-	180	100,0	210	150,0	210	150,0	240	200,0	840	600,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 19	xx	Kemah Bakti Saka Bakti Husada (SBH)	Jumlah anggota SBH yg mengikuti perkemahan Bakti	Orang			-	300	250,0	350	250,0	350	250,0	400	300,0	1400	1.050,0	Dinas Kesehatan
					Persentase Posyandu aktif	Persen		55,00			65,00		75,00		85,00		90,00			
		1.02 01 19	xx	Rapat Koordinasi LPLS/Pojanla Posyandu Provinsi	Jumlah LPLS/Dunia usaha yang sudah mengimplementasikan kegiatannya untuk Posyandu	institusi/ lembaga			-	11	43,0	13	43,0	15	43,0	17	45,0	56	174,0	Dinas Kesehatan
1.02 01 19	xx	Forum koordinasi LPLS dalam rangka pengembangan Posyandu terintegrasi	Jumlah Kab/Kota yang mempunyai Pojanla Posyandu	Kab/kota			-	33	315,0	13	175,0		-		46		490,0	Dinas Kesehatan		

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RP/JMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	
							2019		2020		2021		2022		2023			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RP/JMD
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
		1.02 01 19	xx Workshop pembentukan kader kesehatan	Jumlah petugas yang paham dalam pembentukan kader kesehatan	Orang		225,3	-	33	225,3	-	-	33	450,6	Dinas Kesehatan			
		1.02 01 19	xx Pertemuan perencanaan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah dokumen rencana program promotkes dan pemberdayaan masyarakat	dokumen		-	1	250,0	1	250,0	1	250,0	4	1.000,0	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 19	xx Pertemuan evaluasi program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah dokumen evaluasi program promotkes dan pemberdayaan masyarakat	dokumen		-	1	250,0	1	250,0	1	250,0	4	1.000,0	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 19	xx Monitoring dan evaluasi program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah dokumen hasil monitoring evaluasi program promotkes kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	dokumen	1	301,6	1	173,0	1	173,0	1	173,0	5	993,6	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 19	xx Bimbingan teknis promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah petugas yang paham promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Orang		-	33	320,0	33	320,0	33	320,0	132	1.280,0	Dinas Kesehatan		
				Persentase desa/kelurahan siaga aktif	Persen desa/kel.	38,00	40,00	45,00	50,00		55,00	60,00	60,00	80,00	677,8	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 19	xx Penilaian desa dan kelurahan percontohan bidang kesehatan	Jumlah desa/kelurahan yang dinilai		33	677,8	-		-	-	-	33,00			Dinas Kesehatan		
		1.02 01 19	xx Penilaian kabikota pelaksanaan terkait Bidang kesehatan	Jumlah kabikota yang dilakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi promotkes	Kabikota		-	33	678,0	33	680,0	33	700,0	33	2.738,0	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 19	xx Workshop pembentukan operasional desa siaga	Jumlah Petugas yang paham dalam pembentukan operasional desa siaga	orang		33	235,9	-	-	-	-	-	-	235,9	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 19	xx Pertemuan penguatan pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam mendukung kesehatan	Jumlah kabikota yang mengikuti pertemuan	Kabikota		-	7	175,0	8	275,0	8	280,0	10	1.090,0	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 19	xx Rapat berkala pembentukan operasional desa siaga tingkat provinsi	Jumlah liris yang mengikuti pembentukan operasional desa siaga	liris		-	55/11	90,0	-	-	-	4	90,0	Dinas Kesehatan			
		1.02 01 19	xx Pertemuan refreshing petugas promosi kesehatan kabikota dalam pelaksanaan desa siaga	Jumlah kabikota yang mengikuti refreshing pelaksanaan desa siaga	Kabikota		-	33	240,0	-	-	-	-	-	240,0	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 19	xx Pertemuan penguatan pelaksanaan desa siaga di Tk. Provinsi	Jumlah kabikota yang mengikuti pertemuan penguatan	Kabikota		-	-	33,00	250,0	-	-	-	-	250,0	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 19	xx Penilaian kabikota dalam pelaksanaan desa siaga aktif terbaik	Jumlah kabikota yang dinilai	Kabikota		-	-	-	33	350,0	33	350,0		700,0	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 38	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	Persen	70,00	79,00	11.677,2	87,00	12.177,2	96,00	12.177,2	98,00	12.916,2	100,00	20.500,0	69.448	Dinas Kesehatan
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Persen	n/a	35,00		45,00		55,00		65,00	75,00		75,00		Dinas Kesehatan
		1.02 01 38	xx Rapat Koordinasi Teknis Pelayanan Kesehatan Primer	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut pelayanan kesehatan primer	Dokumen		-	1	237,8	1	237,8	1	261,6	1	287,7	4	1.024,9	Dinas Kesehatan
		1.02 01 38	xx Koordinasi Manajemen Puskesmas	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut manajemen puskesmas	Dokumen		1	261,2	-	-	-	-	1	270,0	2	531,2	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 38	xx Workshop Penguatan Manajemen Puskesmas	Jumlah orang yang paham manajemen puskesmas	Orang		-	33	185,0	33	185,0	33	194,3	33	204,0	132	768,2	Dinas Kesehatan
		1.02 01 38	xx Monitoring dan Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Jumlah dokumen money program pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokumen		-	1	165,4	1	165,4	1	173,7	1	190,0	4	694,5	Dinas Kesehatan
		1.02 01 38	xx Workshop pelayanan kesehatan klinik	Jumlah orang yang paham pelayanan kesehatan klinik	Orang		33	285,5		-	-	-	-	33	285,5	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 38	xx Penilaian FKTP Berprestasi di KabKota	Jumlah FKTP berprestasi yang dinilai di kabikota	FKTP		10	184,8	10	184,8	10	184,8	10	184,8	50	924,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 38	xx Pertemuan Teknis Puskesmas menuju BLUD	Jumlah orang yang paham teknis puskesmas menuju BLUD	Orang		-	66	250,0		66	275,0		132	525,0	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 38	xx Koordinasi Teknis Puskesmas Percontohan	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut puskesmas percontohan	Dokumen		-	-	1	250,0		-	1	275,0	2	525,0	Dinas Kesehatan	
				Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) dengan Pendekatan Keluarga	%		25		30		40	50	60					Dinas Kesehatan
		1.02 01 38	xx Koordinasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut PIS-PK	Dokumen		1	202,4		-	1	202,4		1	202,4	3	607,2	Dinas Kesehatan
		1.02 01 38	xx Workshop Keperawatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang yang paham keperawatan kesehatan masyarakat	Orang		33	190,5	33	200,0		-	33	210,0	-	99	600,5	Dinas Kesehatan
		1.02 01 38	xx Pelatihan Perawat Koordinator Keperawatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang yang terampil dalam Perkesmas	Orang		-	30	145,0	30	145,0	30	152,3	30	159,9	120	602,1	Dinas Kesehatan
		1.02 01 38	xx Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)	Jumlah dokumen hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi perkesmas	Dokumen		-	1	150,0	1	150,0	1	157,5	1	165,4	4	622,9	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB			
							2019		2020		2021		2022		2023			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		Target	Rp (juta)	
		1.02 01 38	xx Pertemuan Penguatan Cluster Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	Jumlah orang yang paham tentang PIS PK	Orang			66	250,0			66	250,0			132	500,0	Dinas Kesehatan		
				Persentase FKTP yang Menyenggarakan Kesehatan Tradisional	Persen			30,00		35,00		40,00	45,00		50,00	50,00				
		1.02 01 38	xx Workshop Pelayanan Kesehatan Tradisional bagi Pengelola Program Yankestrad	Jumlah orang paham pelayanan kesehatan tradisional	Orang			-	33	160,0	160,0	33	168,0	33	176,4	132	684,4	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 38	xx Koordinasi Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut pelayanan kesehatan tradisional	Dokumen			1	389,8	1	210,0	1	220,5	1	231,5	5	1.241,8	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 38	xx Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah dokumen hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi yankestrad	Dokumen			-	1	150,0	1	150,0	1	157,5	1	165,4	4	622,9	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 38	xx Pelatihan Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan Akupresure bagi Petugas Puskesmas	Jumlah orang terampil dalam pelaksanaan asuhan mandiri pemanfaatan TOGA dan akupresure	Orang			-	30	130,0		-	30	136,5		60	266,5	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 38	xx Pelayanan Akupresure	Jumlah orang yang memperoleh pelayanan akupresur yang disediakan pada event tertentu	Orang			100	37,1	100	40,0	100	40,0	100	40,0	500	197,1	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 38	xx Pelatihan Akupresure bagi Petugas Puskesmas	Jumlah orang terampil dalam pelayanan akupresure	Orang				-	-	-	30	130,0	-	30	136,5	60	266,5	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 38	xx Pembinaan Penyehat Tradisional oleh Tim Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (P3T)	Jumlah dokumen hasil pembinaan penyehat tradisional	Dokumen			-	1	40,0		-	1	40,0	100	102	120,0	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 38	xx Sosialisasi Gniya Sehat	Jumlah orang yang paham tentang gniya sehat	Orang			-	-	45	150,0		-	-	-	45	150,0	Dinas Kesehatan		
				Persentase Puskesmas yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Bergerak di DTPK	Persen			30,00		40,00		50,00	55,00		60,00	60,00				
		1.02 01 38	xx Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) di daerah sulit, rawan bencana/kumuh, terpendid dan sangat terpendid	Jumlah pelayanan kesehatan bergerak yang dilaksanakan	Layanan			6	2.720,3	5	2.720,3	6	2.720,3	6	2.866,3	6	2.989,1	29	14.016,3	Dinas Kesehatan
		1.02 01 38	xx Rapat Koordinasi Pelayanan Kesehatan Bergerak	Jumlah dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) pelayanan kesehatan bergerak	Dokumen			0	-	1	150,0	1	150,0	1	157,5	1	165,4	4	622,9	Dinas Kesehatan
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rawat Inap yang Menerapkan Pelayanan Kegawatdaruratan	Persen			100,00		100,00		100,00	100,00		100,00	100,00				
		1.02 01 38	xx Pelatihan Pengelolaan Program Kerjasama antara Puskesmas, UTD dan Rumah Sakit dalam Pelayanan Darah untuk Menurunkan AKI	Jumlah orang yang terampil dalam Pelayanan Darah untuk Menurunkan AKI	Puskesmas			-	30	140,0	30	140,0	30	140,0	30	140,0	120	560,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 38	xx Pelatihan PPGD (Pertolongan Pertama Gawat Darurat)	Jumlah orang yang terampil dalam pertolongan pertama gawat darurat	Orang			-	30	210,0		-	30	220,5		60	430,5	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 38	xx Pelatihan GELS (General Emergency Life Support)	Jumlah dokter yang terampil dalam pelayanan gawat darurat	Orang				-	-	30	210,0	-	30	220,5	60	430,5	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 38	xx Pelatihan BTCLS (Basic Trauma Cardio Life Support)	Jumlah perawat yang terampil dalam pelayanan gawat darurat trauma dan kardi	Orang				-	-	30	210,0	-	30	220,5	60	430,5	Dinas Kesehatan		
				Persentase Akreditasi FKTP	Persen			78,80		87,40		96,00	98,10		100,00	100,00				
		1.02 01 38	xx Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Pendamping dalam Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Jumlah orang yang terampil dalam mendampingi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) melaksanakan akreditasi	Orang			-	198	800,0	800,0	198	800,0	-	-	396	1.800,0	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 38	xx Pendampingan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pendampingan	Puskesmas			200	1.162,5		-	-	-	-	200	1.162,5				
		1.02 01 38	xx Workshop Peningkatan Mutu Kapasitas Tim Pendamping	Jumlah petugas yang paham dalam mendampingi pelaksanaan akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	orang			-	48	190,0		-	48	200,0		96	390,0	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 38	xx Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Jumlah dokumen hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Dokumen			-	1	150,0	1	150,0	1	170,0	1	180,0	4	650,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 38	xx Pertemuan Pencapaian Akreditasi Paripurna Puskesmas	Jumlah orang yang paham dalam pencapaian akreditasi paripurna puskesmas	Orang				66	240,0	66	240,0	66	260,0	66	270,0	264	1.010,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 38	xx Sosialisasi Akreditasi Klinik	Jumlah orang yang paham dalam melaksanakan akreditasi klinik	Orang				33	140,0		-	-	-	-	33	140,0			Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		1.02 01 38	xx	Monitoring dan Evaluasi Akreditasi Klinik	Dokumen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGKUNG JAWAB	
							2019		2020		2021		2022		2023			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
		1.02 01 38	xx	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Dokumen		-	2	200,0	2	200,0	2	210,0	2	220,5	830,5	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 38	xx	Pertemuan Pengembangan Telemedicine dalam Menunjang Akses Pelayanan	Orang		-	66	250,0	66	250,0	0	-	66	275,0	198	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 38	xx	Pertemuan Pemantapan Pemenuhan Standar FKRTL	Orang		-	66	250,0	33	140,0	39	150,0	66	250,0	204	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 38	xx	Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit	Kasus		100	1.169,2	-	-	-	-	-	-	100	1.169,2	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 38	xx	Operasional Badan Pengawas Rumah Sakit dan Sekretariat BPRS Provinsi Sumatera Utara	bulan		-	12	600,0	12	600,0	12	726,0	12	796,6	48	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 38	xx	Pertemuan Penguatan Peran Saluran Pengawas Internal (SPI) dan Komite Medik di Rumah Sakit	RS		-	-	-	79	250,0	-	-	-	79	250,0	Dinas Kesehatan	
					Persen	91,67	92,50	94,00		96,00		98,00		100,00	100,00			
		1.02 01 38	xx	Workshop Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) 24 jam	Orang		30	206,3	-	25	150,0	25	150,0	0	-	50	506,3	Dinas Kesehatan
		1.02 01 38	xx	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK)	Dokumen		1	177,5	1	100,0	1	100,0	1	110,0	1	121,0	4	Dinas Kesehatan
		1.02 01 38	xx	Workshop Manajemen dan Konseling Laktasi di Rumah Sakit	Orang		34	132,7	40	150,0	40	150,0	-	-	-	80	432,7	Dinas Kesehatan
		1.02 01 38	xx	Koordinasi dan Sinkronisasi antara Dinas Kesehatan Kab/Kota dan RS Kab/Kota dalam Manajemen Program PONEK 24 jam	Dokumen		-	1	150,0	-	-	1	165,0	-	-	2	315,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 38	xx	Sosialisasi sistem rujukan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) dan pelayanan obstetri maternal neonatal			34	103,3	-	-	-	-	-	-	0	103,3	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 38	xx	Pertemuan Penatalaksanaan Kegawatdaruratan Neonatus	Orang		-	-	-	40	150,0	-	-	-	40	150,0	Dinas Kesehatan	
					Persen	63,00	73,00	76,00		85,00		92,00		100,00	355	-		
		1.02 01 38	xx	Workshop penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	RSUD		24	181,2	-	-	-	-	-	-	24	181,2	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 38	xx	Koordinasi Pola Penerapan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)	RS		18	127,4							18	127,4	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 38	xx	Koordinasi Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)	Dokumen		-	1	200,0	-	-	1	210,0	-	2	410,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 38	xx	Pertemuan Penguatan Implementasi PPK-BLUD	Orang		-	-	-	40	150,0	-	-	40	165,0	80	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 38	xx	Workshop Evaluasi Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	dokumen			201,4	-	-	-	40	150,0		40	351,4	Dinas Kesehatan	
					Persen	87,00	90,00	93,00		95,00		98,00		100,00	100,00			
		1.02 01 38	xx	Peningkatan Kemampuan Penanggulangan Pertama pada Gawat Darurat (PPGD) bagi petugas pelayanan Gawat Darurat RS	Orang		-	35	150,0	-	-	35	160,0	-	70	310,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 38	xx	Peningkatan kemampuan General Emergency Life Support (GELS) bagi petugas emergency life support	Orang		-	-	-	35	150,0	-	-	35	160,0	70	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 38	xx	Pertemuan Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) di Rumah Sakit	Orang		-	76	160,0	-	-	76	170,0	-	152	542,9	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 38	xx	Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Gawat Darurat di Rumah Sakit	Dokumen		-	1	100,0	1	100,0	1	100,0	1	100,0	152	400,0	Dinas Kesehatan
					Persen	na	24,00	36,00		48,00		61,00		73,00	73,00			

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT-COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB			
							2019		2020		2021		2022		2023			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
		1.02 01 38	xx Sosialisasi Pembentukan Public Safety Center (PSC) di Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang paham tentang pembentukan PSC di kabupaten/kota	Kab/Kota			-	150,0			-	33	165,0		66	315,0	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 38	xx Workshop Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah orang yang paham tentang SPGDT	Orang		66	232,3	30	150,0	30	140,0	30	34	150,0	34	165,0	190	837,3	Dinas Kesehatan
		1.02 01 38	xx Rapat Koordinasi Linfas Sektor Terkait Pembentukan Public Safety Center (PSC)	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut pembentukan PSC	Dokumen			-	75,0	1	75,0	1	75,0	1	150,0	1	75,0	4	375,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 38	xx Monitoring dan Evaluasi Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu	Jumlah dokumen hasil movev SPDT	Dokumen		1	109,4	1	100,0	1	100,0	1	1	120,0	1	130,0	5	559,4	Dinas Kesehatan
		1.02 01 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	Persen	85,00	90,00	11.429,0	92,00	11.429,0	94,00	11.429,0	95,00	11.769,0	96,00	20.929,0	96,00	66.985	Dinas Kesehatan	
				Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	Persen		90,00		92,00		94,00		95,00		96,00		96,00		Dinas Kesehatan	
		1.02 01 15	xx Pengadaan Obat, Vaksin dan Bahan Medis Habis Pakai	Jumlah item obat, vaksin, dan BMHP yang diadakan	Paket		70	7.282,5	-	-	-	-	-	-	-	-	70	7.282,5	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 15	xx Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah item obat dan perbekalan kesehatan buffer stok provinsi yang tersedia	Item			-	70	5.806,6	75	6.157,0	80	5.414,7	80	5.207,5	305	22.585,8	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 15	xx Perencanaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Obat (RKO)	dokumen			751,4	1	400,0	1	400,0	1	450,0	1	450,0	4	2.451,4	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 15	xx Workshop Implementasi e-logistik pada Instalasi Farmasi	Jumlah orang yang paham dalam implementasi e-logistik	Orang		66	479,9	33	150,0	33	160,0	33	170,0	33	180,0	198	1.139,9	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 15	xx Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan sesuai Standar pada Kab/Kota Pilot Project	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis manajemen pengelolaan obat dan perbekes	Dokumen			-	1	100,0	1	110,0	1	100,0	1	80,0	4	390,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 15	xx Pemenuhan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	unit		51	568,2	20	550,8	20	600,0	20	600,0	20	10.600,0	131	12.919,0	Dinas Kesehatan	
				Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas	Persen	44,63	49,00		55,00		60,00		65,00		70,00		70,00		Dinas Kesehatan	
		1.02 01 15	xx Workshop Penggunaan Obat Rasional (POR) di Sarana Pelayanan Kesehatan	Jumlah orang yang paham tentang penggunaan obat rasional	Orang		-	-	33	270,0	33	280,0	33	290,0	33	300,0	132	1.140,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 15	xx Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Menggunakan Obat (Gema Cermat)	Jumlah orang yang paham tentang Gema Cermat	Orang		-	-	450	500,0	450	500,0	450	500,0	450	500,0	1800	2.000,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 15	xx Workshop Penggunaan Antibiotik yang Rasional bagi Tenaga Kesehatan	Jumlah orang yang paham tentang penggunaan antibiotik yang rasional	Orang		-	-	66	260,0	66	270,0	66	280,0	66	290,0	284	1.100,0	Dinas Kesehatan	
				Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang melaksanakan pelayanan kefarmasian	Persen				40,00		43,00		46,00		49,00		49,00		Dinas Kesehatan	
		1.02 01 15	xx Workshop Pelayanan Kefarmasian	Jumlah orang yang paham tentang pelayanan kefarmasian sesuai standar	Orang		-	-	33	150,0	39	180,0	33	160,0	39	190,0	144	680,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 15	xx Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar	Jumlah dokumen Rencana dan Tindak Lanjut (RTL) pelayanan kefarmasian	dokumen		-	-	1	150,0	1	175,0	1	190,0	1	200,0	4	715,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 15	xx Bimbingan Teknis Pelayanan Kefarmasian	Jumlah orang yang paham tentang pelayanan kefarmasian sesuai standar	Orang			314,9	70	180,0	30	150,0	55	160,0	-	-	2	804,9	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 15	xx Workshop Penggunaan Antimikroba dengan Bijak	Jumlah petugas yang paham dalam penggunaan antimikroba dengan bijak	Orang		-	-	39	180,0		-	39	200,0		78	380,0	Dinas Kesehatan		
				Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian serta makanan minuman yang dibina agar memenuhi standard Good Distribution Practices (GDP) dan Good Manufacture Practices (GMP)	Persen	55,00	60,00		65,00		70,00		75,00		80,00		80,00		Dinas Kesehatan	
		1.02 01 15	xx Workshop dalam rangka Cara Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi yang Baik	Jumlah orang yang paham Cara Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi yang Baik	Orang			141,0	60	210,0	60	220,0	60	230,0	60	240,0	240	1.041,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 15	xx Penelaan Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi	Jumlah dokumen hasil penelaan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi	dokumen		-	-	1	210,0	1	220,0	1	230,0	1	240,0	4	900,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 15	xx Workshop Pelaksanaan Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Sediaan Farmasi	Jumlah orang yang paham tentang pelaksanaan pedoman pembinaan dan pengawasan sediaan farmasi	Orang		-	-	33	150,0	-	-	33	165,0	-	-	66	315,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 15	xx Biaya Operasional Pengelolaan Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO)	Jumlah orang yang mendapat biaya operasional pengelolaan P4TO	orang		12	233,1	10	210,0	12	220,0	12	230,0	12	240,0	58	1.133,1	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 15	xx Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO)	Jumlah sarana dan prasarana P4TO yang diadakan	Paket		-	-	1	210,0	1	220,0	1	230,0	1	240,0	4	900,0	Dinas Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
							2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
		1.02 01 15	xx Orientasi petugas Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO)	Jumlah orang yang paham tentang pengolahan P4TO	Orang		15	43,0	-	-	15	50,0	-	-	93,0	Dinas Kesehatan			
		1.02 01 15	xx Koordinasi pemanfaatan Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO)	Jumlah dokumen rencana tindak lanjut pemanfaatan P4TO	Dokumen		1	186,8											
		1.02 01 15	xx Sosialisasi Makanan Jajanan Anak Sekolah	Jumlah orang yang paham tentang makanan jajanan anak sekolah	Orang		-	100	100,0	100	110,0	100	120,0	100	130,0	400	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 15	xx Pembinaan dan pengawasan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sarana IRTP	Dokumen		1	278,9	1	120,0	1	132,0	1	280,0	1	319,0	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 15	xx Pelatihan Tenaga Pengawas Keamanan Pangan (PKP)	Jumlah orang yang terampil dalam PKP	Orang		-	66	290,0	-	-	66	290,0	-	132	580,0	Dinas Kesehatan		
				Persentase produk alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat	Persen	69,00	74,00	80,00	84,00	87,00	90,00	90,00							
		1.02 01 15	xx Workshop tentang Cara Produksi Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) dan Cara Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik (CPPKRTB)	Jumlah orang yang paham CPAKB dan CPPKRTB	Orang		60	511,7	99	328,6	99	361,5	99	387,6	99	437,4	2.036,7	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 15	xx Workshop Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB)	Jumlah orang yang paham CDAKB	Orang		100	680,1	105	260,0	110	275,0	115	302,5	120	332,8	550	1.840,4	Dinas Kesehatan
		1.02 01 15	xx Monitoring dan Evaluasi CPAKB, CPPKRTB dan CDAKB pada Sarana Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Distribusi Alat Kesehatan	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut CPAKB, CPPKRTB dan CDAKB	Dokumen		-	1	200,0	1	250,0	1	250,0	1	250,0	4	950,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 15	xx Koordinasi Linas Sektor dalam rangka Peningkatan Penggunaan Alat Kesehatan Dalam Negeri	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut program peningkatan penggunaan alat kesehatan dalam negeri	Orang		-	90	260,0	100	262,5	110	275,6	120	288,4	420	1.077,5	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 15	xx Edukasi Gemas Penggunaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang Benar	Jumlah orang terpapar cara penggunaan Alat Kesehatan dan PKRT yang baik dan benar	Orang		-	75	180,0	80	176,0	85	193,6	90	213,0	330	742,6	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 35	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 (lima) jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif	Persen	20,00	30,00	18.710,2	40,00	9.552,7	50,00	9.552,7	60,00	9.892,7	74,00	13.052,7	74,00	60.761	Dinas Kesehatan
				Persentase Pelatihan Teknis dan Fungsional yang Terakreditasi	Persen	40,00	50,00	60,00	60,00	70,00	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00		Dinas Kesehatan
		1.02 01 35	xx Sosialisasi akreditasi pelatihan	Jumlah peserta memahami tentang akreditasi pelatihan	Orang		-	50	50	50	50	50	-	-	100	-	-	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 35	xx Rapat koordinasi perencanaan kebutuhan pelatihan	Jumlah dokumen rencana kebutuhan pelatihan	dokumen		-	1	1	1	1	1	1	1	4	-	-	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 35	xx Pelatihan TOC	Jumlah nakes yg terlatih TOC	Orang		-	30	30	30	30	30	30	30	120	-	-	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 35	xx Monitoring evaluasi pasca pelatihan (EPP)	Jumlah pelatihan yang dilakukan EPP	pelatihan		-	33	33	33	33	33	33	33	132	-	-	Dinas Kesehatan	
				Persentase Tenaga Kesehatan yang Dilatih pada Pelatihan Kesehatan yang Terakreditasi	Persen	n/a	3,00	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		
		1.02 01 35	xx Pelatihan Jabatan Fungsional Administrasi Kesehatan	Jumlah petugas yang terlatih fungsional administrasi kesehatan	Orang		-	30	220,0	30	220,0	30	220,0	30	220,0	120	880,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 35	xx Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Jumlah petugas yang terlatih fungsional penyuluh kesehatan masyarakat	Orang		60	340,3	30	220,0	30	220,0	30	220,0	30	220,0	180	1.220,3	Dinas Kesehatan
		1.02 01 35	xx Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian	Jumlah petugas yang terlatih fungsional sanitarian	Orang		30	187,2	30	220,0	30	220,0	30	220,0	30	220,0	150	1.067	Dinas Kesehatan
		1.02 01 35	xx Pelatihan Jabatan Fungsional Nutrisi	Jumlah petugas yang terlatih fungsional nutrisio	Orang		-	30	220,0	30	220,0	30	220,0	30	220,0	120	880,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 35	xx Pelatihan Jabatan Fungsional Ahli Laboratorium Klinik	Jumlah petugas yang terlatih fungsional ahli laboratorium klinik	Orang		-	30	220,0	30	220,0	30	220,0	30	220,0	120	880,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 35	xx Pelatihan Jabatan Fungsional Farnasi	Jumlah petugas yang terlatih fungsional farmasi	Orang		-	30	220,0	30	220,0	30	220,0	30	220,0	120	880,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 35	xx Pelatihan Keluarga Sehat	Jumlah petugas yang terlatih Keluarga Sehat	Orang		210	1.234,3	595	1.234,3	-	-	-	-	805	2.468,6	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 35	xx Pelatihan Manajemen Puskesmas	Jumlah petugas yang terlatih Manajemen Puskesmas	Orang		180	1.255,9	132	1.255,9	-	-	-	-	312	2.512	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 35	xx Pelatihan pelayanan terpadu penyakit tidak menular di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	Jumlah petugas yang terlatih pelayanan terpadu PTM	Orang		90	347,7	-	-	-	-	-	-	-	347,7	Dinas Kesehatan		

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT-COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RP.JMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB		
							2019		2020		2021		2022		2023			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RP.JMD	
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		Target	Rp (juta)
		1.02 01 35	xx Pelatihan peningkatan kesehatan jiwa remaja melalui keterampilan sosial	Jumlah petugas yang terlatih dalam peningkatan kesehatan jiwa remaja melalui keterampilan sosial	Orang		30	186,6	-	-	-	-	-	-	-	-	186,6	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 35	xx Pelatihan assesment wajib lapor pecandu narkoba	Jumlah petugas yang terlatih dalam assesment wajib lapor pecandu narkoba	Orang		30	152,7	-	-	-	-	-	-	-	-	152,7	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 35	xx Pelatihan deteksi dini dan intervensi singkat penyalahgunaan NAPZA dengan menggunakan Metode Alcohol Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST)	Jumlah petugas yang terlatih dalam penggunaan metode ASSIST	Orang		30	162,8	-	-	-	-	-	-	-	-	162,8	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 35	xx Pelatihan Deteksi Dini dan Penatalaksanaan Gangguan Jiwa	Jumlah petugas yang terlatih dalam deteksi dini dan penatalaksanaan gangguan jiwa	Orang		90	334,7	-	-	-	-	-	-	-	-	334,7	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 35	xx Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk Balita	Jumlah petugas yang terlatih tatalaksana gizi buruk balita	Orang		60	212,9	-	-	-	-	-	-	-	-	212,9	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 35	xx Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi Petugas Puskesmas	Jumlah orang yang terampil dalam pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Puskesmas	Orang		60	230,2	60	253,7	60	266,4	60	279,7	60	293,7	300	1.323,7	Dinas Kesehatan
		1.02 01 35	xx Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit	Jumlah petugas yang terlatih K3 RS	Orang		30	128,9	-	-	-	-	-	-	-	-	30	129	Dinas Kesehatan
		1.02 01 35	xx Pelatihan Imunisasi bagi Vaksinator Puskesmas	Jumlah orang yang terampil dalam program imunisasi	Orang		30	174,1	60	221,4	60	232,5	60	244,1	60	256,3	270	1.128,4	Dinas Kesehatan
		1.02 01 35	xx Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat Jenjang Terampil dan Ahli	Jumlah orang yang mampu untuk jabatan fungsional perawat jenjang terampil dan ahli	Orang			-	60	350,0	60	367,5	60	385,9	60	405,2	240	1.508,5	Dinas Kesehatan
		1.02 01 35	xx Pelatihan Pengelola Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Pemberdayaan Keluarga di Puskesmas	Jumlah orang yang terampil dalam mengelola komunikasi perubahan perilaku untuk pemberdayaan keluarga di Puskesmas	Orang			-	60	211,6	60	222,2	60	233,3	60	245,0	240	912,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 35	xx Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang yang mampu untuk jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat	Orang			-	60	363,8	60	382,0	60	401,1	60	421,1	240	1.568,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 35	xx Pelatihan Surveilans dalam Mendukung Advokasi Kesehatan	Jumlah orang terampil dalam melakukan surveilans yang mendukung advokasi kesehatan	Orang		30	152,4	30	163,8	30	172,0	30	180,6	30	189,6	150	858,4	Dinas Kesehatan
		1.02 01 35	xx Pelatihan Tim Penilai Jabatan Fungsional Kesehatan	Jumlah orang yang mampu menilai jabatan fungsional kesehatan	Orang			-	30	108,0	30	113,4	30	119,1	30	125,0	120	465,5	Dinas Kesehatan
		1.02 01 35	xx Evaluasi pasca pelatihan tenaga kesehatan	Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan tenaga kesehatan	Dokumen			-	1	96,4	1	106,0	1	116,6	1	128,3	4	447,4	Dinas Kesehatan
		1.02 01 35	xx Pemenuhan sarana dan prasarana UPT. Pelatihan Kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Unit		2	9.657,5	7	3.620,0	5	3.982,0	5	4.380,2	5	4.818,2	24	26.457,9	Dinas Kesehatan
		1.02 01 35	xx Pengembangan diklat pelatihan tenaga kesehatan	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut pengembangan diklat pelatihan tenaga kesehatan	Dokumen			-	1	250,0	1	262,5	1	275,6	1	289,4	4	1.077,5	Dinas Kesehatan
		1.02 01 35	xx Pengembangan laboratorium lapangan pelatihan kesehatan	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut pengembangan laboratorium lapangan pelatihan kesehatan	Dokumen			-	-	-	1	200,0	1	220,0	1	242,0	1	682,0	Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 (lima) jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif	Persen	20,00	30,00	40,00		50,00		60,00		74,00		74,00			
		1.02 01 35	xx Sosialisasi rencana pemenuhan tenaga promotif dan preventif	Jumlah peserta yang memperoleh sosialisasi pemenuhan 5 jenis tenaga promotif dan preventif di Puskesmas	Orang				66	202,1	50	222,3	0	244,5	0	269,0	116	937,9	Dinas Kesehatan
		1.02 01 35	xx Workshop pemenuhan tenaga promotif dan preventif	Jumlah peserta yang memahami penyusunan rencana pemenuhan 5 jenis tenaga promotif dan preventif di Puskesmas	Orang				50	300,0	50	300,0	50	300,0	50	300,0	200	1.200,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 35	xx Monitoring evaluasi pemenuhan tenaga kesehatan promotif dan preventif	Jumlah Puskesmas yang dilakukan monw pemenuhan 5 jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif	Puskesmas				58	250,0	58	250,0	58	260,0	58	260,0	232	1.000,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 35	xx Konsultasi pemenuhan tenaga kesehatan promotif dan preventif	Jumlah petugas yang melakukan konsultasi pemenuhan 5 jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif di Puskesmas	Orang				3	50,0	3	50,0	3	50,0	3	50,0	12	200,0	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT-COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RP-JMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							2019			2020			2021			2022				2023			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERODE RP-JMD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							Rp (juta)		Target	Rp (juta)		Target	Rp (juta)		Target	Rp (juta)		Target		Rp (juta)		Target	Rp (juta)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							Target		Target		Target		Target		Target		Target			Target		Target																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				Persentase tenaga kesehatan yang telah didata berdasarkan pemetaan di Rumah Sakit dan Puskesmas	Persen	30,00		40,00		50,00			60,00		70,00		80,00		80,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUI COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB		
							2019		2020		2021		2022		2023				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
		1.02 01 34	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit/ Rumah Sakit Khusus/ Laboratorium Kesehatan	Persentase Rumah Sakit/ Rumah Sakit Khusus/ Laboratorium Kesehatan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memenuhi standar Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA)	Persen	0	-	27.055,0	20,00	27.555,0	40,00	27.555,0	60,00	82.895,0	80,00	27.895,0	192.955	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 34	xx Peningkatan pelayanan kesehatan UPT, RS Khusus Mata	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT, RS Khusus Mata	Persen		80	3.047,5	90	2.988,0	100	3.062,7	100	13.387,5	100	3.139,3	470	25.625,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 34	xx Peningkatan pelayanan kesehatan UPT, RS Khusus Paru	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT, RS Khusus Paru	Persen		60	5.281,2	70	5.281,2	80	5.413,2	90	15.600,0	100	5.548,6	100	38.124,2	Dinas Kesehatan
		1.02 01 34	xx Peningkatan pelayanan kesehatan UPT, RSU Kusata Lausimomo	Persentase kesembuhan pasien reaksi kusta di UPT, RS Kusata Lau Simono	Persen		25	3.531,5	30	2.110,0	30	2.162,8	30	2.553,1	30	2.216,8	30	12.574,2	Dinas Kesehatan
		1.02 01 34	xx Peningkatan pelayanan kesehatan UPT, RS Indrapura	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT, RS Indrapura	Persen		20	5.333,1	50	5.333,1	70	5.466,4	90	29.709,0	100	5.603,1	100	51.444,7	Dinas Kesehatan
		1.02 01 34	xx Peningkatan pelayanan kesehatan UPT, Laboratorium Kesehatan	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sesuai standar di UPT, Laboratorium Kesehatan	Persen		82,5	937,9	83,0	1.162,4	83,5	1.191,5	84,0	1.373,7	84,5	1.221,2	84,5	5.886,7	Dinas Kesehatan
		1.02 01 34	xx Penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) pada fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah insitusi fasyankes yang memperoleh dukungan pemenuhan SPA	unit		5	8.473,4	5	10.454,7	5	10.027,2	5	19.005,1	5	9.929,0	25	57.889,4	Dinas Kesehatan
		1.02 01 34	xx Akreditasi laboratorium kesehatan daerah	Jumlah insitusi labkes yang memperoleh dukungan akreditasi	unit		1	450,0	1	225,6	1	231,2	1	266,6	1	237,0	5	1.410,5	Dinas Kesehatan
		1.02 01 34	xx Akreditasi UPT, RS Indrapura	Jumlah insitusi RS yang memperoleh dukungan akreditasi	unit		-	-	1	600,0	1	-	1	726,0	1	-	4	1.326,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	Persen	na	100,00	11.943,8	100,00	12.443,8	100,00	12.443,8	100,00	12.783,8	100,00	15.943,8	100,00	65.559	Dinas Kesehatan
				Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) 80%	Persen	80,00	83,00		86,00		89,00		92,00		95,00		95,00		Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Workshop penguatan rantai dingin vaksin	Imunisasi Dasar Lengkap	Orang		33	304,2	66	600,0	66	650,0	66	650,0	66	700,0	297	2.904,2	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Surveilans kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)	Jumlah kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi tertada dan di investigasi dengan baik	Kasus		20	173,0	20	250,0	20	260,0	20	300,0	33	300,0	113	1.283,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Dukungan Manajemen penguatan rantai vaksin	Jumlah Kab/Kota yang mampu melaksanakan Penguatan rantai vaksin (bundling)	Kab/kota		33	-	33	650,0	33	800,0	33	850,0	33	900,0	165	3.200,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Monitoring cold chain	Jumlah kab/kota yang dilakukan monitoring cold chain	Kab/kota		33	217,2		-						-		217	Dinas Kesehatan
				Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	90,00	93,00		93,50		94,00		95,00		96,00		96,00		Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Program Imunisasi	Jumlah dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) program imunisasi	dokumen			-	1	300,0	1	350,0	1	350,0	1	350,0	4	1.350,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Perencanaan dan evaluasi logistik imunisasi	Jumlah dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) logistik imunisasi	dokumen			246,9	1	400,0	1	400,0	1	450,0	1	450,0	4	1.946,9	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Integrasi pencapaian cakupan program Imunisasi dan surveilans PDSi	Jumlah Kab/Kota yang terpapar mengenai integrasi antara kegiatan surveilans PDSi dengan kegiatan Imunisasi	Kab/kota			472,7	33	600,0	33	850,0	33	850,0	33	900,0	132	3.672,7	Dinas Kesehatan
				Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat Imunisasi DPT HB/Hb Lanjutan	Persen	70,00	90,00		92,00		93,00		94,00		95,00		95,00		Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Penatalaksanaan Imunisasi lanjutan pada anak bawah dua tahun	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan monitoring pada Imunisasi pada pelaksanaan kegiatan Imunisasi Lanjutan	Kab/Kota		33	251,9	33	650,0	33	800,0	33	850,0	33	850,0	165	3.401,9	Dinas Kesehatan
				Persentase anak sekolah dasar yang mendapat Imunisasi tambahan pada Bulan Imunisasi Anak Sekolah	Persen	90,00	92,00		93,00		94,00		95,00		96,00		96,00		Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RP JMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB				
							2019		2020		2021		2022		2023			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RP JMD			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		Target	Rp (Juta)		
		1.02 01 33	xx	Pemantapan Imunisasi Lanjutan pada anak usia sekolah	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pemantauan untuk kegiatan imunisasi lanjutan dan Tambahan khususnya di Bulan Imunisasi Anak Sekolah	Kab/kota		33	598,4	33	650,0	33	800,0	33	850,0	33	900,0	165	3.798,4	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 33	xx	Koordinasi program imunisasi pada Institusi Pendidikan	Jumlah Institusi Pendidikan/ Sekolah yang terpapar mengenai program imunisasi khususnya pemberian imunisasi Lanjutan/ Tambahan	instansi	4	6	111,4	6	650,0	6	800,0	6	850,0	6	900,0	30	3.311,4	Dinas Kesehatan	
					Angka Non Polio Acute Flaccid Paralysis (AFP) per 100.000 Anak Usia <15 Tahun	per 100.000 penduduk	1,8	≥ 2		≥ 2								≥ 2			
		1.02 01 33	xx	Penemuan Kasus Non Polio AFP dalam rangka Eradikasi Polio	Jumlah kasus Acute Flaccid Paralysis yang ditemukan dan diperiksa laboratorium	Kasus		-	91	200,0	91	200,0	91	200,0	91	200,0	364	800,0		Dinas Kesehatan	
		1.02 01 33	xx	Supervisi Pelaksanaan Surveilans Acute Flaccid Paralysis (AFP)	Jumlah dokumen hasil supervisi pelaksanaan Surveilans Acute Flaccid Paralysis (AFP)	Dokumen		-	1	50,0	1	60,0	1	70,0	1	80,0	4	260,0		Dinas Kesehatan	
		1.02 01 33	xx	Penemuan Kasus Acute Flaccid Paralysis (AFP) dan Discarded Campak	Jumlah kasus AFP dan discarded campak yang ditemukan	Kasus		50	185,2	-	-	-	-	-	-	-	50	185,2		Dinas Kesehatan	
					Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) Dibandingkan Baseline Data	Persen	n/a	5,00	10,00	15,00							25,00				
		1.02 01 33	xx	Penemuan dan Pelacakan Kasus Discarded Campak dan PD3I lainnya	Jumlah kasus discarded campak dan PD3I yang ditemukan	Kasus		-	250	649,9	238	250,0	225	250,0	213	250,0	213	1.399,9		Dinas Kesehatan	
		1.02 01 33	xx	Orientasi Surveilans Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I)	Jumlah orang yang paham surveilans PD3I	Orang		-	33	350,0	66	250,0	33	160,0	33	160,0	165	920,0		Dinas Kesehatan	
		1.02 01 33	xx	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kasus Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) Integrasi	Jumlah dokumen hasil moner kasus PD3I integrasi	Dokumen		-	1	350,0	1	160,0	1	170,0	1	180,0	4	890,0		Dinas Kesehatan	
		1.02 01 33	xx	Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Surveilans Congenital Rubella Syndrome (CRS) di Rumah Sakit Sentinel	Jumlah orang yang paham pelaksanaan Congenital Rubella Syndrome (CRS) di RS sentinel	Orang		-	30	30,0	30	36,0	30	38,0	30	40,0	120	144,0		Dinas Kesehatan	
		1.02 01 33	xx	Sosialisasi Surveilans Congenital Rubella Syndrome (CRS)	Jumlah orang yang paham Surveilans Congenital Rubella Syndrome (CRS)	Orang		-	66	260,0		-	-	-	-	-	260,0		Dinas Kesehatan		
					Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi KLB Provinsi	Persen	na	100,00		100,00	100,00						100,00				
		1.02 01 33	xx	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Penyakit (KLB)	Jumlah lokasi yang dilakukan pemantauan dan penyelidikan epidemiologi pada kasus penyakit yang berpotensi menjadi Kejadian Luar Biasa	lokasi			75,0	30	650,0	30	800,0	30	850,0	30	900,0	120	3.275,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 33	xx	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi pelaporan SKDR	Kab/kota		33	126,0	33	650,0	33	800,0	33	850,0	33	900,0	33	3.326,0		Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx	Workshop Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (GIS) untuk Analisis Data Surveilans	Jumlah peserta yang memahami dan mampu memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (GIS) untuk Analisis Data Surveilans	Orang		33	186,9	66	650,0	66	800,0	66	850,0	66	900,0	264	3.386,9		Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx	Supervisi Pelaksanaan Sistem Surveilans Terpadu Penyakit (STP)	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan supervisi pelaporan Surveilans Terpadu Penyakit secara rutin	Kab/kota				33	650,0	33	500,0	33	500,0	33	500,0	33	2.150,0		Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx	Supervisi ketepatan dan kelengkapan laporan Surveilans Terpadu Penyakit (STP)	Jumlah kab/kota yang disupervisi ketepatan dan kelengkapan laporan STP	Kab/kota		33	24,8	-	-	-	-	-	-	-	33	24,8		Dinas Kesehatan	
		1.02 01 33	xx	Verifikasi Alert dan Rumor Kejadian Luar Biasa	Jumlah alert dan rumor Kejadian Luar Biasa yang diverifikasi	kejadian				32	650,0	35	800,0	35	850,0	35	900,0	137	3.200,0		Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx	Pertemuan Penguatan jejaring sistem kewaspadaan dini (SKD) dan respon penyakit berpotensi wabah	Jumlah dokumen tindak lanjut penguatan jejaring sistem kewaspadaan dini (SKD) dan respon penyakit berpotensi KLB/wabah	dokumen			1	350,0	1	350,0	1	350,0	1	350,0	4	1.400,0		Dinas Kesehatan	
		1.02 01 33	xx	Pelatihan Tim Gerak Cepat (TGC) Kejadian Luar Biasa	Jumlah tenaga yang dilatih yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat penanganan kasus KLB	batch		2		2	400,0	2	400,0	2	400,0	2	400,0	8	1.600,0		Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Jumlah penduduk pada kondisi KLB yang memperoleh pelayanan kesehatan	Orang					800,0		850,0		900,0		950,0		3.500,0		Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB			
							2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD					
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
				Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak penyakit infeksi emerging	Persen	80,00	82,00		84,00	1	350,0	86,00	400,0	1	400,0	90,00	95,00	400,0	4	1.550,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 33	xx Koordinasi antar mitra Linas Sektor dalam rangka Pelaksanaan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kejadian Penyakit Infeksi Emerging di Wilayah	Jumlah dokumen koordinasi antar mitra Linas Sektor dalam pelaksanaan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kejadian Penyakit Infeksi Emerging	dokumen					1												
		1.02 01 33	xx Penyelidikan Epidemiologi Kasus Penyakit berpolensi KLB Penyakit Infeksi Emerging di Wilayah	Jumlah Kasus penyakit infeksi emerging yang berpolensi KLB , yang terdita dengan baik catatan : kasus ini bersifat insidenitl dan khusus	kasus					5	400,0	5	400,0	5	400,0	5	400,0	20	1.600,0	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 33	xx Pembinaan dan Pembekalan Kemampuan Tim Gerak Cepat Penyakit Infeksi Emerging dalam Kesiapsiagaan dan Penanggulangan PIE	Jumlah tenaga terampil yang memiliki kemampuan dalam pelaksanaan Tim Gerak Cepat penanganan kasus Infeksi Emerging dan Kesiapsiagaan penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging catatan : kasus ini bersifat Insidenitl	Orang			33	650,0	33	700,0	33	700,0	33	700,0			132	2.750,0	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 33	xx Monitoring dan Evaluasi Deteksi Dini dan Respon Kab kota dalam Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging di Wilayah	Jumlah Kab/Kota yang lemonitoring melakukan pelaksanaan Deteksi Dini dan Respon Kab/Kota dalam penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging catatan: Lokus pada beberapa Kab/Kota yang merupakan pintu masuk negara.	Kab/kota			33	450,0	33	500,0	33	500,0	33	500,0	33	500,0	33	1.950,0	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 33	xx Penguatan Tim Gerak Cepat Penyakit Infeksi Emerging (PIE) dalam penanggulangan KLB PIE dan krisis kesehatan	Jumlah petugas TGC PIE yang terampil dalam penanggulangan KLB PIE dan krisis kesehatan	Orang		33	207,5			-							33	207,5	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 33	xx Deteksi dini Penyakit Infeksi Emerging (PIE)					51,3			-								51,3	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 33	xx Penatalaksanaan Penyakit Infeksi Emerging dan kegawatdauratan kesehatan					127,1			-								127,1	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 33	xx Monitoring dan evaluasi kegawatdauratan dan KLB Penyakit Infeksi Emerging (PIE)	Jumlah kab/kota yang dilakukan money kegawatdauratan dan KLB PIE	Kab/kota			159,8			-								159,8	Dinas Kesehatan		
				Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen	n/a	100,00		100,00			100,00				100,00		100,00				
		1.02 01 33	xx Pembinaan peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan.	Jumlah petugas kesehatan yang terlatih dalam pelaksanaan krisis kesehatan	Orang				66	350,0	66	350,0	66	350,0	66	350,0	66	350,0	264	1.400,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 33	xx Pertemuan sistem Koordinasi antar mitra linas sektor dalam penanggulangan krisis kesehatan	Jumlah dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) Koordinasi antar Mitra Linas Sektor dalam penanggulangan krisis Kesehatan	dokumen				1	350,0	1	400,0	1	400,0	1	400,0	4	1.550,0	Dinas Kesehatan			
		1.02 01 33	xx Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana berpotensi bencana yang memperoleh pelayanan kesehatan	Orang						800,0				850,0	900,0	950,0		3.500,0	Dinas Kesehatan		
				Persentase Jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istihlah kesehatan haji	Persen	70,00	75,00		80,00			85,00				90,00		95,00				
		1.02 01 33	xx Monitoring dan Evaluasi Pemenkasan Kesehatan Tahap II dalam penelapan istihlah	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan Pemenkasan Kesehatan Tahap II dalam penelapan istihlah	Kab/kota				28	400,0	28	400,0	28	400,0	28	400,0	28	400,0	28	1.600,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 33	xx Pembinaan Sistem Koordinasi Promotif dan Preventif Kesehatan Haji	Jumlah petugas pelaksana/pendukung pelaksanaan kegiatan kesehatan Jemaah Haji yang mampu melaksanakan kegiatan Promotif dan Preventif	Orang				33	400,0	33	400,0	33	400,0	33	400,0	33	400,0	132	1.600,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 33	xx Pelatihan Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Daerah	Jumlah petugas penyelenggara kesehatan Haji daerah yang terlatih catatan: Lakukan proses penyelesaian sesuai Kompetensi masing-masing	Orang				33	450,0	33	450,0	33	450,0	33	450,0	33	450,0	132	1.800,0	Dinas Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RP/JMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB					
							2019		2020		2021		2022		2023			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RP/JMD				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		Target	Rp (juta)			
		1.02 01 33	xx Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Masa Keberangkatan Jamaah Haji	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pembinaan terhadap seluruh jamaah haji pada masa pelaksanaan ibadah Haji.	Kab/kota			28	250,0	28	300,0	28	350,0	28	400,0	28	1.300,0	Dinas Kesehatan				
		1.02 01 33	xx Pendampingan pemeriksaan kesehatan haji	Jumlah dokumen laporan pendampingan pemeriksaan kesehatan haji	dokumen													Dinas Kesehatan				
		1.02 01 33	xx Pelatihan Petugas Puskesmas dalam rangka Pembinaan Masa Keberangkatan	Jumlah tenaga/petugas/pegelola haji di tingkat Puskesmas yang terlatih melaksanakan Pembinaan Kesehatan haji kepada Calon jamaah haji	Orang			28	350,0	28	450,0	28	450,0	28	450,0	112	1.700,0	Dinas Kesehatan				
		1.02 01 33	xx Pembinaan dan surveilans kesehatan haji	Jumlah kabkota yang mendapat pembinaan surveilans kesehatan haji	Kab/kota			33	185,6		-		-		-	33	185,6	Dinas Kesehatan				
		1.02 01 33	xx Supervisi Pelaksanaan Sistem Pemantauan Kewaspadaan Transmisi Penyakit Menular Pasca Haji melalui K3JH	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pemantauan kewaspadaan transmisi sistem penyakit menular pasca pelaksanaan ibadah Haji melalui K3JH.	Kab/kota				28	450,0	28	450,0	28	450,0	28	450,0	28	1.800,0	Dinas Kesehatan			
		1.02 01 33	xx Monitoring dan Evaluasi Distribusi Pemakaian dan Pemberian Vaksinasi Meningitis Meningokokokus bagi Jamaah Haji	Jumlah Kab.Kota yang memiliki tenaga terlatih dalam pemberian vaksinasi bagi jamaah bagi Jamaah Haji	Kab/kota				28	400,0	28	400,0	28	400,0	28	400,0	28	1.600,0	Dinas Kesehatan			
		1.02 01 33	xx Workshop/ Orientasi Pemberian Vaksinasi bagi Petugas Pemeriksa Kesehatan Haji Daerah	Cakupan Penduduk di Daerah Endemis Mendapatkan Pengobatan Masal Flarasis	Persen	93		95		96		97		98		100		Dinas Kesehatan				
		1.02 01 33	xx Survey Pemetaan Daerah Penyakit Flarasis	Jumlah dokumen hasil survey pemetaan daerah penyakit flarasis	Dokumen			1	116,4	1	128,0	1	130,0	1	135,0	1	140,0	5	649,4	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 33	xx Asesment Penyakit Flarasis	Jumlah dokumen hasil assesment penyakit flarasis	Dokumen			1	93,4	1	105,0	1	113,0	1	125,0	1	136,0	5	572,4	Dinas Kesehatan		
				Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Hepatitis B	Persen	na		70		80		95		98		100				Dinas Kesehatan		
		1.02 01 33	xx Bimbingan Teknis Tataaksana Hepatitis B	Jumlah orang yang paham tataaksana Hepatitis B	Orang				-	250	172,8	250	190,1	250	190,1	250	209,1	1000	762,0	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 33	xx Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan dan Pemanfaatan Vaksin HBIG	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi ketersediaan dan pemanfaatan	Dokumen			1	293,5	1	150,0	1	160,0	1	170,0	1	180,0	5	963,5	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 33	xx Koordinasi Deteksi Dini Hepatitis B dan C	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut deteksi dini Hepatitis B dan C	Dokumen			1	153,7	1	170,0	1	175,0	1	175,0	1	175,0	5	848,7	Dinas Kesehatan		
				CFR Diare pada Saat KLB	Persen	0		<1,2		<1,2		<1,2		<1,2		<1,2					Dinas Kesehatan	
		1.02 01 33	xx Survey Penjaja Makanan di Sekolah	Jumlah dokumen hasil Survey Penjaja Makanan di Sekolah	Dokumen			1	110,0	1	121,0	1	133,1	1	146,4	1	161,0	5	671,5	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 33	xx Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diare	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut pencegahan dan pengendalian penyakit diare	Dokumen			1	141,7	1	155,9	1	170,0	1	188,0	1	207,0	5	862,6	Dinas Kesehatan		
				Prevalensi Kecacingan pada Anak Sekolah	Persen	13,6		<20		<20		<20		<20		<20		<20				Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Survey Evaluasi Intensitas Penyakit Kecacingan pada Anak Usia Sekolah Dasar	Jumlah dokumen hasil Survey Evaluasi Intensitas Penyakit Kecacingan pada Anak Usia Sekolah Dasar	Dokumen			1	297,1	1	326,0	1	326,0	1	326,0	1	326,0	5	1.601,1	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 33	xx Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kecacingan	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut pencegahan dan pengendalian penyakit kecacingan	Dokumen			1	29,3	1	35,0	1	35,0	1	36,5	1	42,4	5	180,2	Dinas Kesehatan		
				Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk	per 100.000 penduduk	40,2		49		49		49		49		49		45				Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Survey Faktor Risiko Demam Berdarah Dengue (DBD) di Daerah Endemis	Jumlah dokumen hasil Survey Faktor Risiko Demam Berdarah Dengue (DBD) di Daerah Endemis	Dokumen			1	128,7	1	145,0	1	156,0	1	171,0	1	186,0	5	786,7	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 33	xx Workshop Tataaksana Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Arbovirosis Lainnya	Jumlah petugas yang mampu tataaksana kasus DBD dan arbovirosis lainnya	Orang			50	270,5	66	250,0	66	260,0	66	265,0	66	266,0	314	1.311,5	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 33	xx Koordinasi Gerakan Satu Rumah Satu Pemantau Jenkit (Jumanik)	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut Gerakan Satu Rumah Satu Pemantau Jenkit (Jumanik)	Dokumen			1	142,9	1	160,0	1	165,0	1	175,0	1	185,0	5	827,9	Dinas Kesehatan		